

PEMBERDAYAAN KAUM MARGINAL

**Editor:
Sutoro Eko**

APMD Press

dan

Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) D-III
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

PEMBERDAYAAN KAUM MARGINAL

**Editor:
Sutoro Eko**

**Penulis:
Christine Sri Widiputranti
Hardjono
Hartono
Hastowiyono
M. Barori
MC Ruswahyuningsih
Nelly Tiurmida
Rini Dorojati
Rr. Leslie Retno Angeningsih
Sumarjono
Wiwiek Mariani Andarsih**

APMD Press

dan

**Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) D-III
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"**

Pengantar Editor

“Pemberdayaan Kaum Marginal”

Sutoro Eko

Buku ini ditulis pada saat yang tepat. Betapa tidak? Kaum marginal betul-betul tengah menjadi sebuah komoditas politik yang sangat berharga. Kalangan di luar pemerintah, terutama kalangan yang mengklaim dirinya sebagai “oposisi”, selalu mengatasnamakan rakyat kecil dan membela kaum marginal. Sementara pemerintah selalu kedodoran mengelola ekonomi makro dan mengurus jutaan orang Indonesia yang termasuk dalam kategori kaum marginal. “Pemerintah Tergagap, Rakyat Miskin Megap-megap”, demikian hasil kesimpulan jajak pendapat harian *Kompas* (22 Oktober 2005) dalam merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga (BBM) secara drastis sejak 1 Oktober 2005 memperlihatkan bencana yang serius bagi kaum marginal, meski pemerintah selalu berujar bahwa kenaikan harga BBM merupakan bentuk pengorbanan jangka pendek untuk pencapaian jangka panjang (*short term pain for long term gain*). Pemerintah rupanya tidak ingin kehilangan muka di hadapan rakyat miskin, dengan cara memberikan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin sebesar Rp 100 ribu per bulan. Sudah diduga sebelumnya, proyek “belas kasihan” itu menimbulkan masalah di perjalanan, muncul salah-urus, ketidaksiapan aparat, carut-marut, pertikaian warga dengan aparat, atau begitu banyak keluarga mampu yang serakah dengan menyatakan dirinya sebagai keluarga miskin. Bappenas, BPS dan PT Pos Indonesia sekalipun sangat gusar dalam mengawal proyek itu.

Carut marut pelaksanaan BLT memperlihatkan wajah asli orang Indonesia. “Program pemerintah “bagi-bagi duit” kompensasi kenaikan bahan bakar minyak ternyata memunculkan watak asli masyarakat”, demikian komentar harian *Kompas* (22 Oktober 2005). Betapa tidak. Tidak sedikit aparat yang begitu tega menyunat BLT, dan tidak sedikit warga yang tega merusak prasarana publik atau mengancam aparat setempat yang dicurigai bermasalah. Tidak sedikit warga yang tidak merasa malu mengatakan dirinya sebagai keluarga miskin padahal mereka hidup serba kecukupan. Tetapi keaslian wajah orang Indonesia saat ini juga mendatangkan “hikmah” besar bahwa selama puluhan tahun kita hidup dalam kebohongan dan kepalsuan besar. Carut-marut saat ini tentu merupakan buah dari kepalsuan itu.

Kisah pelaksanaan BLT yang bermasalah itu sebenarnya memberi petunjuk tentang titik klimaks pemberdayaan. Pemerintah sebenarnya sudah lama menguasai dan merayakan konsep pemberdayaan masyarakat. Bahkan presiden sudah melancarkan rencana pembangunan jangka menengah (2004-2009) yang sangat kental mengandung pemberdayaan masyarakat. Dengan kalimat lain, pemberdayaan masyarakat sebenarnya diyakini oleh pemerintah sebagai “roh” dalam setiap agenda pembangunan serta otonomi daerah. Tetapi

BLT justru jauh dari spirit pemberdayaan. Sudah banyak kalangan yang menyampaikan kritik tajam kepada BLT. BLT sebagai proyek pemalasan rakyat miskin, BLT lahir dari kecemasan pemerintah, BLT sebagai bentuk *money politics* pemerintah kepada rakyat, BLT untuk membungkam protes rakyat miskin, BLT sebagai bentuk penyajian ikan matang kepada rakyat, BLT mengandung sesat pikir pemberdayaan, BLT hanya sekadar proyek “belas kasihan”, BLT menimbulkan orang miskin baru, BLT tidak kurangi penderitaan rakyat miskin, dan masih banyak lagi. Pemerintah memang sudah seharusnya membagi anggaran pro rakyat miskin (*pro poor budget*) sebagai bentuk riil pemberdayaan kaum marginal, tetapi persoalan pentingnya adalah bagaimana skema pembagian anggaran itu. Anggaran pro rakyat miskin tentu tidak bisa dilakukan dalam bentuk sedekah atau bagi-bagi uang secara langsung seperti BLT, tetapi anggaran itu dialokasikan berdasarkan skema pemberdayaan yang lebih baik, misalnya dalam bentuk kemudahan akses rakyat miskin dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, atau melalui skema pengembangan usaha kecil dan menengah.

Berbagai pengalaman buruk dan kritik terhadap BLT itu merupakan pembelajaran yang berharga untuk menegaskan kembali tentang pemberdayaan masyarakat. Memang konsep pemberdayaan lahir tidak hanya saat ini, tetapi ia sudah lama menjadi bahan perbincangan dan agenda kebijakan pemerintah. Tentu tidak ada kata basi, tidak ada kata terlambat. Buku ini hendak mengusung kembali ide, pendekatan dan agenda pemberdayaan kaum marginal.

Pengalaman Pemberdayaan

Saya berkali-kali memperoleh kesempatan yang baik sebagai narasumber dalam pelatihan pemberdayaan masyarakat di hadapan jajaran pejabat daerah setingkat eselon III. Dalam arena itu saya sadar betul bahwa saya tidak perlu bermain-main dengan teori dan konsep pemberdayaan yang canggih, karena saya yakin bahwa para peserta sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak tentang pemberdayaan. Kadang-kadang saya berargumen bahwa saat sekarang bukan zamannya lagi berteori secara muluk-muluk. Teori sudah lengkap, tugas sekarang adalah bagaimana menjalankan pemberdayaan. Tetapi argumen ini tidak sepenuhnya benar karena pemahaman dan penerapan konsep pemberdayaan bisa keliru besar di lapangan. Sejauh ini ada sejumlah penyimpangan (bias) dalam memahami dan menjalankan pemberdayaan.

Pertama, pemberdayaan ditempuh pemerintah untuk memajukan atau mengubah masyarakat, dengan argumen dasar bahwa problem yang terjadi terletak pada diri (internal) masyarakat, bukan problem yang bersifat struktural (ketimpangan). Semua pemerintah daerah pasti sudah menempuh jalan memberi asistensi teknis, bantuan modal dan membuka jaringan pemasaran kepada usaha kecil yang dikembangkan masyarakat. Argumen dasarnya adalah bahwa usaha masyarakat itu miskin dari sisi kemampuan manajemen, modal dan jaringan pemasaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya intervensi ini di banyak daerah telah menumbuhkan usaha kecil masyarakat, tetapi pada saat yang sama mereka tidak berdaya bila berhadapan dengan tengkulak atau pedagang yang sangat dominan memainkan harga pasar. Sudah lama menjadi fenomena umum bahwa produsen umumnya tidak berkulit ketika berhadapan dengan distributor.

Tampaknya fenomena ketimpangan relasi bisnis ini tidak menjadi perhatian yang serius, atau yang terjadi, pemerintah tidak sanggup-mampu mengontrol bekerjanya mekanisme pasar yang merugikan orang-orang kecil.

Kedua, pemberdayaan tidak dijalankan sebagai bentuk pembelajaran dan kemitraan bersama antarsubyek, tetapi ada penempatan posisi pemerintah sebagai “subyek” (yang memberdayakan) dan masyarakat sebagai “obyek” (yang diberdayakan). Mungkin tidak ada refleksi secara kritis bahwa selama ini pemerintah menjadi aktor penting yang membuat ketidakberdayaan masyarakat. Sementara masyarakat ditempatkan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) atas program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah selama ini sudah ada sentuhan yang memperbaiki hubungan (yang sudah lama timpang) antara pemerintah dan masyarakat? Bagaimana konsep fasilitasi dan kemitraan dijalankan? “Masyarakat itu asuhan dan binaan kami. Kami memberi banyak bantuan kepada masyarakat. Bagaimana mungkin ada kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat”, demikian ungkap seorang pejabat Kabupaten Manokwari pada sebuah kesempatan. Ungkapan ini tentu tidak mewakili suara seluruh pejabat di Indonesia, tetapi jika ungkapan itu menjadi keyakinan, maka sebenarnya konsep pemberdayaan (fasilitasi dan kemitraan) belum berjalan dengan baik. Dengan kalimat lain, posisi hegemoni negara terhadap masyarakat masih terpelihara.

Ketiga, pemberdayaan mungkin belum tertanam sebagai sebuah semangat (spirit) dalam setiap regulasi, kebijakan dan program melainkan ia baru ditempatkan sebatas instansi dan proyek yang berjudul “pemberdayaan”. Proyek yang berjudul pemberdayaan itu misalnya lahir dalam bentuk insentif dana, bantuan modal, pendidikan dan latihan, pembentukan lembaga-lembaga masyarakat, dan lain-lain. Ada juga tindakan bagi-bagi dana kepada masyarakat yang tidak disertai spirit dan skema pemberdayaan, yang akibatnya dana itu menjadi amburadul. Contohnya adalah Kredit Usaha Tani (KUT). Tanpa harus memberi judul pemberdayaan pada sebuah proyek, sebenarnya spirit pemberdayaan bisa dimasukkan dan ditanamkan menjadi kebiasaan dalam setiap kegiatan rutin dan program pemerintah. Spirit pemberdayaan dalam pelayanan administratif, misalnya, bisa dikemas dalam bentuk transparansi dan akses informasi kepada masyarakat. Demikian juga dengan proyek-proyek prasarana fisik yang bisa memasukkan spirit pemberdayaan, misalnya dengan membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Keempat, pemerintah daerah sekarang tentu jauh lebih terbuka ketimbang keadaan masa lalu. Pemerintah tidak lagi alergi pada kritis, malah sekarang mulai membuka ruang-ruang partisipasi masyarakat, misalnya melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dalam mempersiapkan kebijakan daerah (Peraturan Daerah). Ini adalah langkah yang baik, tetapi praktiknya masih sering terjadi jebakan yang membuat partisipasi menjadi dangkal dan tidak bermakna. Partisipasi yang terjadi baru sebatas mengundang (*participation by invitation*) dengan metode “anda bertanya, saya menjawab”. Bahkan sering terjadi manipulasi bahwa “partisipasi undangan” itu sering diklaim bahwa peraturan daerah telah disusun secara partisipatif melalui sosialisasi. Padahal yang hadir dalam sosialisasi setengah hari itu hanya dihadiri oleh 50 orang dari unsur masyarakat.

Kelima, daya jangkau pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin kalah luas dan kalah cepat bila dibandingkan dengan kerja-kerja LSM atau lembaga-lembaga internasional. Pemerintah jelas mempunyai keunggulan dari segi otoritas, kebijakan dan anggaran ketimbang yang sumberdaya yang dimiliki oleh LSM dan lembaga-lembaga internasional. Sejumlah lembaga internasional mempunyai komitmen, konsep, kerangka implementasi dan sumberdaya yang jauh lebih besar ketimbang yang dimiliki oleh pemerintah. Mereka justru memberikan bantuan yang sangat besar terhadap pemerintah dalam melakukan agenda pembaharuan dan pemberdayaan: *capacity building*, resolusi konflik, penanggulangan kemiskinan, perbaikan pelayanan publik, desentralisasi desa, penguatan organisasi lokal, keluarga berencana dan seterusnya. Demikian juga dengan LSM-LSM yang justru lebih maju, cepat dan dekat melakukan kerja-kerja pemberdayaan terhadap masyarakat dengan skema program yang berbeda-beda (*community development*, kesehatan, pendidikan masyarakat, pertanian organik, pembaharuan desa, pemberdayaan perempuan dan anak, pendampingan terhadap usaha kecil, *revolving fund*, kehutanan masyarakat, dan masih banyak lagi).

Keenam, selalu ada bias bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemberian “pancing” kepada rakyat, bukan “ikan” matang yang siap saji dan siap disantap. Dalam praktiknya pola pemberdayaan ini ditempuh dengan pemberian stimulan kepada masyarakat agar digunakan masyarakat mengembangkan potensi dan swadayanya. Dalam batas-batas tertentu pemahaman dan praktik ini benar. Pemberian ikan seperti BLT yang diuraikan di atas merupakan bantuan yang mematikan. Tetapi kalau dilihat lebih makro dan kritis pemberian pancing adalah kekeliruan besar. Mengapa? Secara empirik masyarakat, apalagi masyarakat di komunitas desa, sudah tidak mempunyai “kolam” yang bisa dipancing. Kalau masyarakat diberi pancing akan digunakan memancing apa atau memancing ikan di kolam mana? Karena itu secara ekonomi politik, pemberdayaan berarti pembagian kolam kepada masyarakat atau pembagian kekuasaan dan kekayaan yang selama ini dikuasai negara dan pemilik modal.

Ketujuh, sejauh ini pemerintah mempunyai jargon-jargon baru, tetapi secara substantif tindakan dan kelakuannya masih lama. Semua pejabat pasti sangat fasih berbicara tentang teori pemberdayaan, tetapi tindakannya belum tentu mencerminkan pemberdayaan. Ketika saya menghadiri sebuah seminar tentang otonomi daerah di Cilacap awal April 2005 lalu, bupati menyampaikan pidato kunci yang penuh dengan jargon-jargon yang indah untuk didengar. Dalam naskah pidato itu bupati menyampaikan semua konsep yang indah: pemberdayaan, *good governance*, partisipasi, kemitraan, profesionalisme birokrasi, dan masih banyak lagi. Ketika saya memperoleh giliran berbicara, saya coba berbicara menyampaikan kritik halus tetapi tajam terhadap naskah pidato bupati. “Wah pidato kunci bupati hebat sekali, luar biasa. Semua konsep yang selama ini pelajari terangkum secara sistematis. Jika konsep-konsep yang indah itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka di Cilacap tidak ada masalah, di Cilacap tidak ada kemiskinan, dan kita tidak perlu seminar lagi”, demikian komentar saya.

Bupati Kebumen yang mempesona banyak lembaga internasional juga sangat lihai melakukan tebar pesona, melempar konsep-konsep *good*

governance dan pemberdayaan di media lokal maupun nasional. Dalam sebuah kesempatan bupati pernah berujar bahwa dia tidak begitu getol memacu PAD sebab langkah ini justru akan memberatkan rakyat. Langkah yang dia tumpuh adalah pengembangan *good governance* dan pemberdayaan masyarakat. Agenda besar itu didukung oleh sejumlah lembaga donor pembangunan seperti Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan Bank Dunia, sekaligus dipromosikan secara besar-besaran di media massa. Jika Anda membaca tebar pesona *good governance* itu maka Anda akan tercengang dan mengatakan bahwa bupati Kebumen sangat hebat. Tetapi kalau Anda memasuki lorong-lorong desa dan kota Kebumen, menemui secara dekat dan berbicara dengan kaum marginal, maka Anda akan menyampaikan sejumlah pertanyaan besar tentang jargon *good governance* yang dipromosikan bupati.

Kalau pemberdayaan selama ini penuh dengan bias dan distorsi, lalu apa hasil-akibatnya? Secara empirik berbagai segmen masyarakat yang berpredikat sebagai kaum marginal tetap mengalami involusi dan marginal. Berbagai sumber kehidupan seperti desa dan pertanian juga mengalami involusi. Pemberdayaan hanya sebatas jargon, ada kesenjangan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Pemberdayaan tidak lebih dari sekadar *business as usual* yang secara rutin dijalankan oleh birokrasi pemerintah tanpa berbasis pada komitmen dan spirit membebaskan kaum marginal dari ketidakberdayaan mereka akibat dari pembangunan yang selama ini hanya semata mengejar pertumbuhan.

Lalu bagaimana? Bias-bias pemberdayaan memang membutuhkan pelurusan. Sejauh ini sudah banyak karya keilmuan maupun panduan kebijakan pemerintah yang membeberkan secara gamblang tentang pemberdayaan. Di perpustakaan maupun toko buku sudah tersedia banyak buku yang membahas pemberdayaan. Setiap Undang-undang pasti juga menyebutkan jargon pemberdayaan. Bappenas telah mengeluarkan dokumen berharga bernama Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang di dalamnya mengelaborasi secara memadai tentang pemberdayaan. Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, yang didalamnya mengusung spirit pemberdayaan dan keberpihakan kepada kaum marginal. Lalu kurang apa?

Saya tidak perlu lagi melakukan elaborasi dan pemetaan tentang konsep dan strategi pemberdayaan. Semuanya sudah lengkap, tinggal menjalankan. Kalau mesin yang digunakan untuk menjalankan pemberdayaan sudah aus memang harus diganti yang baru. Kata kunci penting dalam konteks ini sebenarnya adalah komitmen politik dan responsivitas birokrasi. Semua konsep yang indah hanya akan menjadi museum atau hanya menjadi ajang bisnis proyek kalau tidak berangkat pada komitmen dan responsivitas. Keduanya mencakup etika, moralitas, kepemimpinan, keteladanan, kesantunan, kejujuran, keseriusan, keberpihakan dan sebagainya dalam mengelola pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan.

Ada sejumlah indikator yang agendatif dan konkret komitmen dan responsivitas. *Pertama*, kesediaan pemerintah beserta mesin birokrasinya melakukan refleksi dan aksi setiap kebijakan dan program secara serius. Setiap program yang sudah dijalankan butuh evaluasi secara serius, bukan sekadar menjadi dokumen proyek yang tidak bermakna. Kegagalan atau keterbatasan

yang dijumpai dalam evaluasi tentu butuh tindakan baru yang inovatif sehingga kebijakan dan program berikutnya bertambah lebih baik. *Kedua*, dedikasi aparat birokrasi yang tinggi untuk “berkarya” mengurus masyarakat, bukan semata “bekerja” keras mengurus internal birokrasi (kelembagaan, keuangan, sistem dan prosedur, aturan dan sebagainya) atau hanya bekerja sekadar mencari nafkah untuk dirinya sendiri. *Ketiga*, komitmen dan responsivitas secara konkret diukur dari alokasi anggaran dalam APBN maupun APBD untuk pelayanan publik dan kepentingan kaum marginal.

Tentang Buku ini

Buku yang bertitel “Pemberdayaan Kaum Marginal” ini lahir di komunitas akademik Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) jenjang D-III Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Para penulisnya mengedepankan komitmen akademik dan sosial terhadap pemberdayaan kaum marginal. Buku ini tentu tidak menjanjikan kajian yang utuh dan memuaskan tentang pemberdayaan. Secara metodologis buku ini tidak berangkat dari sebuah kerangka kerja dan pendekatan yang tunggal, melainkan ia bekerja secara inkremental mengumpulkan berbagai gagasan yang berserakan pada penulis. Namun demikian, buku ini dari bab ke bab tetap menampilkan sejumlah pesan berharga, dan kita bisa menarik sejumlah benang merah penting untuk meluruskan jalan pemberdayaan.

Pesan pertama yang menonjol dalam buku ini adalah bahwa tidak ada pengertian, pendekatan dan model tunggal tentang pemberdayaan. John Friedmann (1992), ahli pemberdayaan dan pembangunan alternatif, sama sekali tidak memberikan pengertian tentang pemberdayaan. Dia hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan: sosial, psikologi dan politik. Pemberdayaan, bagi dia, merupakan bagian dari proses pembangunan alternatif menuju pertumbuhan ekonomi yang memadai, demokrasi inklusif, kesetaraan gender dan keberlanjutan. Deepa Narayan (2002) juga pernah menyampaikan bahwa tidak ada metode dan strategi tunggal dalam pemberdayaan, ia bersifat kompleks dan fleksibel sesuai dengan konteks, ruang dan waktu. Tetapi Deepa Narayan juga memperlihatkan pemberdayaan setidaknya mengandung empat unsur utama: akses terhadap informasi, partisipasi, akuntabilitas dan kemampuan organisasi lokal.

Pemberdayaan tentu bisa dibaca dengan berbagai pendekatan. *Pertama*, pendekatan ekonomi politik (*political economy approach*) merupakan pendekatan utama dan dominan dalam pemberdayaan. Tulisan Sumarjono dalam bab 1 secara gamblang membidik pemberdayaan dari sisi pendekatan ekonomi politik (struktural) ini. Pendekatan struktural pada prinsipnya melihat ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat berangkat dari konteks ketimpangan relasi kekuasaan antara masyarakat dengan negara dan kapital. Sumarjono melihat konteks ketidakberdayaan itu akibat dari developmentalisme (pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan) yang selama ini dijalankan di Indonesia. Karena bermula dari ketimpangan struktural, maka pemberdayaan juga harus menggunakan solusi struktural, yakni mendongkrak kekuasaan/kekuatan kelompok-kelompok yang tidak berdaya.

Kedua, pendekatan pembangunan yang berbasis manusia (*human devevelopment approach*). Pendekatan ini memang sangat beragam. UNDP misalnya mengusung *human development* sebagai paradigma alternatif dalam pembangunan, yang di dalamnya mengdepankan empat spirit utama: produktivitas, kesetaraan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Sementara MC Ruswahyuningsih melihat dari sisi lain, yaitu pada konteks relasi horizontal antarmanusia dan posisi manusia dalam pembangunan nasional. Sebagai seorang psikolog dia membidik ketidakberdayaan dengan konsep patologi sosial atau penyakit sosial dalam masyarakat, misalnya merebaknya konflik sosial dan budaya kekerasan, dekadensi norma dan etika sosial, merosotnya mental-spiritual, dan lain-lain. Kondisi-kondisi buruk akibat globalisasi inilah yang menurut MC Ruswahyuningsih menjadi hambatan dalam pembangunan menuju masyarakat madani dan menjadi bangsa yang bermartabat untuk hidup bersama sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu dengan pendekatan psikologis atas pemberdayaan manusia dia menawarkan gagasan tentang etika kepedulian menuju masyarakat yang berkualitas.

Ketiga, pendekatan pemberdayaan berbasis gender (*gender based approach*). Pendekatan yang sangat menonjol dalam pemberdayaan ini terutama membidik marginalisasi kaum perempuan dalam relasi sosial, ekonomi dan politik. Para pendukung pendekatan gender, terutama kaum feminis, bercita-cita menciptakan kesetaraan gender, yakni kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Tulisan Rr. Leslie Retno Angeningsih dalam bab 3 menggunakan pendekatan gender ini untuk mengelaborasi tentang konteks, konsep dan agenda pemberdayaan perempuan. Pendekatan gender ini diteruskan dengan tulisan Wiwik Mariani Andarsih di bab 4 dan tulisan Rini Dorojati di bab 5. Bab 4 secara khusus membidik pemberdayaan perempuan dan pembinaan remaja dalam bingkai pemberdayaan keluarga dengan pengalaman program Bina Keluarga Remaja yang dijalankan oleh BKKBN.

Dengan tetap berpijak pada pendekatan gender, Rini Dorojati menekankan pentingnya perempuan untuk meningkatkan keberdayaannya dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan meningkatkan kemandiriannya (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*internal strenght*). Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologis, sosial budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama lain. Salah satu agenda dan proses pemberdayaan itu adalah melalui wadah organisasi. “Perempuan dapat berdaya melalui pembentukan organisasi kelompok yang beraneka ragam tujuannya”, demikian tegas Rini. Yang menarik dari kajian Rini adalah mendialogkan secara diakronis antara ide pemberdayaan melalui organisasi perempuan dengan pengalaman empirik di organisasi perempuan di kampung-kampung. Secara empirik dalam setiap organisasi penuh dengan dinamika, seluk-beluk, potensi besar untuk pemberdayaan, tetapi juga terkadang hadir sejumlah distorsi yang mengganggu pemberdayaan. Tetapi Rini tetap optimis, atau menaruh harapan, bahwa organisasi perempuan dalam lingkungan wilayah yang terkecil merupakan sarana untuk meningkatkan kemandirian perempuan (*self reliance*).

Keempat, pendekatan pemberdayaan yang berbasis kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam studi pembangunan, pendekatan kebutuhan dasar adalah yang muncul pertama kali dalam merespons dan mengkritik pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, terutama untuk menjawab problem kemiskinan yang diakibatkan dari pertumbuhan atau kegagalan konsep trickle down effect dalam menjanjikan kemakmuran. Pendekatan kebutuhan dasar memang paling dasar harus dilakukan kepada kaum marginal, misalnya kaum miskin, dalam bentuk layanan sosial yang paling dasar. Pemerintah tentu berkewajiban menyediakan layanan sosial dasar itu sekaligus membuka akses secara terbuka dan nondiskriminatif bagi kaum marginal untuk memperoleh layanan itu.

Tetapi belakangan dalam studi pembangunan muncul pendekatan baru, yakni pendekatan yang berbasis hak (*right based approach to development*), sebagai kritik dan revisi atas pendekatan berbasis kebutuhan dasar. Jika pendekatan berbasis kebutuhan berupaya mengamankan sumberdaya tambahan untuk melayani atau mencukupi kebutuhan kelompok-kelompok marginal, maka pendekatan berbasis hak menegaskan bahwa sumberdaya yang tersedia seharusnya dibagi secara adil kepada kaum marginal, sekaligus memperkuat posisi kaum marginal memperjuangkan hak-hak mereka atas sumberdaya. Kedua pendekatan itu juga berbeda dari sisi motivasi. Jika kebutuhan bisa ditangani dengan pendekatan karitatif (amal), maka hak kaum marginal berbasis pada kewajiban legal (*legal obligation*) bahkan dalam beberapa kasus ia berbasis pada kewajiban etik yang menjadi fondasi bagi nasib manusia (Celestine Nyamu-Musembi dan Andrea Cornwall, 2004). “*A rights-based approach to development describes situations not simply in terms of human needs, or developmental requirements, but in terms of society’s obligations to respond to the inalienable rights of individuals, empowers people to demand justice as a right, not as a charity, and gives communities a moral basis from which to claim international assistance when needed*”, demikian ungkap Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Anan (1998).

Buku ini belum mengarah secara eksplisit pada pendekatan berbasis pada hak itu, tetapi tulisan Sumarjono sudah mengemukakan hak-hak masyarakat, tulisan Rr. Leslie Retno Angeningsih telah menunjukkan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, maupun hak-hak partisipasi yang dikemukakan oleh tulisan M. Barori dalam bab 9. Sementara pendekatan yang berbasis pada kebutuhan sangat menonjol dalam tulisan Hartono (bab 7) dan tulisan Hardjono (bab 10). Tulisan Hartono secara khusus membidik problem kelompok usia lanjut dan agenda pelayanan kepadanya. Sementara tulisan Hardjono secara tegas menonjolkan pendekatan kebutuhan dasar bagi kaum miskin, yakni dengan cara penerapan kebijakan pemerintah untuk memberikan juaan sosial kepada keluarga miskin.

Kelima, pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada kependudukan (*demographic approach to empowerment*), yang dikedepankan oleh Hastowiyono dalam bab 6. Secara khusus Hastowiyono menulis dengan tema “Relevansi Pembangunan Berwawasan Kependudukan Dalam Upaya Memberdayakan Tenaga Kerja Desa”. Dengan pendekatan ini kita bisa menemukan berbagai problem ketidakberdayaan masyarakat secara demografis,

misalnya angka kemiskinan, kondisi pendidikan masyarakat, pengangguran, angka usia lanjut yang tidak produktif. Tulisan Hartono maupun Nelly Tiurmida (bab 8) sebenarnya bisa kita letakkan dalam kerangka pendekatan berbasis kependudukan ini.

Posisi dan argumen pendekatan berwawasan kependudukan sudah sangat jelas. Yang paling dasar pendekatan kependudukan hadir sebagai kritik atas pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. “Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menganut arus utama ekonomi neo-klasik yang liberal-kapitalistik tidak sesuai dengan keadaan ketenagakerjaan di desa“, demikian argumen tegas Hastowiyono. Pembangunan berwawasan kependudukan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan manusia diyakini lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan pada umumnya dalam keadaan yang kurang berdaya dan miskin. Pembangunan berwawasan kependudukan juga lebih memberikan peluang terhadap upaya-upaya pemberdayaan tenaga kerja desa. Tenaga kerja desa tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi sebagai faktor produksi semata, melainkan harus dipandang secara holistik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan tenaga kerja desa harus dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, spirit kemandirian dan pendekatan lokalitas.

Keenam, pemberdayaan dengan pendekatan yang berbasis komunitas atau sering disebut *community empowerment*. Tulisan M. Barori (bab 10), pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi sangat menonjolkan pendekatan *community empowerment* ini, dengan terfokus pada partisipasi. Kata kunci pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah partisipasi dalam *local governance* termasuk dalam konteks pembuatan keputusan di tingkat lokal. Partisipasi merupakan hak fundamental dalam demokrasi dan pembangunan. Ia menjadi alat sekaligus tujuan pembangunan. Di satu sisi partisipasi akan mendongkrak legitimasi pemerintah, sekaligus membuat kebijakan pemerintah lebih berakar pada masyarakat. Di sisi lain partisipasi meningkatkan kapasitas akses dan kontrol masyarakat, sekaligus memungkinkan (*enabling*) masyarakat membangkitkan potensi dan prakarsa lokal.

Pesan lain yang disampaikan buku adalah bahwa “target” utama pemberdayaan adalah kaum marginal (*marginalized groups*) atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di Indonesia ada begitu banyak segmen masyarakat yang termasuk dalam kategori kaum marginal: petani, nelayan, perempuan, lansia, pengangguran, pekerja rumah tangga, pekerja seks komersial, buruh manufaktur, golongan ekonomi lemah, keluarga miskin, pedagang asongan, anak jalanan, masyarakat adat, dan masih banyak lagi. Dalam struktur tata pemerintahan Indonesia, desa juga sebagai sebuah entitas yang marginal. Mengapa mereka marginal? Mereka marginal bukan karena faktor internal, terutama kemampuan dan modal yang mereka miliki. Jika kita menggunakan kacamata ekonomi politik ala Sumarjono, hadirnya kaum marginal itu merupakan produk *developmentalisme* dan *neoliberalisasi*. Marginalisasi bisa dibaca dari sisi ketimpangan kekuasaan-kekayaan antara negara, pasar dan masyarakat. Di satu sisi negara menjadi arena yang dikuasai oligarki elite, yang tidak mempunyai komitmen dan responsivitas terhadap

rakyat. Mereka memperoleh kekuasaan dengan cara menggunakan dukungan rakyat, tetapi ketika mereka berkuasa justru meminggirkan rakyat. Di sisi lain negara justru lebih berpihak kepada pemilik modal (pasar) guna memacu pertumbuhan ekonomi. Agenda pembangunan di Indonesia yang digerakkan oleh negara dan modal itu ternyata hanya semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi melupakan sisi kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan, keadilan sosial, kemandirian atau yang sering disebut *human well being*. Karena itu pembangunan justru menciptakan pemiskinan dan marginalisasi ketimbang pemberdayaan kepada rakyat. Kaum marginal tidak mempunyai akses yang memadai terhadap kekuasaan, kebijakan, kekayaan yang dikuasai negara-modal, sehingga mereka tidak mampu mengembangkan potensi dan prakarsa mereka.

Kaum marginal di Indonesia memang begitu kompleks dan beragam, namun buku ini tidak mungkin mencakup semua kelompok itu. Beberapa bab dalam buku ini membidik beberapa kelompok marginal. Bab 3, 4 dan 5 membidik kaum perempuan, bab 6 membidik ketidakberdayaan tenaga kerja di pedesaan, bab 7 dan bab 8 fokus pada ketidakberdayaan kelompok usia lanjut, bab 9 berbicara tentang komunitas desa yang tidak berdaya dalam konteks *local governance*, bab 10 berbicara tentang kaum miskin, dan bab 11 yang ditulis oleh Christine Sri Widiputranti berbicara tentang ketidakberdayaan petani dalam konteks pertanian yang juga tidak berdaya dalam semesta pembangunan di Indonesia. Ketidakberdayaan petani dan pertanian tentu paralel dengan ketidakberdayaan penduduk desa yang dikaji oleh Hastowiyono. Sejak zaman kolonial, apalagi di zaman sekarang, pertanian sungguh menjadi korban pembangunan nasional. Bahkan Clifford Geertz (1963) telah menunjukkan tentang fenomena involusi pertanian di Jawa sejak masa kolonial. Karena pertanian di pedesaan menjadi marginal dan tidak menjanjikan, maka umumnya para penduduk desa melakukan urbanisasi ke kota, yang sebagian juga menjadi pemasok buruh murah di sektor industri atau menjadi gelandangan dan kaum miskin kota. Elemen-elemen terakhir ini sebenarnya juga termasuk kategori kaum marginal di perkotaan yang belum sempat dikupas oleh buku ini.

Pemberdayaan kaum marginal di atas tentu membutuhkan ruang, agenda dan proses. Pesan penting ketiga buku ini adalah bahwa ruang, agenda dan proses pemberdayaan kaum marginal begitu kompleks, beragam dan tentu penuh dengan tantangan. Di bab terakhir Christine menunjukkan pemberdayaan petani dalam ruang atau arena pengembangan agribisnis. Sementara tulisan Sumarjono maupun Rini Dorojati menempatkan pemberdayaan dalam skema dan ruang organisasi lokal. Tulisan Wiwik Mariani menempatkan pemberdayaan perempuan dan pembinaan remaja dalam kerangka revitalisasi keluarga.

Berkaitan dengan ruang, agenda dan proses pemberdayaan buku ini menyampaikan sejumlah pesan penting. *Pertama*, pemberdayaan terhadap kaum marginal membutuhkan *affirmative action*. Artinya pendekatan terhadap kelompok marginal harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan segmen masyarakat lain yang secara kelas maupun gender dalam posisi berdaya. Contoh yang menonjol adalah pelayanan terhadap kelompok usia lanjut, jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan penguatan kapasitas petani. *Kedua*, pemberdayaan membutuhkan akses informasi, penguatan etika sosial, pembelajaran secara lokal, penempaan kemampuan kritis dan pengorganisasian. *Ketiga*,

pemberdayaan membutuhkan perpaduan antara gerakan masyarakat dan responsivitas pemerintah.

Referensi

- Eko, Sutoro. (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press.
- Friedmann, John. (1992), *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge and Oxford: Blackwall.
- Narayan, Deepa (2002), *Empowerment and Poverty: A Sourcebook*, Washington D.C: World Bank.
- Nyamu-Musembi, Celestine dan Andrea Cornwall (2004), “What is the “Rights-Based Approach” All About? Perspectives from International Development Agencies”, *IDS Working Paper 234*.
- UNDP (1998), *Integrating Human Rights With Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*, New York: UNDP.

Bab 1

Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumarjono

Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan baru dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan Masyarakat muncul sebagai kritik terhadap pendekatan modernisasi yang gagal dalam memenuhi dua prasarat dasar peradaban manusia, yaitu: kebutuhan rakyat untuk hidup secara harmonis dengan lingkungannya dan kebutuhan rakyat untuk hidup secara harmonis dengan yang lain. Selain itu pendekatan modernisasi dengan jargon pertumbuhan ekonomi juga terbukti tidak menjamin adanya tingkat hidup sebagian besar masa rakyat lapisan terbawah seperti yang direncanakan melalui *trickle down effect*-nya.

Hasil-hasil kajian yang telah dilakukan di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan melalui pendekatan modernisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidak merataan distribusi hasil pembangunan kepada anggota masyarakat dalam sebuah negara (Tjokrowinoto, 1995: 5). Para pegiat lingkungan hidup banyak menulis kritik terhadap pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, dengan menyatakan bahwa kemajuan pertumbuhan ekonomi telah secara terus menerus merusak sistem-sistem alami. John Rapley mengatakan bahwa industrialisasi yang dilakukan ternyata telah banyak mengkonsumsi sumberdaya alam (Rapley, 1996: 2).

Konsep pemerataan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut di atas, realisasinya tak kunjung tiba. Akibatnya, terjadi akumulasi asset dan kapital pada segelintir kelas sosial tertentu yang merupakan tanda tersumbatnya distribusi hasil-hasil pembangunan, sedangkan asas pemerataan tinggalah slogan kosong yang hanya nyaring didengar. Keyakinan akan pembagian kue pembangunan dengan cara “menetes ke bawah” (*trickle down mechanism*) seperti yang diyakini para penganut teori pertumbuhan justru tidak pernah terbukti di dalam kenyataan empiris. Dengan kata lain strategi pertumbuhan dan pemerataan yang menjadi orientasi pembangunan sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak mengakibatkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), justru yang terjadi malah kebalikannya (*trickle up effect*) atau proses terserap ke atas. Oleh karena itu pantas dikatakan bahwa proyek pembangunanisme telah gagal karena tidak mencapai ukuran yang ditargetkan dalam capaian keberhasilan pembangunan, yaitu berkurangnya angka kemiskinan mutlak, menurunnya ketimpangan pembagian pendapatan, dan mengecilnya angka pengangguran.

Konsep pertumbuhan yang menjadi target pencapaian pembangunan Indonesia adalah realitas obyektif yang secara gamblang terbukti menafikan rasa humanistik. Menurut pengamatan (Baswir dkk; 1999), dalam praktiknya, pembangunan yang berorientasi pertumbuhan selalu menekankan pada peningkatan sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan laju perekonomian

semata, ternyata telah memunculkan serangkaian borok pembangunan, fenomena kemiskinan, kebodohan, marginalisasi, keterbelakangan, kesenjangan sosial dan pemerintah yang korup adalah kenyataan dramatik sebuah fragmentasi negara yang “mendewakan” pembangunan sebagai sang penyelamat, padahal yang terjadi sebaliknya, yakni wabah penyakit yang senantiasa merusak sendi-sendi kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pembangunan yang diskriminatif tersebut, meminjam istilah Friedmen (1992) sebagaimana dikutip Billah disebut suatu proses sistematis untuk menghilangkan daya kekuatan rakyat kecil, yaitu; (1) penghilangan daya kekuatan politik dengan cara mengucilkan rakyat dari proses pengambilan keputusan, (2) penghilangan daya sosial ekonomi, dengan cara menjauhkan rakyat dari akses pada berbagai sumber-sumber kehidupan (sosial) dan penghidupan (sumber-sumber ekonomi), dan (3) penghilangan daya kekuatan psikologis, di mana kekuatan rakyat terasingkan dari produk mental dan menjadi tidak kritis, karena terhegemoni oleh ideologi yang ditanamkan secara sengaja dan sistematis oleh penguasa dan pemimpin-pemimpin mereka sendiri yang telah lebih banyak ditarik ke pusat-pusat kekuasaan nasional maupun lokal sehingga kehilangan pandangan dan tidak kritis lagi menyuarakan kepentingan mereka.

Modernisasi dengan menghadirkan industrialisasi tidak lain merupakan tampilan wajah baru dari kapitalisme yang menjelma dalam bentuk pembangunanisme. Menyebarnya proyek-proyek pembangunan di Tanah Air telah memberikan dampak positif, meskipun belum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat luas, disamping itu pembangunan itu juga telah memberikan dampak negatif.

Proyek developmentalisme yang telah dijalankan di negeri ini ternyata tidak saja berakibat pada melunturnya kultur kearifan tradisional, tetapi juga menyebabkan bangsa ini kehilangan kemampuan yang bersumber dari kekuatan rakyat serta cara hidup yang egalitarianistik dan sosialistik. Munculnya kapitalisme juga telah melumpuhkan jutaan para wiraswastawan bermodal kecil, kaum tani, nelayan dan buruh pabrik. Sementara itu masih ada segelintir orang dalam posisi yang sangat diuntungkan dalam hidup berkemakmuran atas berlakunya sistem yang tidak adil itu (Sunardi, 1996: 66).

Pembangunan yang “salah kaprah” atau “salah urus” ini tidak dilandasi oleh sebuah paradigma yang sesuai dengan potensi, keterbatasan dan nilai-nilai yang terdapat pada kemampuan bangsa sendiri yang pada akhirnya memuarakan kebangkrutan ekonomi negara. Semenjak ditimpa krisis moneter pada pertengahan tahun 1998 lalu, berbagai implikasinya masih terasa hingga sekarang. Misalnya meningkatnya angka inflasi dan pengangguran, menambah jumlah penduduk miskin. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) saat ini penduduk miskin di Indonesia mencapai 79,4 juta jiwa. Sebanyak 56,6 juta berdomisili di desa dan 22,6 juta berdomisili di kota. Secara makro, terdapat 57 juta orang miskin baru muncul setelah krisis ekonomi ini mencabik-cabik perekonomian nasional (Buletin NU; 2001).

Gambaran di atas mendorong munculnya pemikiran kritis bahwa paradigma pertumbuhan yang bertumpu pada *production-centered development* dan *equity oriented development* yang berorientasi pada paradigma

kesejahteraan perlu dilakukan otokritik. Karena kedua paradigma itu telah memberlakukan kebijakan pembangunan yang sentralistik dan hanya memosisikan manusia sekedar sebagai obyek belaka, dan bukannya sebagai aktor (pelaku) yang bebas dan independent (Moeljarto;1996:218).

Semestinya konsep pembangunan tersebut harus segera didekonstruksi. Pembangunan tidak dapat dimonopoli secara terpusat oleh negara, namun harus diorientasikan pada masyarakat. Pembangunan yang dikemas dengan paradigma dan kebijakan yang digerakkan oleh negara dan pasar telah terbukti menimbulkan kerugian pada masyarakat. Karena itu pembangunan harus berbasis pada masyarakat (*community based development*): pembangunan berawal dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Konsep ini dikenal dengan Pemberdayaan Masyarakat, dan model pembangunan seperti ini merupakan paradigma alternatif dalam pembangunan

Orientasi Kebijakan Pembangunan

Munculnya gugatan terhadap paradigma pembangunan dengan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kegelisahan serta desakan yang kuat dari berbagai pihak untuk mencari solusi alternatif di tingkat paradigmatis terhadap arah pembangunan yang dapat menjamin terciptanya keadilan dan kemakmuran rakyat. Pilihan untuk mencari paradigma baru bagi pembangunan yang berperasaan (meminjam istilah Revrisond Baswir dkk.) adalah urgen dipikirkan. Model pembangunan yang mengarah pada *people-centered development* (pembangunan yang berpusat pada manusia) dan *community-based resource management* (pengelolaan sumber daya lokal berbasis masyarakat) menjadi wacana yang menarik.

Sejak tahun 1960-an Indonesia telah menggunakan pendekatan pertumbuhan dan kini secara berangsur-angsur telah melakukan perubahan dan memulai dengan menggunakan pendekatan Pembangunan Masyarakat yang dilakukan sejak tahun 1990-an, kemudian bergeser menjadi pemberdayaan masyarakat hingga sekarang. Keadaan saat ini pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan pertumbuhan, akan tetapi masih cukup relevan jika pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai kerangka analisis terhadap berbagai pelaksanaan pembangunan di Indonesia, misalnya untuk melihat hasil-hasil dan dampak kegiatan pembangunan yang telah memarginalisasikan masyarakat lokal sehingga tidak berdaya dan mengakibatkan kemiskinan.

Menurut David Korten (1984) seperti dielaborasi Moeljarto, bahwa pusat perhatian pembangunan yang berpusat pada manusia mengacu pada perkembangan manusia (*human growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equity*), dan berkelanjutan (*sustainability*), yang dibangun berdasarkan dominasi logis demi keseimbangan ekologi manusia (*balanced human ecology*); berdasarkan sumber informasi dan prakarsa yang kreatif dari kehendak kemanusiaan yang sejati dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimal dari segenap potensi manusia.

Apabila paradigma baru ini diproyeksikan sebagai model pembangunan yang memihak kepada kalangan akar rumput (*grassroots*) maka kreativitas lokal atau kehendak yang berkembang dari bawah (masyarakat lokal) menjadi sumber

yang paling dominan dalam penentuan kebijakan pembangunan. Dengan demikian setiap keunikan (daerah) turut menentukan pilihan paradigmatis yang menjadi panduan dari arah program pembangunan yang dikehendaki.

Dalam realisasi otonomi daerah, implementasi paradigma yang dimaksudkan seharusnya dilandasi kerangka berpikir desentralistik dan lebih memprioritaskan tujuan utama maksud diselenggarakannya otonomi, yaitu dalam kerangka: (1) menumbuh-kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, (2) meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan yang layak dan bermanfaat, (3) memperkuat kedudukan dan kemampuan daerah dalam mengurus dirinya sendiri, (4) meningkatkan aparatur daerah yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna, dan (5) mengoptimalkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan aparatur (pejabat/birokrat) daerah agar tercipta manajemen yang efektif dan efisien (Affandi; 2001) yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan beberapa agenda kerja supaya hasilnya secara konkrit dapat dirasakan masyarakat, di antaranya adalah:

Pertama, mengoptimalkan kinerja otonomi daerah. Dengan diundangkannya UU 22/1999 tidak lain merupakan *shifting* yang sangat substansial dari model pengelolaan negara yang sentralistik ke arah desentralistik. Maka yang paling esensial dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) adalah adanya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat lokal dalam rangka mengelola, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Kebijakan-kebijakan dalam otonomi daerah diharapkan mampu mendorong akselerasi bagi terciptanya otonomitas masyarakat di tingkat lokal sesuai dengan potensi daerah dan inisiatifnya sendiri terhadap apa yang dianggap urgen. Dengan berkembangnya aktivitas demokrasi dari bawah diharapkan rakyat sebagai warga bangsa yang berdaulat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui program pemberdayaan, mengingat tujuan dari pada arah program otonomi daerah yang terpenting yaitu untuk memperbaiki nasib rakyat melalui berbagai aktivitas pembangunan (Affandi: 2001).

Penyelenggaraan otonomi daerah seharusnya lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan distribusi dan keadilan sosial, serta memperhatikan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah. Penghargaan terhadap kemajemukan lokal merupakan suatu keniscayaan yang harus diakomodir dalam mengendalikan jalannya otonomi. Tanpa itu, realisasi otonomi daerah bukan mustahil akan menemui hambatan yang cukup berarti untuk kelangsungan suatu proses pemberdayaan masyarakat (*empowerment of people*).

Kedua, kembali pada nilai-nilai budaya atau tradisi lokal yang masih relevan tanpa apriori atau menutup diri dengan temuan-temuan modern, nilai-nilai maupun konsep-konsep pembangunan yang cocok dengan kondisi daerah setempat. Berbagai kearifan lokal, misalnya kearifan tradisi (*local wisdom*), nilai endogen dan pengetahuan lokal (*local knowledge*) semestinya menjadi sumber inspirasi dan basis pembangunan suatu daerah. Upaya revitalisasi tradisi merupakan suatu keniscayaan, tanpa terbuai dalam semangat apologetik terhadap cerita kejayaan masa lalu. Tugas utama kita sekarang adalah bagaimana

kita mentransformasikan nilai-nilai, pranata dan prinsip adat menjadi energi pembangunan. Meminjam istilah Prof. Soetandyo (2001), “pembangunan” adalah upaya menjadikan *the old traditional societies* sebagai *a new modern state* dengan tetap berorientasi pada strategi transformasi sosial (*social transformation*) (Balairung: 2001).

Ketiga, mengupayakan kesepadanan hubungan desa-kota, atau pusat dan daerah yang terkait dengan kebijakan publik. Industri substitusi impor yang cenderung memihak kepada masyarakat kota diganti dengan industri padat karya yang berbasis pada hasil pertanian. Oleh karena itu, strategi ke depan yang segera dipikirkan adalah mencari format keterpaduan pembangunan desa sebagai daerah yang berbasis agraris dengan menjadikan kota sebagai daerah yang berbasis pada *agriculture*. Dengan demikian produk-produk dari pedesaan mudah dipasarkan di kota, di samping mengubah proyek industri yang berorientasi padat modal menjadi industri padat karya yang berbasis pada hasil pertanian. Lebih dari itu, pembangunan pedesaan juga harus diwujudkan untuk memperkuat posisi kota supaya fungsi kota sebagai penampung surplus tenaga kerja pedesaan, pemasaran produksi pertanian dan sumber pemasok (*supply input*) kebutuhan pertanian menjadi lebih efektif (Tajuddin Nur Efendi; 1995: 168).

Konkretnya, agenda pembangunan yang sangat mendesak adalah mengupayakan suatu program *recovery* bagi bangsa Indonesia yang benar-benar dapat menciptakan formula keseimbangan antara pusat dan daerah atau antara kota-desa, sehingga tidak lagi terjadi kesenjangan sosial di masyarakat, yaitu kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan daerah (lokal) dan *grassroots*. Pola pengambilan keputusan bersifat *bottom up*; berawal dari inisiatif dan prakarsa masyarakat bawah yang bersentuhan langsung dengan proses pembangunan.

Pendekatan pembangunan dengan berbasis pada kekuatan masyarakat adalah pendekatan yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga menjadi sebuah kewajaran jika sampai saat ini masih dalam proses diskursus. Para praktisi yang menjadi pelaksana pembangunan dan para ahli yang melakukan kajian sedang melakukan berbagai penyesuaian agar mekanisme pembangunan yang semula berbasis pada pendekatan pertumbuhan dapat mencerminkan bentuk kegiatan pembangunan yang berbasis pada pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan

Salah satu komponen penting dalam proses pembangunan masyarakat adalah adanya inisiatif dan kreativitas serta swadaya masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk merumuskan dan menentukan masa depan kehidupannya. Ini menjadi penting, karena akibat dari pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan telah menciptakan masyarakat yang tidak mandiri. Masyarakat terbiasa menunggu perintah dari atas, sehingga daya kreatif mereka menjadi tumpul. Ditambah lagi dengan trauma sosial akibat perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang berbeda pendapat atau berbeda cara dengan pemerintah (penguasa) atau kelompok dominan. Penguasa atau kelompok dominan ini mengakibatkan kekuatan (*power*) masyarakat menjadi

lemah bahkan menjadi hilang. Oleh karena itu untuk mengelola masyarakat yang mempunyai power kecil menjadi saling setara maka perlu diketahui mekanisme penggunaan *power* di dalam masyarakat agar pemberdayaan (*empowerment*) itu menjadi efektif dan efisien.

Untuk memahami bentuk penggunaan *power* dalam kehidupan sosial, Jim Ife (1995: 56-59) menulis tentang bentuk-bentuk kegiatan/aktivitas kekuasaan dalam beberapa perspektif. *Pertama* adalah perspektif pluralis. Perspektif ini memandang *power* adalah alat yang digunakan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk saling berkompetisi. Dalam kompetisi, akan selalu ada dua pihak yang saling berhadapan, akibatnya akan muncul siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah. Kelompok atau individu yang kalah akan terpaksa mengikuti kemauan kelompok yang menang, tanpa harus menanyakan kemanfaatan maupun keuntungan dari keikutsertaannya dalam kelompok yang menang. *Kedua* adalah perspektif elite. Dari sudut pandang elite, *power* atau kekuasaan ini sebenarnya tidak berada dalam kelompok masyarakat, akan tetapi berada dalam kekuasaan para elite. *Power* ini akan digunakan untuk mempengaruhi mekanisme kerja sebuah kelompok, dan selanjutnya akan mempengaruhi kelompok yang lain hingga membentuk kelompok yang lebih besar misalnya negara. Menurut pandangan elite, *power* bukan untuk mendominasi, akan tetapi lebih bersifat mempengaruhi, sehingga kelompok lain akan mengikuti apa yang dimau elite. Mempengaruhi dalam perspektif ini mengindikasikan proses dominasi *power* tidak dapat dilakukan secara total. *Ketiga* adalah perspektif strukturalis. Strukturalis memandang *power* atau kekuasaan membentuk struktur masyarakat, membentuk kelas-kelas saling mendominasi satu di antara yang lain. Istilah dominasi dan penindasan menjadi kosa kata yang sering digunakan dalam perspektif ini. *Keempat* adalah perspektif *Post-strukturalis*. Dari sudut pandang ini, *power* dilihat sebagai sebuah wacana yang dikembangkan dengan menggunakan definisi dan kosa kata yang mempengaruhi pemahaman manusia sehingga menginternal ke dalam diri manusia sebagai sebuah pengalaman yang subyektif. Wacana ini membentuk perilaku tertentu yang sebenarnya tidak ada.

Bertolak dari gambaran tersebut, sebenarnya seluruh perspektif di atas (*Pluralis, Elite, Strukturalis, Post-Strukturalis*) tetap menunjukkan bahwa *power* yang berlaku di dalam masyarakat akan memunculkan kelompok masyarakat dengan klasifikasi kelompok yang mempunyai kekuasaan (*power-full*), sehingga dapat mendominasi dan mempengaruhi kelompok yang lain, yaitu kelompok orang-orang yang tidak beruntung atau kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan (*power-less*).

Berdasarkan perspektif *power*, Jim Ife (1995: 56) menyebut *empowerment* sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan *power* masyarakat yang kurang beruntung. Oleh sebab itu pemberdayaan dapat dimaknai sebagai usaha pengembangan, kemandirian, keswadayaan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan. Disamping itu pemberdayaan dapat bermakna melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun eksploitasi atas yang lemah.

Penjelasan lain dikemukakan oleh Gajanayake (1993:6) yang menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah konsep di atas partisipasi. Hal ini berimplikasi pada kegiatan memampukan masyarakat untuk memahami realitas pada lingkungannya, melakukan refleksi pada faktor-faktor yang menentukan lingkungannya dan meletakkan langkah-langkah untuk merubah efek dengan merubah situasi. Untuk itu, yang paling penting dalam pemberdayaan adalah upaya membantu orang untuk membebaskan dirinya secara mental maupun fisik.

Menurut Merriam Webster dalam Oxford English Dictionary kata "*empower*" mengandung dua arti. Pertama adalah memberikan kekuasaan, dan kedua memberikan kemampuan (Priyono & Pranarko, 1996: 103). Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dengan demikian proses pemberdayaan, masyarakat harus mempunyai kekuatan posisi tawar menawar agar dapat menjadi pelaku aktif dalam proses pembangunan.

Bertolak dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian proses menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik pengetahuan, sikap perilaku sadar, dan kecakapan ketrampilan, menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar, dan kecakapan ketrampilan yang baik.

Makna memperoleh daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau mendapatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh, mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

Berkenaan dengan pemaknaan pemberdayaan masyarakat, maka inti pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*),

memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Winarni; 1998: 75-76 dalam Ambar Teguh Sulistiyani). Ini berarti bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemikiran ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada sama sekali masyarakat yang tidak memiliki daya, setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang masyarakat tidak menyadari, atau daya mereka belum diketahui. Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Konsep Pemberdayaan

Mendasarkan konsep Marxian, kerangka logis yang mengakibatkan terjadinya *power-less* dapat diuraikan sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi, (2) Pemusatan penguasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasa pinggiran, (3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi, (4) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi yang secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yang berdaya dan masyarakat tuna daya (Priyono & Pranarka, 1996: 1-4). Untuk membebaskan situasi dikuasai dan dikuasai ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan, kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budayanya.

Konsep pemberdayaan di bidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar di mana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah melalui kemudahan dalam pemilihan dan penguasaan faktor-faktor produksi, kemudahan dalam distribusi dan jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang memadai sehingga masyarakat memiliki potensi tawar yang sama dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan pemberdayaan di bidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil yang menyangkut pembebasan dan untuk memperoleh serta berbagi kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan dan penegakan nilai-nilai, ide-ide, gagasan, tata kelakuan dan norma-norma yang disepakati bersama (*social capital*) yang berdasarkan atas moral yang dilembagakan, dan mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial budaya serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberikan kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas (Moeljarto, 2000: 3).

Dari gambaran di atas, maka dalam membahas dan memahami konsep pemberdayaan harus ditentukan terlebih dahulu sikap bersama terhadap maksud dan arti kekuasaan, dan bagaimana membuat kekuasaan tersebut menjadi bagian serta fungsi dari aktualisasi dan koeksistensi manusia. Oleh karenanya maka konsep pemberdayaan itu merupakan bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi manusia, keluarga, masyarakat, dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial dan budaya. Maka dari itu konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budayanya.

Metode Pemberdayaan Masyarakat

Dari pengalaman empiris dan historis, masyarakat yang kehilangan daya tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, mereka perlu diberdayakan, karena mereka dalam keadaan terekploitasi dan terpinggirkan. Keadaan mereka masih mencerminkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam: keswadayaan, kemandirian, partisipasi, solidaritas sosial, ketrampilan, sikap kritis, wawasan transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidupnya. Hal ini sebagai akibat sempitnya ruang gerak yang diberikan pemerintah terhadap rakyat kecil dalam melakukan pembangunan.

Untuk membangun keberdayaan masyarakat yang lemah, (Kartasasmita dalam Priyono) dikemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: (1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi dasar untuk menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang adalah bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi. (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat. Untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki maka perlu diterapkan langkah nyata dengan menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, listrik) maupun sosial (pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat paling bawah. (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat (Priyono, 1996:105).

Ife (1995:9) menulis bahwa metode pemberdayaan tidak terlepas dari kondisi dan posisi power dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode yang dikembangkan akan didasarkan pada perspektif mengenai kekuasaan (*power*) yaitu: (1) perspektif pluralis, dengan perspektif ini mengisyaratkan pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pelajaran kepada individu-individu atau kelompok-kelompok tentang bagaimana mereka berkompetisi sesuai aturan, (2) Perspektif elite, yakni kegiatan pemberdayaan dilaksanakan dengan mengembangkan kerjasama dan memberikan pengaruh pada elite, membentuk aliansi dengan elite, melakukan perlawanan dan mencari untuk merubah elite, (3) menurut strukturalis, kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan liberalisasi, melakukan perubahan pada landasan

struktur, dan menolak adanya struktur yang tertindas, (4) menurut perspektif post-strukturalis yakni pemberdayaan dilakukan dengan melakukan perubahan wacana, mengembangkan pemahaman subyektif baru dan pendidikan kebebasan.

Keadaan tersebut melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan, yaitu: *Pertama*, merupakan suatu bentuk penghancuran kekuasaan atau *power to no body*. Ini didasari pada keyakinan bahwa kekuasaan telah mengasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan maka kekuasaan harus dihapuskan. *Kedua*, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to every body*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan yang terpusat menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh karena itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Dan *Ketiga*, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang moderat dari dua padangan sebelumnya. Pandangan ini merupakan antitesis dari pandangan *power to no body* dan pandangan *power to every body*. Menurut pandangan ini, *power to no body* adalah kemustahilan dan *power to every body* adalah *chaos* dan anarkhi. Oleh sebab itu menurut pandangan ini, yang paling realistis adalah *power to powerless* (Hotomo: 2000).

Metode ini akan dapat diterjemahkan dalam berbagai teknik dan strategi dengan prinsip-prinsip tertentu. Payne yang mengutip pendapat Roos (1990), bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan itu terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu (1) *Kontektualisme*, yakni kegiatan pemberdayaan harus difokuskan pada pemahaman individu/kelompok sendiri terhadap kesejahteraan dirinya. Walaupun pemahaman itu sudah diserahkan kepada individu/kelompok, namun pihak yang memberdayakan tetap mempunyai peluang untuk dialog sehingga individu/kelompok ini dapat memahami realitasnya sendiri. (2) *Empowerment*, yaitu proses dimana pemberdaya akan mendukung individu/kelompok untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan pemenuhan kebutuhannya. Pekerjaan ini dipusatkan untuk membantu individu/kelompok membuat keputusan tindakan yang perlu dilakukan. (3) adalah *collectivity* yaitu memfokuskan pada pengurangan perasaan terisolasi dan membuat hubungan-hubungan dengan individu/kelompok-kelompok yang lain (Payne, 1991:274).

Pengorganisasian Masyarakat

Untuk memberikan kekuatan bagi yang tidak berdaya diperlukan strategi dan pendekatan. Korten (dalam Prijono; 1996:99) mengemukakan bahwa aktivitas yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh NGO adalah:

1. *Relief and welfare*, yaitu pemberian bantuan dengan maksud segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat terjadi bencana alam atau

- musibah lainnya, misalnya kelaparan, banjir dan kebakaran, bantuan ini sifatnya darurat dan bersifat sementara.
2. *Small-scale reliant local development* atau disebut *community development* yang antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya kegiatan ini memberi perhatian pada pembangunan sumberdaya manusia, kemandirian, keswadayaan masyarakat, dengan tujuan memperbaiki taraf hidup.
 3. *Sustainable systems development*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan. Strategi ini mengharapkan perubahan pada tingkat regional dan nasional. Perhatian yang khusus pada penyusunan kebijakan ini berimplikasi pada bentuk kegiatan yang tidak secara langsung berada dan bersama masyarakat.
 4. *People Movement*, yaitu strategi pemberdayaan dengan jalan membantu masyarakat mengorganisasi diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memobilisasi sumberdaya yang ada pada mereka. Strategi ini dilengkapi dengan perangkat berupa tenaga lapangan yang akan bertindak sebagai fasilitator masyarakat.
 5. *Empowering People*. Yaitu strategi yang memperjuangkan ruang gerak yang lebih besar bagi masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka (Korten dalam Priyono; 1996:99).

Pendapat Korten tentang identifikasi dan pengelompokan model strategi tersebut di dalam kenyataannya strategi ini tidak digunakan secara terpisah, akan tetapi akan diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diberdayakan.

Pendekatan utama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Menurut Kartasmita (1996; 28-29) pendekatan pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: (1) Upaya itu harus terarah, (2) Program harus langsung mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran, (3) menggunakan pendekatan kelompok

Dari pendapat tersebut, pemberdayaan harus secara langsung ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu program tersebut harus berada dan secara langsung melibatkan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mengukur keberhasilan serta manfaat yang dapat diperoleh. Untuk mengantisipasi kesulitan di dalam proses pemecahan masalah, maka program pemberdayaan harus menggunakan pendekatan pendampingan kelompok atau melakukan pengorganisasian masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat sebagai suatu pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pendamping untuk membantu kelompok masyarakat agar dapat membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut yang pada akhirnya masyarakat dapat mencapai kemandirian.

Proses pemberdayaan melalui pengorganisasian masyarakat itu secara umum merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran dan membangun masyarakat untuk percaya diri menyelesaikan dan mengatasi permasalahan hidupnya. Tilakaratna (1998: 57) menuliskan berdasarkan pengalamannya, bahwa proses pendampingan untuk membangkitkan sikap dan sifat kemandirian ada tiga hal pokok yang perlu dilaksanakan oleh seorang pendamping atau pengorganisasi masyarakat yaitu: animasi, fasilitasi, dan penghapusan diri.

Animasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang melakukan refleksi secara kritis pada realita sosial melalui penyelidikan diri dan analisa yang memungkinkan mereka menerima kemungkinan perubahan dengan tindakan kolektif. Refleksi ini dimaksudkan untuk memperkokoh dasar pengetahuan masyarakat sendiri, dengan menyusun pengalaman-pengalaman untuk memperoleh elemen-elemen yang dapat hidup dalam tradisi historis dan kebudayaan mereka, memperkokoh martabat dan kekuasaan mereka dan pihak lain menyampaikan pengetahuan baru.

Fasilitasi. Pada proses ini, pengorganisasi masyarakat/pendamping akan membantu masyarakat mendapatkan ketrampilan praktis. Intervensi dengan ketrampilan baru sangat diperlukan karena akan membantu masyarakat mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang perlu diperhatikan dalam intervensi ketrampilan ini adalah mengupayakan pengembangan sistem yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Penghapusan Diri. Penghapusan diri adalah bentuk penarikan pengaruh pengorganisasi masyarakat/pendamping dari aktivitas masyarakat. Proses ini akan menandai apakah pengorganisasi masyarakat/pendamping yang telah dilakukan tersebut berhasil atau tidak.

Serupa dengan proses yang dikembangkan Tilakaratna, Mayo dalam Adi (2001: 68-70), mencatat bahwa proses pemberdayaan biasanya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjalin kontak dengan individu, kelompok ataupun organisasi,
2. Mengembangkan profil komunitas, menilai kebutuhan dan sumberdaya masyarakat,
3. mengembangkan analisis strategis, merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang,
4. memfasilitasi kelompok-kelompok sasaran,
5. Bekerja secara produktif dalam mengatasi konflik, baik konflik antar kelompok ataupun organisasi,
6. Melakukan kolaborasi dan negosiasi dengan berbagai lembaga dan profesi,
7. Menghubungkan isu yang ada secara efektif dengan pembuatan keputusan dan implementasinya, termasuk menjalin relasi dengan politisi di tingkat lokal,
8. Berkomunikasi dengan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan berbagai individu, kelompok dan organisasi,
9. Bekerjasama dengan individu dalam komunitas, termasuk melakukan konsultasi bilamana perlu,

10. Mengelola sumberdaya yang ada, termasuk waktu dan dana,
11. Mendukung kelompok dan organisasi guna mencapai sumberdaya yang dibutuhkan,
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan program atau kegiatan, terutama pemanfaatan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien,
13. Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi strategi yang serupa.

Berbagai uraian tentang proses yang perlu dilaksanakan untuk melakukan pemberdayaan, terdapat konsistensi umum, kegiatan tersebut harus dimulai dengan pemahaman terhadap permasalahan yang dilakukan oleh pemberdaya atau pengorganisasi masyarakat bersama kelompok masyarakat yang akan diberdayakan. Selanjutnya merumuskan rencana secara bersama-sama untuk mengembangkan sumber-sumber pendukung sesuai dengan kemampuan masing-masing, melaksanakan kegiatan dan terakhir adalah proses pemandirian kelompok masyarakat yang diberdayakan. Proses pemandirian ini dimaksudkan agar kelompok masyarakat yang diberdayakan mampu meneruskan dan jika memungkinkan mengembangkan sendiri upaya-upaya yang pernah dilakukan bersama.

Namun demikian yang banyak terjadi warga masyarakat itu belum mengenali hak dan kewajibannya, banyak di antara mereka pasrah pada nasib, kebisuan dan ketakutan menyatakan pendapat, dan yang lebih merepotkan masyarakat sering berada dalam kondisi terkotak-kotak dan belum bersatu dan melembaga. Menyadari hal ini pengorganisasian masyarakat menekankan salah satu kegiatannya pada usaha penumbuhan dan penyadaran masyarakat melalui pembentukan kelompok maupun organisasi masyarakat.

Penyiapan masyarakat untuk membentuk kelompok dapat dilakukan secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan reformatif, seperti kelompok petani, peternak, permuda, kesejahteraan lingkungan, perkoperasian dan sebagainya. Kelompok-kelompok yang ada tersebut menjadi basis utama penyadaran hak dan kewajiban. Penyadaran dilakukan melalui setiap pertemuan kelompok dan antar kelompok sehingga benar-benar memahami bahwa masalah yang sedang dihadapi bukan lagi hanya masalahnya satu kelompok saja, tetapi merupakan masalah bersama yang harus diatasi bersama.

Peranan analisis struktural memiliki arti penting dalam pengorganisasian masyarakat, karena analisis struktural dapat mengupas masalah-masalah ketidakadilan struktural sampai ke akar-akarnya. Dengan cara sederhana kelompok diajak berpikir kritis, didorong untuk mampu membuat analisis sederhana yang berkaitan dengan kehidupannya dan permasalahannya sendiri. Prakarsa masyarakat untuk membangun dan menikmati hasil pembangunan ditumbuhkan untuk menanamkan kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijamin undang-undang.

Dalam pengorganisasian masyarakat, hubungan antara organiser dan yang dilayani atau dampingannya digambarkan sebagai hubungan dua orang dewasa, duduk sama rendah berdiri sama tinggi, tidak ada hubungan subyek obyek, masing masing pihak menyadari memiliki kelemahan dan kelebihan dan saling melengkapi.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengorganisasian masyarakat dapat dilakukan dengan:

1. Menumbuhkan prakarsa masyarakat baik dalam membangun maupun dalam menikmati hasil pembangunan (mendorong masyarakat menjadi subyek pembangunan),
2. Memanfaatkan analisis struktural untuk membuka belenggu ketidakadilan struktural sebagai penyebab kemiskinan dan penderitaan,
3. Menumbuhkan dan membangun kesadaran masyarakat agar mampu menjadi subyek bagi diri sendiri melalui penumbuhan organisasi masyarakat sebagai proses pembelajaran,
4. Memanfaatkan setiap aksi atau kegiatan dalam rangka membuka kesadaran masyarakat untuk mampu melihat ketidakadilan dan sebagai proses pendidikan penyadaran,
5. Melakukan perjuangan keadilan struktural untuk kesejahteraan bersama. Hal ini sering menimbulkan konflik kepentingan antara kekuatan masyarakat dengan yang berkuasa. Konflik dianggap positif sebagai sarana proses penyadaran, selama konflik tersebut selalu disadari bukan sebagai tujuan,
6. Memanfaatkan pelayanan karikatif dalam bobot ringan sebagai pintu masuk pembentukan organisasi masyarakat,
7. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat yang akhirnya tumbuh prakarsa baru untuk merubah nasib dan menentukan masa depan mereka sendiri.

Dari langkah-langkah tindakan tersebut, maka pengorganisasian masyarakat itu merupakan tindakan-tindakan dan hasil dari banyak aksi yg telah dilakukan oleh warga masyarakat secara bersama-sama. Secara bertahap warga masyarakat itu telah melakukan aksi/kegiatan/gerakan dengan membentuk organisasi mereka sendiri, dengan memilih pemimpinnya sendiri, merancang aksi-aksi kegiatan ke depan secara mandiri dan berkelanjutan.

Suatu pengorganisasian masyarakat dapat dikatakan berhasil jika warga masyarakat sadar bergabung dalam organisasi tingkat lokal yang mereka miliki. Dengan bergabungnya warga masyarakat dalam organisasi akan terwujud struktur internal yang dapat berfungsi untuk membantu warga masyarakat lainnya untuk berpartisipasi serta mengawasi jalannya organisasi.

Dengan keberadaan partisipasi warga yang berlangsung secara terus menerus akan berpengaruh pada dinamika warga dan kemampuan organisasi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Melalui wadah organisasi, warga masyarakat secara berkesinambungan senantiasa merancang agenda aksi dan melakukan aksi. Ini semuanya merupakan darah bagi kehidupan sebuah organisasi yang ditandai warga masyarakat bersungguh-sungguh menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dengan berlandaskan pada kemampuannya melalui wadah organisasinya.

Organisasi diharapkan senantiasa mampu memilih taktik yang efektif sehingga memiliki ketegasan yang jelas walaupun senantiasa hadir pertentangan. Dalam hal seperti ini organisasi harus senantiasa mampu memberikan gambaran tentang potensi yang dimilikinya sebagai kekuatan dalam menyelesaikan masalah. Demikian pula dalam organisasi senantiasa akan muncul kepemimpinan baru. Pemimpin dan warga masyarakat berpikir dan bertindak secara kompak dan terakhir ditandai bahwa sumber dana sebagai pendukung gerakan harus bisa digalang dari warga masyarakat sendiri

Referensi

- Adi, Isbandi Rukminto. (2000). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas, Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia Jakarta.
- Affandi, Nur Achmad (2001), *Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Makalah Seminar di UKRIM, Yogyakarta, 29/5/2001.
- Billah, M.M., pengantar; Nashihin Hasan, ed., (1998), *Ikhtiar Penanggulangan Krisis Masyarakat NU*, Jakarta: LAKPESDAM NU.
- Buletin NU Internet, Edisi No.4/II, Mei 2001.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1995, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gajanayake, Stanley. & Gajanayake, Jaya (1993). *Community Empowerment*, USA: Northern Illinois University.
- Hotomo, Mardi Yatmo, (2000, 6 Maret). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Makalah bahasan disampaikan pada seminar sehari pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan Bappenas. Jakarta.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman Australia Pty. Ltd.
- Kartasmita, Ginanjar (1996). *Pemberdayaan Masyarakat :Konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta. Bappenas.
- Majalah Balairung, Edisi No. 33/Th. XV/2001.
- Payne, Malcom (1991) *Modern Social Work Theory*. London: Macmillan Press LTD.
- Priyono, Onny S. dan Pranarka. A.M.W. (1996), *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Rapley, John. (1996). *Understanding Development, Theory And Practice In Third World*. London: Linne Rienner Publisher.
- Revrison Baswir dkk. (1999), *Pembangunan Tanpa Perasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistiyani, Ambar Teguh, (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Sunardi, ST, (1996), *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1995) *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- (1996), *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bab 2

Membangun Etika Kepedulian Menuju Masyarakat Berkualitas

MC. Ruswahyuningsih

Dalam era reformasi, masyarakat Indonesia menginginkan terwujudnya suatu masyarakat baru yakni masyarakat yang terbuka, maju, dan modern. Pengaruh kekuatan global dunia juga berdampak pada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Munculnya proses demokrasi melahirkan kesadaran yang semakin meningkat terhadap hak-hak asasi manusia dalam membangun masyarakatnya sendiri. Masyarakat menginginkan suatu masyarakat terbuka maju dan modern, bukan masyarakat totaliter yang menginjak- injak hak asasi manusia. Keinginan masyarakat membentuk demokrasi partisipatoris yaitu yang meminta rakyat yang berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri.

Adanya kemajuan teknologi komunikasi menciptakan hubungan yang luas antar manusia sehingga melahirkan hubungan yang tanpa batas. Masyarakat terbuka (*open society*) lahir sebagai hasil teknologi yang sangat pesat. Dampak positif yang ditimbulkan bukan berarti tanpa adanya bahaya-bahaya yang dapat muncul dalam masyarakat. Keadaan ini tentunya memerlukan manusia yang tidak terlempar dari akar kebudayaannya. Manusia harus tetap berada dalam kehidupannya yang nyata, di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai kebudayaannya sendiri. Dengan kata lain, manusia di dalam kehidupan modern perlu mempunyai identitas diri yang kuat (H.A.R.Tilaar, 2004).

Perubahan zaman akan selalu menimbulkan perubahan tuntutan pada anggota masyarakat, berarti akan merubah peran orang per orang yang hidup dalam perubahan tersebut. Dengan demikian setiap orang dituntut agar mengerti, memahami dan selanjutnya menyelaraskan kehidupannya dengan situasi, tuntutan dan irama kehidupan disekitarnya. Dalam kemajuan zaman yang serba cepat ini, kita dituntut berbuat dan bertindak cepat agar senantiasa mampu menempatkan diri secara tepat. Berbagai kemajuan dan perubahan telah terjadi memaksa seseorang mengubah perasaan, pikiran dan tindakan agar selaras dengan tindakannya.

Agar menjadi bangsa yang mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia, maka bangsa Indonesia melakukan pembangunan nasional. Konsep “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” dan “pembangunan manusia seluruhnya” memmanifestasikan komitmen pada “*people centered development*”

Pembangunan yang berorientasi pada manusia, bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti respect, identitas, otentitas, kemandirian, kebebasan, harga diri dan sebagainya (Moeljarto Tjokrowinoto,

1999). Pembangunan nasional yang dilakukan merupakan upaya terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Melalui pemberdayaan masyarakat yang merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal dilakukan untuk tercapainya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan terwujudlah masyarakat yang berkualitas yang mampu menghadapi era globalisasi

Kondisi Sosial Masyarakat

Melihat fenomena sosial yang ada kini, kita melihat kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Banyak terjadi kondisi patologis dimasyarakat, penyimpangan-penyimpangan norma sosial, norma agama, norma hukum yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok Kasus perkelahian mahasiswa antar jurusan, perkelahian antar warga kampung, antar agama dan suku, bahkan terjadi juga pada anggota legislatif, mencerminkan perilaku yang memalukan bagi suatu masyarakat maju dan berbudaya. Koentjaraningrat menyatakan sebagai budaya keablasan.

Rasa kepedulian untuk hidup berdampingan bersama dengan saling menghormati dan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada, sudah menghilang. Maka akibat yang ditimbulkan adalah perpecahan ditubuh masyarakat, dan terganggunya rasa aman dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan yang lebih parah adanya perseteruan antar agama, antar suku, antar ras yang semakin tajam, semua ini semakin memperburuk kondisi bangsa ini. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kondisi seperti itu tentu saja sangat merugikan citra kita dimata dunia.

Tumbuh suburnya budaya kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul, serta tidak mau menerima dan memahami kondisi, kemampuan serta pendapat yang berbeda, dengan memperlihatkan kekuatan fisik dan kekuasaan merupakan suatu tindakan arogan, yang kini terjadi disemua bidang kehidupan kita. Ini semua bukanlah merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan azas musyawarah dan mufakat sebagai dasar hidup, serta nilai kebersamaan hidup untuk menegakkan demokratisasi yang didambakan.

Melemahnya mental spiritual terjadi juga dalam masyarakat Indonesia, terlihat dengan terjadinya kasus bunuh diri, kasus narkoba, korupsi, kolusi. Tindakan ini adalah bentuk perilaku sebagai wujud kebingungan dan keputusasaan dalam menghadapi hidup yang semakin kompleks, sehingga mencari jalan pintas untuk mengakhiri problem tersebut. Kondisi psikologis yang terusik, menyebabkan ketegangan jiwa yang menimbulkan kegelisahan-kegelisahan dalam hidup serta mengganggu rasa amannya karena tidak siap menghadapi suatu perubahan yang tiba-tiba. Rasa tidak mampu menerima kegagalan, atau kurang terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikisnya menyebabkan dilakukannya tindakan-tindakan patologis tersebut.

Fakta baru pun memperlihatkan betapa ketidakadilan bagi rakyat kecil telah terjadi dengan kenaikan dan kelangkaan BBM, sehingga kesulitan hidup semakin membelit rakyat, sedang dilain sisi para oknum pemerintah sebagai

pengelola tega menggelapkan hak rakyat. Rasa tidak peduli dengan nasib orang lain (masyarakat kecil) membuat hubungan antara komponen masyarakat menjadi buruk. Jelaslah bahwa krisis ekonomi, sosial-budaya, politik dan krisis moral telah merebak masuk dalam masyarakat Indonesia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

Kondisi-kondisi buruk inilah yang menjadi hambatan dalam pembangunan menuju masyarakat madani dan menjadi bangsa yang bermartabat untuk hidup bersama sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Timbul pertanyaan, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia akan dapat meminimalisasikan kondisi-kondisi yang menjadi kendala ataupun hambatan bagi gerak aktualisasi eksistensi dirinya? Tentunya dengan menyadari bahwa perubahan sosial yang kita alami dapat diantisipasi dengan baik, maka akan terasa bahwa kehidupan lebih menggairahkan dan mengandung tantangan kemajuan, tetapi apabila kita terpaku pada konsep lama dalam menghadapi situasi baru maka kehidupan akan terasa penuh tekanan dan menyesak (Rob. Singgih, WS, 1994).

Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan psikologi mengandung makna saling menghormati dan menghargai, bukan saja dalam hal yang dilakukan masing masing, tetapi juga sebagai insan manusia (Onny S.Prijono, 1996). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemberdayaan dilakukan pada semua aspek kehidupannya, sehingga pemberdayaan psikologi hanya merupakan salah satu dari pemberdayaan di antara pemberdayaan sosial-budaya, ekonomi, politik. Tetapi pada dasarnya pemberdayaan tersebut satu dengan lainnya pasti ada keterkaitannya. Mengingat pelaku, sasaran dan tujuan dalam pembangunan adalah masyarakat, maka aspek psikologis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sebagai manusia tentunya tidak dapat diabaikan.

Perasaan saling menghormati dan saling menghargai merupakan kebutuhan psikhis manusia. Kita belajar dari Abraham Maslow mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia, bahwa kebutuhan-kebutuhan itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Ia menggambarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai piramida terbalik. Kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan dasar, dan diikuti kebutuhan rasa aman, kebutuhan ketergolongan dan cinta, kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Pendapat Maslow diperkuat oleh Bagus Takwin, yang menyatakan bahwa ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka ada kebutuhan-kebutuhan psikologis dan sosial mengaktualisasi semua potensi yang harus dipenuhi, termasuk mengaktualisasi potensinya sebagai *being-beyond-the world* (ada-melampaui-dunia)..

Perumusan konsep hak asasi manusia tak dapat dilepaskan dari konsep manusia dan kebutuhannya. Hak menjadi jelas dan masuk akal jika dan hanya sesuai dengan kebutuhannya. Hak asasi semestinya menjadi penjamin dari keleluasaan manusia untuk mengembangkan dirinya melampaui dunia (Bagus Takwin, 2005). Hal ini memperjelas pentingnya hubungan manusia dengan manusia lainnya, bahwa keterlibatannya dengan orang lain merupakan suatu kebutuhan. Semakin ia berpartisipasi dengan manusia lain semakin banyak potensi yang ia kenali. Semakin luas dunia yang dikenalnya maka semakin

banyak pula aspek dan dimensi yang dapat ia gali dan kembangkan. Dengan interaksi dan keterlibatannya itu, akan membuat ia menjadi peduli pada dunia dan orang-orang disekitarnya. Disadari atau tidak disadari kepedulian terhadap dunia dan orang lain akan menjadi bagian dari kepribadiannya. Perasaan ingin berbuat dan berguna bagi dunia dan orang lain menjadi dasar pembentukan dan perkembangan dirinya. Tentu saja sebagai makhluk sosial, keberadaan orang lain tak mungkin dihindari dan ia dikenai keharusan dan kewajiban sosial, tanpa kehilangan hak sebagai makhluk individu

Masyarakat Indonesia mempunyai salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat Indonesia ialah kebhinnekaan dari bangsa Indonesia. Cita-cita reformasi yang diinginkan mengakui adanya kebhinnekaan sebagai modal bangsa dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang menghargai akan perbedaan sebagai kekuatan bangsa dan identitas bangsa Indonesia, yang secara kultural sangat kaya dan bervariasi (H.A.R. Tilaar, 2005).

Dalam kehidupan sosial di zaman modern ini telah terjadi perubahan sosial yang ditandai dengan corak pergulan kehidupan yang berubah pula. Corak pergaulan hidup kelompok yang ditandai dengan kebersamaan dan tolong menolong, mulai bergeser ke arah kehidupan individual yang banyak diwujudkan dengan cara memperhatikan kepentingan diri sebagai tindakan utama, dan mengusahakan kemenangan pribadi dalam persaingan dengan orang lain. Perhatian terhadap kehidupan bersama atau kelompok terabaikan. Maka lahirlah primodial baru dalam kehidupan. Kalau dulu orang mengembangkan prinsip merugi untuk kepentingan orang lain, kini prinsip tersebut dirasa sudah tidak cocok lagi. Karena bagaimanapun keseimbangan antara pengorbanan dan perolehannya sebagai perwujudan dari pada pola kerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi umum ini sering justru digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka sehingga seakan kehidupan individual semakin marak di masyarakat.

Dewasa ini kita tidak dapat lagi bersandar pada tradisi, yang dulu kita banggakan sebagai institusi yang menjadi permersatu, perekat, dan pengikat kita bersama-sama. Dengan timbulnya budaya individual maka "nilai tukar sosial" memudar dan bahkan sudah tidak lagi digunakan dalam kehidupan masyarakat kita. "Nilai tukar sosial" tampak berubah menjadi "nilai tukar ekonomi" yang sangat merugikan dalam hubungan sosial kekerabatan masyarakat itu sendiri. Hubungan antar individu, dan kelompok dilakukan semata untuk pemenuhan kebutuhan fisik atau material saja, sehingga hubungan sosial yang dapat memperkaya kehidupan psikis perlahan-lahan mengalami kemunduran dan menghilang. Untung dan rugi dalam hubungan antar individu manusia atau kelompok menjadi pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan badan semata bukan kebutuhan jiwa yang sehat dalam hakekat hidupnya sebagai manusia. Bentuk egoisme dan hedonisme dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesenangan pribadi dan kelompoknya sendiri, sehingga pamer kekuasaan dan kekayaan adalah hal yang layak dilakukan dengan menutup mata dengan keberadaan dan keberbedaan orang lain disekitarnya.

Rasa kepedulian (*caring*) dan rasa saling memiliki (*sense of belongingness*) yang sangat dibutuhkan sebagai pengikat kehidupan bermasyarakat kini menjadi kendor. Kurang adanya kesadaran mengenai betapa

pentingnya hubungan sosial bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat di tempat dia berada. Ada perkembangan diri yang hanya dapat diperolehnya apabila ia melakukan hubungan sosial dengan “baik” dan sebaliknya hubungan baik itupun akan berdampak positif juga bagi dinamika kelompoknya (masyarakatnya).

Faktor rasa bukanlah terbatas pada aspek emosi semata, tetapi juga menyangkut aspek pikiran, bahkan sampai pada aspek perilaku. Menurut pakar psikologi sosial Bonner, hubungan sosial atau interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok menuju ke arah yang konstruktif, perubahan menuju kearah yang lebih positif, lebih maju (Gerungan, 2004). Tentunya pandangan ini terkait dengan perkembangan kepribadian individu manusia maupun kelompok (masyarakat).

Banyak aspek psikis yang terbentuk didalam hubungan sosial individu manusia. Pembentukan *super ego* (nurani) menurut Sigmund Freud, pembentukan *self concept* (konsep diri) menurut C.H.Colley dan William James, *self esteem* (harga diri) dan aspek kepribadian lainnya, hanya akan didapat melalui interaksi sosial. Kepribadian yang kuat akan membuat individu manusia mampu menghadapi tantangan dan tuntutan baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun tuntutan dari luar dirinya. Tentunya untuk mendapat kemampuan tersebut dibutuhkan penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang dilakukan bukan sekedar penyesuaian diri sebagai suatu bentuk adaptasi diri yang terlihat secara indrawi saja, tetapi didalamnya juga terkandung proses mental.

Dalam pandangan psikologi yang dimaksud penyesuaian diri adalah proses mental dan tingkah laku yang mampu memecahkan problem mengatasi tuntutan dan hambatan baik dari dalam maupun luar dirinya. Apabila kita melakukan penyesuaian diri yang baik maka akan terwujud dalam bentuk “tingkah laku asertif”, berarti kita melakukan tindakan sesuai dengan harapan dan keinginan kita sendiri. Ada sikap yang sesuai dengan perbuatan atau tingkah laku, bukan sesuatu yang bersifat kepura-puraan atau semu belaka, ada kejujuran dalam tingkah laku asertif.

Dalam suatu interaksi sosial kondisi kepura-puraan tidak dapat dibiarkan saja, kondisi psikologis seperti ini sangat tidak mendukung dinamika kehidupan kelompok (masyarakat). Tanpa disadari kekuatan-kekuatan yang bersumber pada masyarakat melemah, potensi-potensi baik pada individu sebagai anggota kelompok maupun pada kelompok itu sendiri menjadi tidak optimal, karena kebersamaan yang dijalin hanya semu belaka. Akibatnya perasaan saling membutuhkan, saling memiliki tidak tumbuh, sehingga tidak mustahil rasa kepedulian terhadap sesama pun tidak ada lagi. Kalaupun ada, tentu kepedulian yang semu pula yang terbentuk, tanpa disertai tanggung jawab sosial.

Di masa kini dalam masyarakat modern, orang mempunyai banyak kegiatan yang harus dilakukan sesuai tuntutan zaman. Kondisi super-sibuk menjadi alam kehidupan manusia modern ini, demi tujuan tidak ketinggalan zaman Hal ini memacu mereka bekerja keras dalam perannya masing-masing.dengan alasan menambah nilai dalam hidupnya. Akibatnya mereka kehabisan waktu untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, baik dengan tetangga maupun masyarakat luas, bahkan mungkin dengan keluarganya sendiri.

Kehidupan sosial tidak lagi dalam wujud ikatan emosional, tetapi menjadi hubungan fungsional yang melihat pada ikatan diri dengan orang lain dalam hubungan kerja semata. Gambaran-gambaran ini merupakan keadaan riil terjadinya perubahan di kehidupan masyarakat kita, dan apabila kita cermati berkaitan dengan perubahan psikologis baik secara individual maupun pada kelompok masyarakat .

Dimensi kesetiakawanan lahir sebagai wujud keprihatinan akan mudarnya rasa kebersamaan dan kepedulian dalam masyarakat. Dimensi kesetiakawanan nasional membawa kita untuk lebih mampu memahami berbagai macam perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita yang plural dan majemuk.

Pengembangan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan “*human centered development*” menjangkau dimensi yang lebih luas, bukan sekedar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia menekankan pentingnya “pemberdayaan” (*empowerment*) manusia, kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Proses ini menumbuhkan *conscientization* manusia, kesadaran akan kedirian (*self hood*), dan memungkinkan manusia secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupi eksistensinya. “*Conscientization*” memberi kemampuan menjadi subyek yang ikut membentuk proses sejarah, berpartisipasi dalam proses transformasi masyarakat, dan mempunyai kesadaran bahwa masyarakat tempat mereka hidup bukan struktur statis, tata yang tertutup, suatu *given reality* yang menutup diri dan harus mereka terima saja. Manusia harus mempunyai kemampuan kritis melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sistem yang ada dengan mencari alternatif-alternatif pemecahan. Harus dilakukan *valuative discourse* dengan dirinya, *dialogical encounter* dengan sesama dalam proses transformasi sosial, dan menemukan *frontiers* baru (Moeljarto Tjokrowinoto, 1999).

Etika Kepedulian

Etika merupakan sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang sangat fundamental; bagaimana orang harus hidup dan bertindak? Etika membantu kita semua mencari orientasi-orientasi yang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling fundamental (Frans Magnis Soeseno, 1987).

Lebih lanjut Frans Magnis Suseno menegaskan, tujuan etika ialah agar kita tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap pelbagai fihak yang mau menetapkan bagaimana kita harus hidup, melainkan agar kita dapat mengerti sendiri mengapa kita harus bersikap, begini atau begitu. Etika mau membantu, agar kita lebih mampu mempertanggung-jawabkan kehidupan kita. Sedangkan menurut Foucault (dalam Charles E. Scott, 1990), “etika” harus dimengerti sebagai kualitas personal yang diungkapkan lewat tingkah laku dan sikap seseorang.

Kata kunci untuk etika adalah kewajiban, kebajikan dan tanggung jawab. Ini adalah suatu pilihan bebas, suatu cara berpikir dan berasa; suatu cara bertindak dan bertingkah laku yang kelihatan bagi orang lain. Ini dapat

diungkapkan melalui cara berpakaian, cara berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Moralitas justru harus didasarkan pada tanggung jawab etis. Dalam artian ini keduanya tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu etika harus dimengerti – ini penting dalam pemikiran Foucault – sebagai organ nilai-nilai lewat mana suatu kebudayaan dapat dipahami dan menginterpretasikan dirinya dalam hubungan dengan hal yang dianggap baik dan jahat. Dalam artian ini etika tidak dapat secara tajam dibedakan dari moral karena etika selalu memiliki referensinya pada prinsip-prinsip tertentu demi tingkah laku (*kondite*) dan *value judgment* (Konrad Kebung, 2002).

Berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat, kepercayaan (*trust*) menjadi modal sosial (Ancok, 1999: 200). Kepercayaan menjadi pengikat antar anggota masyarakat yang bekerja sama membangun sebuah masyarakat unggul. Pendapat Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) mendefinisikan *Trust* sebagai berikut: "Harapan yang timbul dalam sebuah masyarakat yang teratur, jujur, dan kooperatif didasarkan pada norma yang dianut bersama oleh anggota keluarga komunitas" (Ancok, 2004).

Menyimak pendapat kedua pakar itu, kiranya *trust* yang kuat akan terbangun apabila didahului dengan "kepedulian". Dengan adanya rasa peduli yang tidak semu dan dilakukan dengan jujur akan menjadikan *trust* sebagai modal sosial yang efektif. Rasa saling percaya tidak mungkin ada dan terbentuk tanpa menumbuhkan rasa peduli terlebih dulu. Solidaritas yang kuat terbentuk apabila diawali dengan menumbuhkan rasa saling peduli dan memupuk rasa saling percaya. Selama ini, sangat jarang para pakar ilmu sosial menulis dan mengangkat atau mengkaji rasa kepedulian dalam karya-karyanya. Dampak adanya ketidakpedulian atau keprihatinan dengan tidak tumbuhnya rasa peduli pada kehidupan masyarakat sekarang ini, menjadi ancaman kehidupan psikologis masyarakat sebagai manusia yang "sehat". Jika tidak diantisipasi, lahirlah budaya "cuek", atau "budaya pura-pura" yang dapat mencetak manusia-manusia munafik. Kondisi sosial masyarakat yang demikian, jelas tidak sesuai dengan harapan kita untuk menjadi manusia seutuhnya.

Mungkin kita dapat mencermati pendapat Onni Priyono dan A.M.W. Pranarka (1996) yang menyatakan ketidakberdayaan dapat pula terjadi akibat kondisi dan disposisi subyektif, maka dalam ketidakberdayaan dapat pula terjadi sebagai akibat dari struktur sosial, dari hubungan manusia satu dengan yang lain, dari sisi masyarakat, dari situasi kerja, dari kondisi ekonomi, pendidikan, sosial-budaya. Disamping yang selalu menjadi perhatian kondisi dan struktur kekuasaan yang tergelar dalam tata politik dan pemerintahan.

Jelaslah apabila di dalam masyarakat sudah tidak tumbuh lagi rasa kebersamaan, dan rasa peduli terhadap kehidupannya sendiri dan lingkungan sosialnya, maka masyarakat itu mengalami ketidakberdayaan (*powerless*). Lebih lanjut mungkin rasanya perlu kita membangun etika kepedulian, untuk menuju masyarakat yang berkualitas, yang mempunyai berkepribadian kuat, sehingga berani mengambil keputusan dalam menentukan sikap hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab, sehingga tidak mudah terombang-ambing dengan arus globalisasi.

Etika kepedulian adalah memahami cara berada yang berbeda (Gadis Arivia, 2005). Pendapat ini tentu mengandung makna yang dalam apabila kita dapat memahaminya. Memahami masyarakat haruslah memahami konsep manusia dalam arti sebenarnya. Lebih-lebih bagi bangsa kita yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, dan agama (ke-bhinneka-an) dan diikat oleh rasa kesatuan. Masyarakat Indonesia rasanya perlu senantiasa membangun etika kepedulian untuk tetap mampu membangun persatuan dan kesatuan bangsanya yang dilambangkan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bila hal ini tidak dilakukan, niscaya disintegrasi bangsa akan terjadi dan ini akan membuat kita semakin terpuruk dimata dunia.

Karakteristik Masyarakat yang Berkualitas

Pada dasarnya suatu masyarakat adalah sebuah kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama yang harus dicapai melalui pengorganisasian anggotanya melalui sebuah infrastruktur organisasi. Kemampuan organisasi untuk meningkatkan kualitas masyarakat menuntut kejelasan konsep bagaimana organisasi harus dibangun. Suatu masyarakat yang berkualitas mempunyai ciri, dan ciri itu merupakan roh kehidupan suatu masyarakat (Djamaludin Ancok, 2004). Dengan menggunakan konsep Kanter, 1977, Ancok berpendapat bahwa masyarakat yang berkualitas harus memiliki ciri sebagai berikut:

a. Konsep

Konsep adalah sebuah gagasan yang dihasilkan dari pengelolaan kumpulan pengetahuan dan wawasan yang dijadikan dasar untuk menghasilkan sebuah inovasi. Bangsa yang dapat menciptakan dan mengelola pengetahuan akan mempunyai peluang yang besar untuk berinovasi dan menjadi bangsa yang unggul di antara bangsa lainnya. Konsep yang kita peroleh dari Ki Hadjar Dewantoro ditahun 1939 terkenal dengan konsep “ Tiga N “. Menurut pandangan beliau bahwa suatu bangsa yang unggul harus mengembangkan kebiasaan “Tiga N” yaitu *Niteni*, *Niroke*, *Nambahi*. *Niteni* adalah kebiasaan untuk selalu melihat apa yang dilakukan pihak lain dalam hal yang baik- baik. Ini berarti setiap manusia harus belajar dengan melihat pada sesuatu, atau bangsa lain. Setelah seseorang memperoleh pengetahuan dari orang lain yang memiliki keunggulan, kemudian dilanjutkan dengan kebiasaan melakukan N yang kedua, yaitu *Niroke*.

Niroke adalah semangat untuk meniru keunggulan orang lain atau bangsa lain. Tetapi kebiasaan meniru ini tidak cukup membuat seseorang unggul, hanya menjadi seorang pengikut saja dan tidak pernah menjadi orang terdepan yang melebihi orang lain. Karena itu, perlu dilakukan N yang ketiga, yaitu *Nambahi*.

Nambahi adalah semangat untuk terus berinovasi. anpa inovasi kehidupan akan berhenti. Keunggulan inovatif harus dibangun oleh sebuah masyarakat bila dia ingin di barisan terdepan (Hartanto, 2002 dalam Ancok, 2004).

Menurut Hartanto (2002),apa yang dikukan Ki Hadjar Dewantoro adalah konsep “*benchmarking*“. Konsep “*benchmarking*“ sebagai salah satu strategi untuk mengejar keunggulan, baru marak diperbincangkan oleh pakar diluar negeri pada tahun 1990 (lihat Bendell, Boulter & Kelly, 1993). Selain itu, apa yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantoro adalah konsep belajar terus

menerus (*life long learning*). Konsep ini yang menjadi dasar berkembangnya konsep organisasi pembelajar (*learning organization*). Konsep organisasi pembelajar ini begitu marak dibahas diluar negeri pada saat Peter Senge mempublikasikan karyanya yang berjudul *The Fifth Discipline* pada tahun 1990.

Usaha membangun kemampuan menciptakan konsep itu, suatu masyarakat harus membangun kebiasaan dan kemampuan belajar bersama terus menerus. Karena itu, warga suatu masyarakat harus menjadi komunitas pembelajar (*learning community*). Dalam komunitas pembelajar, semua warga mengembangkan diri menjadi orang yang rajin belajar terhadap hal-hal yang baru dan saling berbagi wawasan tentang hal-hal baru itu. Kumpulan pengetahuan yang bersumber dari pengetahuan warga komunitas akan menjadi modal intelektual suatu bangsa. Modal intelektual yang besar ini (dalam wujud makin banyaknya pengetahuan baru) akan menimbulkan kemungkinan besar suatu masyarakat menghasilkan berbagai inovasi, baik dalam produk inovasi yang bersifat fisik (barang dan jasa) maupun inovasi sosial (pendekatan baru dalam mengelola kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik) (Djamaludin Ancok, 2004).

Tentunya masih banyak konsep yang lain yang dapat digunakan bagi kemajuan masyarakat kita, konsep yang senantiasa memberdayakan masyarakat Indonesia Diharapkan akan muncul konsep-konsep baru yang inovatif, yang terlahir dari buah pikiran anak bangsa kita sendiri.

b. Kompetensi

Sebuah konsep tentang sesuatu, baru akan menjadi produk atau jasa bila konsep tersebut diterjemahkan secara operasional dalam suatu langkah nyata. Untuk menterjemahkan konsep secara operasional diperlukan adanya kompetensi. Karena itu, suatu masyarakat yang berkualitas harus mengembangkan kompetensinya untuk merealisasikan sebuah konsep, kalau itu tidak dilakukan, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang banyak bicara konsep yang muluk-muluk yang tidak pernah menjadi kenyataan.

Seperti contohnya, konsep kepemimpinan yang transformasional yang dijabarkan oleh Bass (1998) merupakan konsep tentang kepemimpinan versi Ki Hadjar Dewantoro. Pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang melakukan "*ing madya mangun karsa*" dan "*tut wuri handayani*". Pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang memberdayakan pengikutnya. Untuk memberdayakan pengikutnya maka sang pengikutnya harus dikembangkan tingkat kedewasaannya dalam bersikap dan bekerja (Hendroyuwono, 2002 dalam Djamaludin Ancok, 2004).

c. Koneksi

Banyak pakar yang berpendapat bahwa sukses hidup dalam bermasyarakat ditentukan oleh kemampuan membangun koneksi (Hesselbein, Goldsmith, Beckhard & Schubert, 1998 dalam Ancok, 2004). Kekayaan sebuah organisasi yang berupa pengetahuan akan tumbuh dan berkembang melalui kegiatan berbagi wawasan (*knowledge sharing*) antar sesama komponen organisasi, baik antar pekerja sebuah organisasi, maupun koneksi dengan

pelanggan dan mitra bisnis lainnya (Cohen & Prusak, 2001 dalam Djamiludin Ancok 2004).

Agar suatu produk atau jasa (*service*) dapat menghasilkan nilai (*create value*) maka warga suatu bangsa harus menciptakan jaringan kerja (koneksi) yang baik dengan pihak lain (Djamiludin Ancok, 2004).

Kemampuan membuka jaringan sosial (*net work*) merupakan suatu kecakapan yang harus kita miliki agar dapat mengembangkan diri seluas-luasnya. Kita harus dapat memperlihatkan kemampuan dan kejelian menangkap peluang yang ada untuk membangun diri. Dengan melakukan kemampuan membuka jaringan sosial, berarti mampu mengembangkan kecerdasan emosional (*EQ*) yang kita miliki. Pendidikan tinggi yang didapat dari pendidikan formal saja belum tentu mencerminkan kecerdasan secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa orang dengan gelar yang dimilikinya tetapi tidak mampu bersosialisasi (bermasyarakat) dengan baik, bahkan dapat pula melakukan tindakan yang tidak bermoral. Kecerdasan *EQ* hanya dapat dikembangkan apabila mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan nyata (bermakna juga bagi orang lain).

d. Kredibilitas

Kredibilitas terkait dengan kejujuran dalam berinteraksi dengan pihak lain. Tidak ada orang yang mau membangun hubungan sosial yang bertahan lama dengan pihak lain yang biasa melanggar etika hubungan sosial.

Etika harus didasari oleh kejujuran. Hubungan sosial yang berlangsung lama adalah hubungan sosial yang didasari oleh kejujuran. Tentu saja kredibilitas tidak hanya semata-mata kejujuran, tetapi juga konsistensi dalam perlakuan, perlakuan yang adil (*fairness*), saling memberi dan menerima (*reciprocity*). Etika adalah pegangan bersama yang menjadi rambu-rambu dalam interaksi antar manusia. Sukses tidaknya sebuah interaksi sangat tergantung pada pelaku yang terlibat dalam interaksi, apakah berpegang pada rambu-rambu tersebut? (Velasques, 2002 dalam Djamiludin Ancok 2004).

Kredibilitas adalah faktor yang menentukan, apakah *trust* (saling percaya) antar sesama warga komunitas dapat tumbuh dan berkembang? Kemunduran dan kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kredibilitas para pemimpinnya (Kouzes & Posner, 2003). Demikian pula dengan kemajuan dan kemunduran sebuah masyarakat, atau negara sangat ditentukan oleh kredibilitas para pemimpinnya (Djamiludin Ancok, 2004).

e. Kepedulian

Kepedulian (*caring*) adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Kepedulian ini dinyatakan pada kepedulian atas sesama. Kepedulian si kaya kepada si miskin, kepedulian mereka yang memiliki kesempatan kekuasaan atas mereka yang tidak memilikinya, kepedulian pada kelestarian lingkungan, dan kepedulian pada aturan norma hidup bermasyarakat (*ethics*). Tujuan membangun sebuah komunitas (termasuk negara) adalah usaha mensejahterakan setiap anggota komunitas tersebut. Sifat peduli diwujudkan dengan pemberian perhatian pada sesama warga komunitas.

Program sosial yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat seperti program pengembangan masyarakat (*community development*) yang disponsori oleh kalangan industri adalah contoh dari rasa kepedulian ini. Selain itu, membangun instusi bisnis yang berdasar etika bisnis salah satu wujud kepedulian. Kepedulian para pengusaha menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Kritik tajam pada sistem kapitalis yang tidak memiliki kepedulian, dengan gamblang telah disampaikan oleh banyak pakar. Sistem kapitalis telah membuat orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin, disertai membuat kerusakan lingkungan yang sangat besar. Adalah tidak adil kalau pihak korporasi menjadi kaya raya dengan melakukan kerusakan lingkungan dan pemiskinan pada masyarakat (Djamaludin Ancok, 2003).

Koneksi, kredibilitas, kepedulian sangat erat hubungannya dengan pembentukan modal sosial. Ketiganya adalah pendukung terbentuknya modal sosial (*social capital*). Semua ini akan menumbuhkan *trust* yang menjadi perekat hubungan antar manusia.

Penutup

Kajian tentang karakteristik masyarakat yang berkualitas untuk pembangunan dalam era globalisasi mengandung satu anggapan bahwa manusia adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan dalam usaha mencapai tujuan pembangunan.

Proses pembangunan yang telah cukup lama berjalan, seiring dengan kemajuan teknologi dan proses globalisasi masyarakat dunia, ternyata membawa masalah- masalah kemanusiaan yang akhirnya menghambat bahkan kontradiktif dengan upaya pengembangan karakteristik masyarakat Indonesia yang berkualitas.

Dalam tulisan ini, dikemukakan bahwa manusia Indonesia (masyarakat) dalam rangka globalisasi ternyata mengalami perubahan peta kognitif, pengembangan dan kemajemukan kebutuhan, serta pergeseran prioritas dalam tata nilainya. Hal ini tampil dalam tingkah laku yang instrumental, egosentris, jalan pintas, etos kerja yang melemah, kurang peka terhadap masalah-masalah yang tidak menyangkut kepentingannya (tidak peduli) dan sebagainya. Sementara itu, manusia Indonesia yang tangguh, dalam rangka menghadapi era globalisasi diharapkan menampilkan tingkah laku yang diwarnai oleh etos kerja yang tinggi, prestatif, relegius, peka terhadap lingkungan, inovatif dan mandiri (Imam Santoso Sukardi, 1993).

Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat ini, merupakan tantangan bagi kita semua untuk membangun masyarakat yang mempunyai karakter yang berkualitas, sehingga mampu menyesuaikan diri terhadap tarikan dan pengaruh globalisasi masyarakat dunia.

Masyarakat yang berkualitas akan terwujud apabila didalam masyarakat terjalin suasana kebersamaan yang mengakui keberbedaan tanpa takut kehilangan hak-haknya, dan tetap sadar akan kewajiban sosial yang harus dilakukannya. Untuk memperjuangkan agar kebutuhan bertemu dengan hak dalam tantangan yang sangat kompleks ini, orang kiranya perlu meninggalkan "ke-kami-annya" atau "ke-aku-annya", menuju kepada "ke-kita-an". Singkatnya,

masyarakat harus beranjak dari “Kami ke Kita“. Tak mungkinlah masalah disekitar kebutuhan dan hak, dalam aspek sosial, ekonomi dan kultural, jika kita mengurung diri dalam keeksklusifan (Sindhunata, 2005).

Referensi

- Ancok, Djamaludin. (2003), *Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 3 Mei 2003.
- Ancok, Djamaludin. (2004), *Psikologi Terapan, Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia*, Penerbit Darussalam, Yogyakarta.
- Arivia, Gadis. (2005), “Etika Kepedulian”, *Basis*, No. 05-06 tahun ke-54, Mei-Juni.
- Kebung, Konrad (2002), “Kembalinya Moral Melalui Seks”, *Basis*, No.01-02 Tahun ke-51.
- Priyono, Onny. S. dan A.M.W. Pranarka (eds.), (1996), *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Singgih, Rob. (1994), *Keluarga, Peran dan Tanggung Jawabnya di Zaman Modern, Kenangan Pameran Buku Nasional*, Yogyakarta: IKAPI DIY.
- Sindhunata, (2005), “Di Awan-Awan Hak Asasi”, *Basis* No.05-06, Tahun ke-54, Mei-Juni.
- Sukardi, Imam Santoso. (1993), “Era Globalisasi Dunia Dan Karakteristik Manusia Indonesia Yang Tangguh”, *Jurnal Psikologi dan Masyarakat*.
- Suseno, Frans Magnis. (1989), *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Takwin, Bagus. (2005), *Hak Asasi: Penjamin Keleluasaan Manusia Melampaui Dunia*, *Basis* no.05-06, tahun ke-54, hal.40, 2005, Yogyakarta.
- Tilaar H,A.R., (2000), *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1999), *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bab 3

Pemberdayaan Perempuan: Kesiapan Dan Tantangan Sebuah Renungan

Rr. Leslie Retno Angeningsih

Tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh penjuru dunia, perempuan diketahui sebagai kelompok yang kalah atau harus selalu mengalah terhadap laki-laki. Fakta sosial hingga kajian agama cenderung mendukung sistem tersebut yang dikenal dengan paternalistik yaitu suatu sistem atau prinsip-prinsip pemerintahan atau penguasaan suatu negara, kelompok-kelompok pekerja atau kelompok lainnya berdasar pengelolaan hubungan seperti ayah dan anak (Webster, 1991).

Menurut kepercayaan, perempuan adalah makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka sewajarnya bila perempuan adalah makhluk yang harus tunduk dan taqluk dibawah naungan laki-laki. Sedang dari kenyataan sosial menunjukkan bahwa laki-laki atau suami adalah sebagai pencari nafkah keluarga (*bread-winners*) dan perempuan hanya dikenal sebagai pengelola rumahtangga (*domestic-jobs*) (Doyal, 1990).

Meski perempuan hanya dikenal sebagai pengelola rumahtangga namun pada umumnya mereka harus bekerja jauh lebih lama dan keras serta lebih berhati-hati dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dituntut untuk tampil prima dalam berbagai aspek kehidupan keluarga misalnya perempuan harus dapat menjadi isteri, pendamping, teman yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak-anak mereka. Perempuan memikul tanggungjawab yang besar dalam memelihara anak-anak dan kelangsungan hidup rumah tangga mereka sebab bila tidak, apabila ada ketidakberesan dalam kehidupan keluarga, perempuanlah sebagai orang pertama yang menjadi tumpuan kesalahan atau kambing hitam dari kegagalan tersebut. Hingga berabad-abad lamanya, perlakuan seperti itu tidak menimbulkan banyak pertanyaan dan masalah karena hal tersebut diterima sebagai suatu kewajaran.

Permasalahan baru muncul, setelah perlakuan terhadap perempuan dirasakan menimbulkan tekanan demi tekanan, kekerasan, dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk kehidupan seperti marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, dan diskriminasi. Satu contoh klasik betapa beratnya beban dan ketidakadilan yang dialami perempuan dikemukakan oleh the United Nations Commission on the Status of Women (1980) yaitu perempuan mewakili 60% dari jumlah penduduk dunia dan mereka menunjukkan hampir 2/3 dari jumlah seluruh jam kerja yang ada namun demikian mereka hanya menerima 1/10 dari pendapatan dunia dan memiliki kurang dari 1% kekayaan dunia.

Disamping itu UNESCO menunjukkan bahwa kemiskinan di dunia ini bercirikan perempuan. Hal tersebut terbukti dari 1.3 milyar orang yang hidup miskin di dunia ini 70%-nya adalah kaum perempuan. Ditambah lagi perempuan yang hidup miskin tersebut acapkali diingkari haknya untuk mendapatkan

kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hampir dua-pertiga dari seluruh jumlah penduduk perempuan di dunia ini masih buta huruf. Ditambah juga dengan diketemukannya banyak kasus dimana keluarga yang mempunyai anak perempuan kebanyakan hanya akan menyekolahkan anaknya setelah mereka menyekolahkan anak laki-laknya terlebih dahulu. Dibeberapa tempat bahkan ditemui perempuan tidak diperkenankan mengenyam pendidikan karena adat-istiadat atau tradisi mereka tidak mengizinkan anak perempuan bersekolah (EmpoweringWomen, 2005).

Di sektor ekonomi sering juga terdengar bahwa perempuan itu dinyatakan sebagai kelompok yang paling tidak memberi nilai ekonomis. Sekalipun kenyataan yang ada menunjukkan sebaliknya seperti di Afrika misalnya, perempuan menghasilkan hampir 80% dari kebutuhan makan keluarga sedangkan di Asia-Selatan perempuan menghasilkan lebih dari 50% dan di Amerika Latin lebih dari 40%. Sekalipun demikian perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak adil dalam memperoleh kredit atau pelayanan-pelayanan keuangan lainnya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarganya (Empowering Women, 2005).

Perlakuan tidak adil dalam perkawinan sering dialami perempuan yang hidupnya tergantung sepenuhnya pada laki-laki. Banyak perempuan yang menderita tekanan bathin lantaran mereka harus menerima kenyataan untuk bersedia dimadu atau terpaksa menyetujui suaminya berpoligami. Perempuan juga kerap kali mendapat perlakuan kejam lainnya seperti perkosaan, penjualan perempuan, penganiayaan bahkan pembunuhan.

Melihat banyaknya ketidakadilan yang dialami perempuan, bermunculanlah gagasan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak asasi kaum perempuan. Di negara-negara maju kita kenal adanya pergerakan-pergerakan perempuan seperti: Women Movements, Feminists, maupun Women Empowerment. Pergerakan perempuan tersebut ada yang bersifat liberal maupun yang radikal (Renzetti and Curran, 1992).

Pergerakan yang bersifat liberal bertujuan mencapai kesamaan dalam memperoleh kesempatan. Menurut paham liberal tekanan terhadap perempuan disebabkan karena ketidakadilan dalam cara memperoleh hak-hak sipil dan sumber-sumber maupun imbalan-imbalan dari lembaga-lembaga sosial tertentu, seperti pendidikan dan pekerjaan. Tujuan pergerakan mereka adalah untuk mempersiapkan semua orang agar dapat memperoleh kesempatan mencapai keberhasilan tanpa menghiraukan jenis kelamin ataupun karakteristik-karakteristik sosial lainnya. Sedangkan yang bersifat radikal mereka melihat bahwa tekanan-tekanan dan ketidakadilan yang dialami perempuan sebenarnya berakar dari adanya hubungan tradisional yang bercirikan heteroseksual. Kaum radikal berpendapat bahwa pencapaian kesamaan hak hendaknya ditujukan pada lingkup umum (*public sphere*) dan lingkup pribadi (*private sphere*) yang mengandung *sexism* (jenis-kelamin) karena menurut mereka pemisahan kedua lingkup tersebut adalah merupakan tempat pergulatan yang bermuatan politis.

Di Indonesia muncul pula gerakan-gerakan dan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berjuang untuk menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak mereka dan membebaskannya dari belenggu kekuasaan laki-laki. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia telah diatur pula hak-hak perempuan

antara lain dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Selanjutnya pada Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 juga pada tahun 1995 terdapat Mission Statement Plan of Action yang ada dalam Jakarta Declaration for the Advancement of Women in Asia and the Pacific, yang semuanya bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi dan upaya untuk mencapai kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun demikian hingga saat ini kesamaan hak dan kebebasan kaum perempuan belum dirasakan memadai.

Lebih-lebih dalam era modernisasi dan globalisasi, Indonesia semakin merasakan pentingnya memberdayakan kaum perempuannya. Pemberdayaan perempuan yang dimaksudkan disini adalah mengembangkan inisiatif perempuan untuk dapat merubah struktur tradisional dan ideologi yang menekan perempuan dan bagaimana merubah pandangan perempuan dari kelompok marjinal ke kelompok mayoritas. Apa yang kita lakukan dalam hal ini adalah melihat berbagai cara bagaimana menanamkan kesadaran, pengetahuan, dan mendidik perempuan agar dapat memudahkan mereka untuk mencapai tujuannya. Sebab dengan mendidik perempuan itu berarti kita mendidik satu generasi (Saatchi & Saatchi, 1998). Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat merubah keluarga, masyarakat dan bahkan negara atau bangsa.

Dengan digalakkannya pemberdayaan perempuan disegala bidang maka terbersitlah sebuah pertanyaan sudah siapkah kita apabila pemberdayaan perempuan tersebut benar-benar terwujud atau sadarkah kita semua akan konsekuensi atau tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dari penyadaran perempuan akan hak-hak, kewajiban serta otoritas yang disandangnya. Hal tersebut bila benar-benar terlaksana akan merupakan suatu kekuatan maha besar yang tidak bisa kita bendung dan tarik mundur kembali. Jika demikian halnya bagaimanakah kita harus menyikapi semua perubahan itu dengan wawasan luas, penuh kesadaran dan kearifan.

Pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemberdayaan perempuan, terlebih dahulu kita akan mengupas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan ketidakadilan. Adanya pemberdayaan perempuan karena dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan ataupun ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di segala bidang kehidupan. Perempuan tidak mempunyai kebebasan mutlak berkarier atau berkarya seperti halnya laki-laki. Disamping peran ganda (multiple-roles) yang disandang perempuan yang mengakibatkan perempuan harus berpikir tiga kali bila mereka ingin mengejar karier atau mengembangkan diri, merekapun takut akan suara-suara sumbang yang diterima dari kalangannya. Seperti yang sering terjadi dimana masyarakat kita acapkali masih menatap sinis dan ganjil apabila melihat ada perempuan yang berambisi berkarier meninggalkan sang suami.

Dalam bukunya yang berjudul *The Velvet Glove Paternalism and Conflict in Gender, Class, and Race Relations*, Jackman (1994) mengatakan bahwa berbicara tentang ketidakadilan sebenarnya sama dengan berbicara tentang

ketidakmerataan atau ketidaksetaraan pembagian atau penguasaan atas sumber-sumber yang bersifat material, sosial, maupun politik yang sangat terbatas keberadaannya oleh sekelompok orang terhadap kelompok lain. Ada berbagai pendapat berkaitan dengan ketidakadilan tersebut. Sebagian pakar berpendapat bahwa ketidakadilan itu bersifat netral atau tidak memihak. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa ketidakadilan tersebut erat berkaitan dengan konflik. Sedang selebihnya berpendapat bahwa ketidakadilan itu berhubungan erat dengan konsensus atau kesepakatan.

Perdebatan diantara kubu konflik dengan kubu konsensus sudah terjadi cukup lama dan panjang. Bagi yang menekankan pandangan moral melihat ketidakadilan sosial itu bertentangan dengan kebebasan manusia dan ini menarik kubu konflik untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perpecahan, ketidakpuasan atau pemberontakan. Sedang bagi mereka yang melihat ketidakadilan adalah suatu kebutuhan bagi produktivitas dan pemenuhan hidup manusia berargumentasi bahwa ketidakadilan adalah suatu bentuk kehidupan sosial yang mapan dari konsensus atau kesepakatan yang terjadi secara spontan. Penganut paham keras secara implisit melihat konflik sebagai gejala dari hubungan yang bersifat pemerasan atau eksploitasi sedangkan konsensus sebagai wujud dari fungsi penyatuan atau integrasi.

Seperti yang kita ketahui bahwa manusia umumnya mempergunakan seluruh kemampuan yang ada untuk meningkatkan penguasaan mereka terhadap sumber-sumber yang bersifat materi, sosial, maupun politik. Mereka juga sangat peka mengamati semua sumber yang diharapkan oleh orang lain tetapi belum atau tidak mereka miliki. Sebagai manusia mereka tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada untuk menguasai sumber-sumber tersebut dan menghindari resiko yang harus atau akan mereka tanggung.

Pada waktu orang memberi suatu simbol yang sama dalam upaya memperoleh sumber-sumber yang ada, hal ini akan memunculkan pola-pola kehidupan dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk karena kesamaan-kesamaan tersebut. Bagi mereka yang beruntung dapat menguasai sumber-sumber pokok atau utama akan bergabung satu sama lain menjadi kelompok penguasa sedang yang tidak mendapatkan sumber-sumber tersebut menjadi kelompok yang dikuasai atau tergantung. Bagi kelompok yang beruntung mereka akan selalu meningkatkan dan meluaskan penguasaan mereka atas sumber-sumber yang ada sedangkan bagi kelompok yang kalah, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkannya dan mencegah penguasaan lebih lanjut semua sumber-sumber yang dirasa dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka oleh kelompok yang menang. Hal ini dapat diibaratkan seperti apa yang telah dilakukan oleh kaum laki-laki yang dianggap sebagai pemenang dalam masyarakat patriarkhat terhadap perempuan. Mereka dapat menguasai sumber-sumber yang ada dan meninggalkan kaum perempuan sebagai kelompok yang tergantung.

Selanjutnya manusia dikenal juga sebagai mahluk pemecah masalah yang praktis. Mereka tidak banyak meluangkan waktu dan energinya untuk memikirkan setiap persoalan yang datang dalam hidup mereka. Manusia tidak didorong untuk selalu memberikan pertimbangan pada setiap aspek kehidupan

mereka. Kebanyakan mereka hanya cenderung membentuk tanggapan-tanggapan terhadap aspek-aspek kehidupan yang kelihatannya sama berdasarkan kebiasaan (Downs, 1957). Berdasarkan hal itu, manusia umumnya tidak pernah menguji sendiri terlebih dahulu setiap cara mereka berperilaku. Sebaliknya mereka hanya cenderung menggantungkan pada cara-cara pemecahan yang diperoleh dari orang lain atau dari pengalaman-pengalaman pribadi mereka baik dari masa lalu atau masa sekarang untuk membuat penaksiran-penaksiran terhadap pola perilaku yang tidak banyak mengandung resiko. Tidak jarang manusia juga membuat kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena kurangnya informasi, kesalah-pengertian atas informasi yang mereka terima atau kesalahperhitungan akan akibat-akibat yang bakal terjadi. Namun demikian manusia umumnya akan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka sendiri seperti halnya belajar dari kesalahan-kesalahan oleh orang lain. Sama halnya dengan kaum perempuan maupun laki-laki, mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk memikirkan, menguji, dan mempertimbangkan kembali apakah semua perlakuan dan keadaan yang mereka alami dan lakukan selama ini bersumber dari ketidakadilan penguasaan atas sumber-sumber utama kehidupan yang ada.

Dalam upaya mengumpulkan informasi, orang juga membentuk kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan kemampuannya memperoleh sumber-sumber informasi dan waktu untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut (Downs, 1957). Dengan demikian orang akan mengambil informasi berdasarkan tingkat kepercayaan yang mereka miliki seperti informasi yang diperoleh dari ibu, ayah, kakak, adik, anak, teman, guru, kolega, keluarga besar, tetangga mereka atautkah dari surat-khabar, radio, buku, atau sumber-sumber lain yang datang kepadanya. Kemudian orang akan melakukan penyaringan terhadap semua pengalaman-pengalaman yang dimiliki dan informasi yang lengkap tentang syarat-syarat kehidupan dan ketidakpastian yang mereka jumpai setiap hari. Kesalahan adalah sangat mahal harganya karena itu upaya mendekati kepastian adalah dengan menyerahkan semuanya pada tekanan-tekanan yang memaksa mereka mengikuti langkah-langkah yang sedikitnya bisa untuk bertahan. Apa yang dilakukan oleh perempuan secara turun-temurun dan berdasarkan kebiasaan hanya diperoleh dari informasi dan keterangan serta pengalaman dari orang-orang yang dekat dengannya. Mereka akan bertindak serta berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat dan yang memberikan resiko terkecil bagi mereka.

Hubungan yang berdasarkan pada ketidakadilan biasanya ditandai oleh satu faktor pokok yaitu anggota-anggota dari kelompok penguasa mempunyai kepentingan untuk mempertahankan keberadaan hubungan yang membawa keuntungan bagi mereka. Secara mendasar berarti bahwa setiap anggota membutuhkan secara implisit pengetahuan dari hubungan yang ada diantara mereka. Tidak perlu bagi seseorang untuk memahami bagaimana segala sesuatunya bekerja, tidak juga perasaan pribadi apakah yang dapat diperhitungkan atau adakah rasa bersalah bagi keuntungan-keuntungan yang dinikmati seseorang yang berasal dari pemerasan. Walaupun sebenarnya sangatlah mudah untuk melihat keuntungan-keuntungan yang didapat oleh seseorang yang berasal dari hasil jerih-payah atau pengorbanan orang lain. Yang

menjadi pokok perdebatan dan analisa disini justeru adalah kekurangsadaran yang dimiliki oleh kelompok yang tergantung atas kondisi ini karena ciri-ciri dari penguasaan yang ada tidak kasat mata. Seperti halnya dengan kaum laki-laki yang dengan leluasa membangun serta mengembangkan pemilikan atas sumber-sumber yang ada dan membiarkan perempuannya terkurung di rumah mengerjakan segala tugas rumahtangga. Bermodalkan sumber-sumber yang diperolehnya mereka dapat menguasai perempuan sebagai kelompok tergantung. Andaikata, kerja perempuan dalam rumah tangga mau dihitung secara rasional dan berdasar keadilan sesuai dengan jam kerja seperti layaknya seorang baby-sister, sekretaris, juru-masak, penghibur dst, maka laki-laki tak akan mampu membayarnya dan hal ini tentunya akan mengurangi kewenangan dan otoritasnya terhadap perempuan.

Oleh karena itu kelompok penguasa akan terus berusaha untuk menanamkan satu pengertian yang bersifat subyektif dari pengalaman mereka dan berupaya untuk melindungi aturan-aturan yang dapat menjauhkan mereka dari kemungkinan adanya perlawanan dari kelompok tergantung. Dari upaya ini muncul suatu ideologi yang diterima secara umum berupa pemahaman dari kehidupan sosial yang tidak keras namun penuh dengan kepekarasaan dari sipengambil keuntungan. Hal ini diperuntukan guna mengambil alih perhatian kelompok yang tergantung. Individu-individu dari kelompok dominan secara pribadi tidak perlu menerangkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan keberadaan mereka sebab ideologi ini adalah milik kelompok. Dimana jaringan-jaringan komunikasi dari kehidupan sosial yang terorganisir akhirnya datang hanya dari ketulusan yang tidak dipikirkan. Ini berarti bahwa sedikitnya ideologi tersebut menghasilkan suatu pengertian dari pengaturan sosial yang nampaknya penting dan beralasan bagi pengambil keuntungan. Seberapa besar kelompok dominan dapat membujuk kelompok tergantung supaya jatuh pada cara berpikir mereka dan menerima tawaran arti daripada hubungan sosial mereka adalah suatu ukuran dari keberhasilan kelompok dominan dalam menguasai kelompok tergantung. Jadi keuntungan dari suatu hubungan ketidakadilan tidak harus hanya membuat masuk akal pengalaman mereka dalam suatu cara yang mana secara pribadi masuk akal dan memuaskan. Mereka juga membutuhkan untuk mengatur kelompok tergantung dalam cara berpikir yang sama. Kedua kebutuhan-kebutuhan ini membentuk suatu sumber tekanan yang tetap pada ideologi yang mendukung kelompok dominan.

Bentuk-bentuk dari ideologi dominan beragam sesuai dengan struktur dari hubungannya dengan kelompok tergantung dan kepentingan yang diciptakan oleh struktur tersebut. Kelompok dominan akan tetap mendorong upaya menyampaikan pesan secara implisit dari adanya pemerasan dan mencegah agar tidak terjadi pertentangan yang keras. Bagi mereka harga dari sebuah konflik adalah sangat menyakitkan. Oleh karena itu kelompok dominan cenderung memilih bentuk bujukan atau rayuan seperti yang ada dalam paham paternalistik.

Hubungan antara ayah dan anak yang bersifat tradisional dimana seorang ayah secara authoritative memerintahkan semua tingkah laku dan pengambilan keputusan yang penting bagi anak-anaknya. Semua dilakukan atas keyakinan baik ayah dan demi kepentingan serta kebaikan anak-anaknya. Pada gilirannya

anak-anak akan menerima secara implisit dan mutlak kewenangan ayah mereka. Sekalipun perjuangan untuk kebebasan anak-anak kadang-kadang tidak diharapkan atau tidak pernah diperbolehkan, namun anak-anak yang baik akan bertindak sesuai dengan dan hormat pada harapan-harapan ayah mereka.

Semua orang yakin bahwa ayah selalu mencintai anak-anak mereka. Jadi bila melihat hubungan antara ayah dan anak tersebut nampaknya tidak cocok kalau dianalogikan dengan hubungan kebersamaan dan ketidakadilan dengan perdebatan antara konflik versus konsensus sebab kasih sayang dan pemerasan adalah tidak sinkron atau sesuai. Dalam bukunya, Jackman berusaha memilahkan antara permusuhan dengan pembedaan (diskriminasi). Beliau berpendapat bahwa hanya dalam kasus yang terbatas saja mereka saling berhubungan. Kasih sayang jauh dari hubungan yang sifatnya pemerasan tepatnya bahwa kelompok dominan berharap untuk merasakan lebih jauh atau menghayati perasaan dari kelompok yang mereka peras. Pengetrapan pembedaan dalam kehidupan sehari-hari tidak memerlukan perasaan permusuhan dan tentunya itu tidaklah sulit bagi kelompok yang tergantung untuk mempunyai rasa cinta pada kelompok dominan apalagi hubungan yang telah terjalin sifatnya pasrah atau menyerah.

Paternalistik adalah suatu ideologi yang sangat kuat yang menawarkan sumber yang paling efisien dan memberi kepuasan untuk pengawasan sosial dari hubungan antara kelompok-kelompok yang tidak seimbang. Kejumbuhan muncul berkaitan dengan paternalistik yang dinyatakan sebagai kecenderungan berbuat baik (Genovese, 1974; Newby, 1977). Ayah dianggap mempunyai keinginan berbuat baik terhadap anak-anak mereka bahkan seandainya mereka melakukan kewenangan mutlak sekalipun terhadap anak-anak mereka.

Dalam bukunya Van De Veer (1986) tindakan-tindakan paternalistik dijelaskan sebagai tindakan-tindakan dalam mana seseorang "A" misalnya berhubungan dengan "S" dan ia mencampuri kehidupan "S" dan mempromosikan tindakannya demi untuk kebaikan "S" sendiri. Pada intinya pokok pemikiran paternalistik dibedakan oleh 2 ciri-ciri yaitu keinginan berbuat baik yang dilakukan tidak demi kepentingan sendiri dan suatu anggapan memiliki moral yang lebih baik yang memberi keleluasan untuk ikut campur.

Kembali pada masalah kewenangan seorang ayah terhadap anaknya. Penerapan kewenangan berbuat baik dari seorang ayah tentunya berdasarkan pada suatu pemikiran bahwa anak mereka belum matang atau tidak memiliki moral yang sama dengan ayah mereka. Disini dapat diperdebatkan bahwa penerapan kewenangan atas siapa yang kurang dewasa atau rendah moralnya dalam membuat keputusan yang paling bijaksana bagi diri mereka sendiri mungkin menjadi kepentingan terbaik bagi mereka yang memerlukan untuk mengatakan bahwa itu dilakukan dalam rangka memelihara mereka. Bagaimanapun juga disini perlu dipertanyakan kesahan dan kebenaran kedua penjelasan daripada orang-orang yang secara moral tidak mampu dan tentang seberapa besar campur tangan seseorang terhadap kehidupan orang lain itu dapat dibenarkan.

Ketika orang beranggapan mempunyai moral yang lebih baik daripada orang lain mereka kemudian mempunyai kewenangan penuh terhadap apa yang dipertimbangkan menjadi kepentingan yang terbaik daripada orang tersebut dan

pertimbangan itu menjadi pokok daripada keikutcampuran dalam hidup orang tersebut. Apakah perlindungan yang dilakukan oleh sistem demikian menyodorkan suatu penafsiran tidak berkepentingan yang sesungguhnya dari kepentingan terbaik seseorang? Demikian halnya juga apakah sistem paternalistik dapat menaksirkan kepentingan terbaik orang lain terpisah dari kepentingannya sendiri dan bebas dari pembatasan dari sudut pandang moralnya sendiri?

Perlu kita renungkan bahwa ketika seorang ayah menerapkan kewenangan paternalistik terhadap anak-anak mereka, itu tidak berarti bahwa ayah akan menyerahkan semua nilai-nilainya demi kepentingan yang terbaik dari anak-anak mereka. Sebab dibalik itu semua anak tanpa sadar telah berhutang suatu kewajiban untuk mendukung dan menyerahkan diri mereka pada keluarga. Kepentingan pribadi mereka ditentukan pada yang terbaik sebagai yang tidak dapat terpisahkan dari kepentingan keluarga dan ketika terjadi konflik kepentingan pribadi si anak dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat finansial, status ataupun politik daripada keluarga. Bagaimana seseorang dapat membedakan tindakan-tindakan yang benar-benar tulus untuk kepentingan orang lain atau yang bertujuan demi kebaikan, seperti misalnya ketika seorang mencampuri dengan keinginan baik atas nama seseorang yang kurang kedewasaannya atau secara moral tidak mampu. Tetapi isu-isu ini didramatisir ketika seseorang menganggap hebat kemampuan moralnya melebihi seseorang yang sama dengan orang tersebut apakah kedewasaan atau kemampuan phisiknya untuk berpikir dan mencari alasan. Tentu saja Van De Veer membantah bahwa tindakan-tindakan paternalistik yang bertujuan berbuat baik adalah tidak dibenarkan dalam kasus-kasus demikian ketika kita melihat dan memperlakukan kemampuan-kemampuan orang lain sebagai lebih rendah dari moral kita. Kita memuaskan kepekaan moral yang kita miliki sendiri dari pengorbanan kemerdekaan orang lain.

Kelompok dominan menciptakan suatu ideologi dimana mereka dapat menerangkan tindakan-tindakan mereka yang diskriminatif sebagai kecenderungan berbuat baik. Dengan cara ini, kelompok yang tergantung tidak akan meminta atau menuntut sesuatu kecuali mereka menjelaskannya sebagai suatu kebutuhan. Kelompok dominan telah meniru bentuk hubungan tradisional antara ayah dan anak dengan menyatakan mempunyai moral yang superior dan menjelaskan kebutuhan daripada kelompok tergantung. Mereka dapat merasakan senang dan puas karena telah berbuat baik dan tentunya juga karena dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Pencapaian tujuan tersebut harus bersandar pada bujukan daripada paksaan dan hanya dapat menjadi sungguh-sungguh efektif dalam hubungan kasih sayang yang saling menguntungkan diantara kelompok-kelompok yang ada. Dengan kasih sayang kelompok dominan mampu memerintah dan membentuk kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi dari kelompok tergantung yang menggambarkan pengaturan perbedaan diskriminasi sebagai demi kepentingan terbaik kelompok tergantung. Konflik benar-benar di jauhi dan dicegah oleh kelompok dominan. Ungkapan kasih sayang pada kelompok tergantung akan semakin memperkuat penguasaan kelompok dominan.

Seperti banyak dibicarakan orang tentang kebajikan dari apa yang dinamakan dengan “cinta.” Cinta dalam semua bentuk dihargai amat tinggi. Apakah itu dalam kaitan dengan hubungan antara orangtua dan anak, pasangan hidup, saudara sekandung, teman, kelompok-kelompok sosial, atau bangsa, kita setiap hari berusaha untuk mencintai. Kita semua tahu bahwa cinta itu buta, bahwa untuk mencintai adalah memberikan diri kita sendiri, merangkul orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri, membiarkan semuanya terbuka untuk seseorang, dan menjauhkan semua halangan-halangan yang ada.

Tetapi ada sesuatu yang hilang. Banyak suami-suami yang menyatakan cinta kepada isteri-isteri mereka memukuli mereka, dan sesudah mereka merengek-rengok menyatakan penyesalan dan maafnya, mereka mengulangi kembali memukuli isteri-isteri mereka. Banyak juga para ayah yang menyatakan cintanya kepada anak-anak mereka tetapi ayah itu juga memukuli dan bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kandung mereka sendiri. Nampaknya dalam hal ini cinta terlalu di besar-besarkan yang kelihatannya seperti menawarkan suatu perlindungan dalam hubungan antar manusia.

Perlu direnungkan apakah cinta itu benar-benar diberikan secara bebas atau ditawarkan berdasarkan persyaratan-persyaratan tertentu? Apakah cinta mendorong perasaan melindungi ataukah perasaan memiliki? Apakah cinta itu buta atau dengan hati-hati dibatasi? Apakah cinta membuat orang melakukan segala sesuatu untuk seseorang dan memberi kewenangan untuk melakukan segala sesuatu terhadap orang yang dicintai? Apakah kita memberi lebih terhadap seseorang yang kita cintai atau apakah kita menuntut lebih dari seseorang yang kita cintai? Apakah cinta merupakan sesuatu ketergantungan (Saya tidak dapat hidup tanpa dia) atau suatu perasaan yang tidak dapat dibagikan (Dia membutuhkanku)? Masalahnya adalah bahwa hampir semua dapat dilakukan dan telah dilakukan atas nama cinta.

Satu tujuan pencapaian cinta adalah melibatkan dalam kesulitan kelompok-kelompok yang dipengaruhi dengan suatu keterlibatan dan kerumitan ikatan perasaan. Bahwa ikatan perasaan tidak memecahkan faktor-faktor lain yang ada dalam hubungan itu. Tidak juga merubah kepribadian daripada orang-orang yang terlibat dan juga cara-cara sumber-sumber dibagikan diantara mereka. Jika seseorang yang terlibat mempunyai lebih sumber-sumber, cinta tidak merubahnya untuk memberi keuntungan yang lebih kepada pihak lain yang juga terlibat. Apakah cinta telah memperkenalkan ketidakadilan dalam hubungan dengan ikatan yang sulit diantara orang-orang yang terlibat. Dengan arti yang sangat manis, pelaku dengan sumber yang lebih dijamin kemudahan hak untuk menggunakannya pada pihak lain yang mana ia mungkin sebaliknya hanya mimpi. Kelompok-kelompok yang menguasai hubungan sosial berusaha mencegah permusuhan dari hubungan yang ada bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memperdalam dan memperkuat ketidakadilan itu sendiri.

Kembali kepada permasalahan pemberdayaan perempuan yang pada intinya adalah menyadarkan perempuan akan hak-haknya dan memberikan otoritas kepada mereka untuk melakukan menegajawantahkan hak-haknya, sehingga mereka bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk membantu kemajuan bangsa dan negara. Hal ini tentunya diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang masih belum tahu dan tidak mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan keadilan. Namun banyak pula perempuan-perempuan kita yang beruntung telah dapat memperoleh kesempatan baik mengenyam pendidikan tinggi, mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang bagus di bidang ekonomi bahkan mempunyai kedudukan tinggi atau kesempatan memperoleh kekuasaan.

Ada beberapa hal yang tidak kita sadari dengan semakin banyaknya perempuan yang ikut aktif bekerja, berkarya, dan mempunyai kedudukan, kita telah merasa bahwa keadilan telah terwujud. Namun sebetulnya perempuan menjadi semakin terbebani hidupnya, mereka harus mencari uang sekaligus juga tetap mempunyai tanggungjawab penuh mengelola pekerjaan rumah tangganya (double work load). Sedang laki-lakinya belum tersentuh samasekali bagaimana dengan pencapaian keseimbangan pembagian kerja rumah antara perempuan dan laki-laki (egalitarianism in the division of household labor) seperti yang dikenal dengan istilah “househusbandry” atau “househusband” untuk pencapaian suatu kesamaan misalnya (Pleck, 1983).

Disamping itu pemberdayaan perempuan seolah-olah berpersepsi bahwa semua perempuan mempunyai keinginan yang sama terhadap kesamaan hak. Kita terkadang menutup sebelah mata bahwa masih banyak perempuan kita yang ingin mengeksistensikan ketergantungannya pada laki-laki sebab tidak semua perempuan mampu mengekspresikan dan mempertahankan jati dirinya ditengah-tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi prestige “suami”. Kadang perempuan-perempuan inipun mencoba untuk tidak tampil “berhasil” karena akan menjadi “boomerang” bagi dirinya sendiri. Perempuan yang seharusnya bisa menjadi pelopor justru mengundurkan diri menjadi “submissive” (menyerah dan tunduk), karena bila tidak suaminya akan tak dihargai oleh masyarakat dan merekapun dianggap sebagai perempuan-perempuan yang tidak beruntung mendapatkan suami yang derajatnya lebih rendah dari mereka. Atau karena bujuk rayu laki-laki dengan kata “demi cinta” perempuan rela mengorbankan kesempatan mengembangkan dirinya sebab perempuan merasa menjadi satu-satunya makhluk yang paling dibutuhkan dan dihargai laki-laki dan itu tentunya bisa dibanggakan diantara kaumnya yang tidak beruntung (Lihatlah dia tidak bisa hidup tanpaku).

Sebetulnya kaum perempuan yang telah menikmati wujud dari pemberdayaan inilah yang diharapkan sebagai “agent of change” bagi masyarakat kita yang menganut paternalistik. Kepada merekalah upaya-upaya pencapaian kesamaan hak dan keadilan akan benar-benar bisa diwujudkan dengan baik bila sumber permasalahan pokok telah dipahami secara bijak baik oleh kaum perempuannya sendiri dan lebih-lebih kaum lelakinya untuk berani mawas diri.

Penutup

Dalam upaya mencapai kesamaan dan keadilan dalam segala bentuk kehidupan, perempuan memikul beban dan tanggungjawab yang cukup besar. Tidak saja mereka harus meningkatkan sumber daya manusianya tetapi mereka juga harus waspada terhadap segala faktor-faktor yang bisa menjadi penghambat tercapainya tujuan kesamaan hak. Sebab bagi kita semua amatlah mudah melihat setiap perilaku dan aspek-aspek kehidupan yang menimbulkan ketidakadilan yang nampak kasat mata dan dapat menimbulkan konflik serta pertentangan.

Namun perempuan harus lebih peka dalam menyaring hal-hal yang nampaknya menawarkan kebaikan kepada mereka tetapi justru menambah beban serta tanggungjawab yang lebih besar terhadap mereka. Perempuan selama ini seperti dibutakan oleh hal-hal yang dianggap wajar dan baik untuk mereka tetapi banyak dari mereka tidak atau kurang dihargai eksistensinya. Oleh karena itu segala program seharusnya juga perlu dipertimbangkan dan ditujukan kepada kaum laki-lakinya yang telah lama menikmati dominasi, penguasaan, dan hak-hak istimewa mereka atas perempuan. Penggalakan terhadap program yang membelajarkan betapa kurangnya pengorbanan laki-laki agar tercapai keseimbangan hubungan dengan perempuan dan keadilan masih jauh dari pemikiran kita. Penyadaran terhadap perempuan kita yang melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak telah berdampak pada memperkuat status quo laki-laki atas perempuan perlu pula kita simaki. Akhirnya perlunya kesamaan persepsi mengenai keadilan yang dihayati dengan kepala dingin adalah penting dalam mencapai tujuan.

Referensi

- Downs, Anthony. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. NY: Harper and Row.
- Doyal, L. (1990), "Hazards of Hearth and Home", *Women's Studies International Forum*, 13, 587-604.
- Empowering women. 2005. <http://results.org/website/article.asp?id.2458>
- Genovese, Eugene. D. 1974. *Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made*. New York: Random House.
- Jackman, Mary. R. 1994. *The Velvet Glove. Paternalism and Conflict in Gender, Class, and Race Relations*. Berkeley: University of California Press.
- Newby, Howard. 1977. Paternalism and Capitalism. In Richard Scase (Eds). *Industrial Society: Class, Cleavage and Control*. London: Allen and Unwin.
- Pleck, J.H. 1983. Husbands' Paid Work and Family Roles: Current Research Issues. In H. Lopata and J.H. Pleck. (Eds)(Pp. 130-171). *Research in the Interweave of Social Roles, Vol 3. Families and Jobs*. Greenwich, CT:JAI Press.
- Renzetti, C.M. and Curran, D.J. (1992). *Women, Men, and Society*. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Saatchi & Saatchi. 1998. State of the World Forum. Sunday November 1. <http://world.msn.com/previewx.aspx?q=women+empowering+article&FORM=CBPW&First=21&noredir=1>
- Van De Veer, Donald. 1986. *Paternalistic Intervention. The Moral Bounds of Benevolence*. Princeton: Princeton University Press.
- Webster's New World Dictionary of American English*. 1991. (3rd Eds). NY: Printice Hall.

Bab 4

Bina Keluarga Remaja dan Pemberdayaan Perempuan

Wiwiek Mariani Andarsih

Pemberdayaan menjadi sebuah panglima dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia di era reformasi dan globalisasi. Pemberdayaan bukan hal yang baru bagi dunia tetapi bagi tataran masyarakat Indonesia pemberdayaan boleh dikatakan sebuah trend. Sebab pemerintah menetapkan haluan dari pembangunan ke pemberdayaan dan bukankah pemberdayaan merupakan jalan pentahapan dari kolonialisme ke pembangunan serta pemberdayaan dan globalisasi.

Wacana ini menarik untuk dikaji dalam tataran pemberdayaan perempuan dan keluarga, guna menyumbangkan wacana dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera bagi stiap unit keluarga.

Sebagai preambul pembicaraan Bina Keluarga Remaja (BKR) kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, maka lebih tepat jika wacana ini dimulai dari bicara konsep dasar pemberdayaan. Dasar hukum pelaksanaan pemberdayaan di Indonesia terdiri dari tiga hal yaitu: 1). Ketetapan MPR-RI No: IV/MPR/1999 tentang GBHN, 2) UU No 25 Th 2000 tentang PROPERNAS, 3) UU No 22 Th 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Tiga pengertian pemberdayaan yang tertulis dibawah ini sebagai frame untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi pemberdayaan adalah: 1). Merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan yang baik yang menyangkut penentuan nasib diri sendiri/perubahan dirinya atas dasar kekuatan diri sendiri sebagai faktor penentu; 2). Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program pembangunan agar mencapai kemampuan yang diharapkan; 3) Memberi wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun dirinya dan lingkungannya secara mandiri.

Mengkaji dasar hukum pelaksanaan dan pengertian pemberdayaan di atas maka keluarga merupakan bagian masyarakat yang masuk dalam peta pemberdayaan. Oleh sebab itu agar di dalam setiap keluarga dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas setiap keluarga berhak memperoleh pelayanan pemberdayaan secara partisipatif, berkelanjutan dan mandiri. BKR merupakan upaya pemerintah dibawah tanggungjawab BKKBN menyelenggarakan pemberdayaan keluarga khususnya perempuan (ibu) dengan model pembinaan dan partisipasi kelompok.

Menurut BKKN (1998) BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua untuk meningkatkan membimbing/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bertaqwa, tangguh, maju dan mandiri. Tujuan BKR adalah meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab orang tua agar dapat

membimbing dan membina ketahanan fisik dan non fisik anak dan remaja melalui komunikasi dan interaksi yang sehat dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Berpijak pada penjelasan di atas maka penulis mencoba menengok dan mendiskripsikan pelaksanaan program BKR dengan pemberdayaan perempuan dari berbagai aspek.

Trend Remaja Masa Kini

Jumlah anak dan remaja Indonesia pada tahun 2004 sekitar 22 juta orang atau 32% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar ini yang akan menentukan keberadaan Indonesia dimasa depan, oleh sebab itu para orang tua mempunyai kewajiban untuk membina, mendidik, dan mengembangkan bakat anak dan remaja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Menurut hasil survai penulis secara umum, fenomena remaja Indonesia sekarang memiliki perangai positif yang ditandai dengan fisiknya rata-rata tinggi dan besar, lincah dan berani berterus terang, sifatnya lugu, tulus, bersemangat, dan secara umum cerdas. Disamping perangai positif remaja Indonesia masa kini juga memiliki perangai negatif seperti perilakunya sangat cepat berubah, ada gejala mengucilkan diri dari masyarakat, lebih mementingkan diri, lebih banyak diam dikamar, merasa lebih nyaman dengan mesin, ada gejala menjadi tidak jantan (girls), menjadi kelaki-lakian (boys), kurang sabar, kurang percaya diri, menghindari dari pekerjaan yang sukar, menurunnya rasa kasih sayang kepada sesama, menjadi egois, lebih materialistic, rasa hormat kepada yang tua semakin menurun.

Jika kita tengok 10-15 tahun yang lalu remaja umumnya generasi yang patuh pada orang tua, hormat pada guru, dan memiliki cita-cita tinggi. Fakta menunjukkan bahwa ketiga hal tersebut sekarang mulai luntur, kelunturan ini akibat pengaruh dari kemajuan ekonomi dan perkembangan teknologi. Dampaknya remaja lebih menjadi generasi hedonis, mementingkan kenikmatan (suka manja dan apatis), dan tercipta kultur baru dalam gaya hidup (funky, boring, cool, dll). Fenomena perilaku remaja masa kini seperti rambut dicat warna merah-hijau-coklat, baju yang membalut tubuh sekadarnya sehingga bagian organ tubuhnya dipertontonkan secara umum, berbicara dengan bahasa gaulnya sendiri, hidup lebih suka didunia gemerlap (dugem) dan suka mengikuti kerumunan seperti tawuran dan sejenisnya.

Mengkaji ilustrasi diatas sangat memprihatinkan kondisi remaja Indonesia masa kini, oleh sebab itu pemerintah telah banyak memberikan program yang bersifat *top down* untuk anak, remaja dan pemuda agar mereka tidak salah dalam menentukan pilihan masa depan. Di sisi lain pemerintah telah memberikan program melalui lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat paling bawah, yaitu Pos Yandu, Bina Keluarga Balita dan dikembangkan pada Bina Keluarga Remaja. Program BKR melibatkan langsung para orang tua khususnya ibu dan kelompok masyarakat yang berkait dengan program ini yaitu PKK dari level pemerintahan propinsi sampai pada PKK level Rukun Tetangga.

Seluk Beluk Pelaksanaan BKR

UU No. 10 Tahun 1992 menjelaskan “Keluarga sejahtera”, yang dimaksud keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang syah, mampu memnuhi kebutuhan hidup spiritual dan metril yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

BKR bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membimbing/membina remaja agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikis dan kepribadiannya dengan harapan senantiasa menjadi manusia yang taqwa, maju dan mandiri. Sasaran program ini adalah para orang tua dan setiap keluarga yang mempunyai anak usia remaja (13-21 tahun).

Pelaksanaan program BKR dikelola dari tingkat propinsi sampai pada tingkat dusun/RW, dan setiap dusun menunjuk kader BKR.

1. Tugas kader BKR

Tugas kader BKR antara lain a). Pendataan, kader melakukan survai ada tidaknya warganya yang memiliki remaja. b). Pertemuan dengan tokoh formal dan non formal dalam rangka memperkenalkan MKR guna memperoleh dukungan, c). Pertemuan dengan sasaran guna memberikan informasi maksud dan tujuan, agar sasaran memahami arti pentingnya porgram ini. Sesuatu yang diharapkan dari pertemuan ini adalah kesediaan warga menjadi sasaran dan rela berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan BKR. d). Pembentukan kelompok, setelah ada kesepakatan antara tokoh formal dan non formal, kader warga sebagai sasaran kegiatan BKR maka perlu membentuk kelompok-kelompok BKR, setiap kelompok terdiri dari 20-40 keluarga, prinsip pembentukan kelompok didasarkan pada kewilayahan dan kelembagaan.

2. Pelaksanaan

Urutan pelaksanaan BKR oleh kader diawali dengan penyelenggaraan pertemuan dan dilanjutkan dengan teknik penyuluhan. Agar penyuluhan dapat mencapai tujuan maka kader harus memahami materi dari penyuluhan BKR dengan prinsip belajar bagi orang dewasa. Ciri belajar orang dewasa tidak menggurui, tidak merasa menjadi ahli, tidak memutus pembicaraan, tidak berdebat, tidak diskriminatif, tetapi kader cenderung menjadi fasilitator.

Dalam pertemuan dan latihan kader BKR harus mampu menciptakan suasana akrab, menentukan waktu sesuai dengan kesanggupan peserta, isi pesan dalam penyuluhan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat dan kader dituntut mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta penyuluhan.

3. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pembinaan

Aktivitas BKR yang telah berjalan harus dibina lebih lanjut oleh kader, tidak boleh putus dijalan kecuali ada pemutusan dari pihak anggota karena sudah tidak memiliki remaja usia 13-21 tahun. Oleh sebab itu kader harus berupaya untuk menyelesaikan kurikulum BKR sampai dengan paripurna, dan selalu ada komunikasi timbal balik. Pembinaan memanfaatkan waktu untuk melakukan kunjungan rumah dan

pemamfaatan forum-forum dalam situasi kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang dan mengandung pendidikan.

b. Pemantauan

Pemantauan diarahkan pada pengamatan kegiatan kelompok dan komunikasi antara orang tua dengan anak dan remaja baik di rumah maupun di luar rumah. Pemantauan dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Materi pemantauan yang pokok antara lain jumlah anggota, kehadiran kader dan anggota dalam pertemuan kelompok, permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya, jumlah masalah yang dirujuk, perkembangan tahapan kelompok BKR dalam menyelesaikan kurikulum.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan diukur dengan kegiatan yang ditentukan. Evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendataan keluarga, melalui forum pertemuan, perkembangan pengurus, perkembangan jumlah anggota, perbandingan jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR terhadap keluarga yang tidak mau menjadi anggota BKR dan jumlah banyak kegiatan yang dilakukan.

Semua yang telah dievaluasi dilakukan pencatatan di lembar evaluasi BKR sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

4. Materi

Materi yang diberikan dalam pertemuan BKR ada dua yaitu :

a. Materi dasar, terdiri dari :

- 1). Gerakan pembangunan keluarga sejahtera dan
- 2). Konsep dasar bina keluarga anak dan remaja.

b. Materi inti, terdiri dari :

- 1) Pemantapan delapan fungsi keluarga
- 2) Peran orang tua dalam pembinaan anak dan remaja,
- 3) Konsep diri orang tua dalam pembinaan anak dan remaja serta upaya pemecahannya,

- 4) Permasalahan orang tua dalam pembinaan anak dan remaja serta upaya pencegahannya

- 5) Tumbuh kembang dan kepribadian remaja
- 6) Remaja dan permasalahannya
- 7) Reproduksi sejahtera

Materi pertemuan enam bulanan dan pertemuan kelompok

Materi pertemuan enam bulanan sekali yang dilaksanakan untuk menunggu anggota kelompok yang menginjak umur 13 tahun adalah pemantapan pertemuan sebelumnya dan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota. Jadi pertemuan ini cenderung membahas perpindahan anggota kelompok karena usia dari anak dan remaja sebagai anggota keluarga yang mengalami tumbuh kembang.

Dalam pertemuan kelompok baik secara rutin maupun enam bulanan serta sembilan bulanan selalu menggunakan kantong kasih sayang sebagai media inovasi.

5. Bentuk kegiatan dan alat bantu

Bentuk kegiatan BKR dilaksanakan sekali setiap bulam. Pertemuan ini berisi penyuluhan, diskusi dan dialog dengan materi mengangkat problem yang dihadapi remaja dan keluarga.

Alat bantu yang diperlukan antara lain alat peraga berupa gambar, kantong kasih sayang, kartu bimbingan dan lembar balik.

Frame Sumberdaya Manusia Berkualitas

Human resources dalam konteks mikro adalah satu-satunya sumber daya keluarga yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, karya dan karsa). Jadi sumberdaya manusia sebagai subyek untuk mencapai sebuah tujuan, karena manusia sebagai kunci maka manusia perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen sedini mungkin oleh keluarga itu sendiri. Dalam aspek makro sumberdaya manusia merupakan satu-satunya sumberdaya bangsa dan negara yang harus jadi perhatian secara *holistic* karena sumberdaya manusia memiliki karakteristik beda terhadap sumberdaya lain (alam, rekayasa dan social).

Sumberdaya manusia berkualitas menurut rumusan Bank Dunia (1980) meliputi pengembangan manusia tentang aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan dan gizi, menurunkan fertilitas, peningkatan kemampuan dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu dalam mempersiapkan manusia berkualitas tidak dapat lepas dari pendidikan, baik pendidikan formal, non formal dan pendidikan keluarga itu sendiri. Menurut Effendi (1992) Pengembangan sumberdaya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

Sugiyanto (2003) lebih memperjelas bahwa manusia berkualitas adalah manusia yang memenuhi empat indikator yaitu indikator kemampuan, potensi, kinerja dan kesehatan. Jadi bagi manusia yang memenuhi keempat indikator tersebut dapat menjadi individu masteri. BKR sebagai salah satu bentuk pendidikan non formal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat (kader) dan ibu-ibu sebagai anggota keluarga. Misinya menyiapkan cara memberikan andil dalam proses menyiapkan individu berkualitas yang nantinya mampu menjadi individu masteri. Uztat Wijayanto dan Dr. Boyke (2005) menambahkan bahwa manusia berkualitas sejak dini pra kelahiran harus sudah diimbangi dengan tiga hal yaitu ada kekuatan illahi berkaitan dengan do'a termasuk psikologi dan psikis, kekuatan alamiah berkaitan dengan potensi dan kekuatan obati berkaitan dengan injeksi seperti minum vitamin, jumlah kalori dan kebutuhan gizi terpenuhi. Dalam hal ini program BKR turut andil dalam menyiapkan sumberdaya manusia berkualitas. Indikator dari andil BKR dalam menyiapkan sumberdaya manusia berkualitas adalah adanya nilai/standart yang tidak dapat

dijamak dan diukur tetapi dapat dirasakan dari aspek moral, etika, psikologi dan perilaku.

Praktik Pemberdayaan Perempuan

Jika dirunut dari aspek sejarah sebenarnya program BKR merupakan perkembangan lebih lanjut dari program Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Sebenarnya dari program PKK, Pos Yandu dan BKB sudah ada pemberdayaan perempuan khususnya ibu sebagai orang kedua dalam kehidupan rumah tangga. Pemberdayaan dalam program PKK, Pos Yandu dan BKB serta BKR tidak terbatas pada ibu saja tetapi juga telah dilakukan pemberdayaan organisasi masyarakat dan kelompok-kelompoknya.

Keluarga dan perempuan di Indonesia yang tergolong rentan terhadap kemiskinan dan menghadapi masalah ada 16% dari jumlah keseluruhan, dengan demikian keluarga dan perempuan berjumlah 16% tersebut termasuk didalam kategori masyarakat lapis bawah dan pinggiran baik yang ada di pedesaan dan perkotaan. Kelemahan keluarga dan perempuan yang tergolong rentan tersebut adalah rentan dalam hal 1). Tingkat kekritisian, keterampilan, wawasan transformatif, masih rendahnya mutu taraf hidupnya dan lemah dalam berkomunikasi 2) Keswadayaan, partisipasi, kemandirian dan solidaritas sosial.

Kartasmita (dalam Ony S. Priyono: 1995): berpendapat upaya pemberdayaan rakyat harus dilakukan dengan tiga cara yaitu, 1). Menciptakan iklim/suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang 2) Memperkuat potensi /daya yang dimiliki oleh masyarakat; 3) Memberdayakan dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Konteks pemberdayaan tidak akan mengena sasaran jika pelaksanaan program bersumber dari atas (top down) seperti yang dilakukan oleh Orde Baru, demikian halnya jika pemberdayaan menunggu kesadaran dari bawah juga masih lamban sehingga untuk bisa mencapai tujuan pembangunan pemberdayaan idealnya harus start bersama dari bawah (kesadaran masyarakat dan injeksi dari luar serta pemerintah. Tinggal landas bersama diharapkan akan mencapai hasil yang lebih baik. Dari mana kebersamaan pemberdayaan itu dimulai? Sebaiknya dimulai dari proses menentukan kebutuhan, masalah yang dihadapi, merencanakan aksi, mengevaluasi program, merawat hasil program dan pememfaatan program. Bentuk-bentuk praktik pemberdayaan perempuan dalam program BKR yang dilakukan seharusnya bercermin pada akses pemberdayaan.

Akses pemberdayaan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas masyarakat (subyek dan obyek) dalam pemberdayaan, apakah dalam pemberdayaan perempuan pada aktivitas BKR sudah menggunakan pola akses akses terhadap sumberdaya, dan sumberdaya ini harus mengacu pada empat sumberdaya yaitu: a) *Sumberdaya manusia* mengembangkan potensi, kemampuan dan kinerja yang telah tersedia dengan mengembangkan kapasitas SDM secara tepat dan multi fungsi. b). *Sumberdaya alam*, alam dilihat tidal sebelah mata tetapi secara holistik dari hutan, pertanian, tambang, perikanan, kelautan, dll yang semuanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran masyarakat pada saat ini dan saat yang datang. Jadi ada upaya dini

pelestarian dan mewariskan kepada generasi berikutnya. c) *Sumberdaya sosial* yang mengembangkan modal sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat, melestarikan dan membesarkan solidaritas untuk saling tolong menolong, saling menghormati dan bantu membantu dalam aspek lokal dan global. d). *Sumberdaya rekayasa* bagaimana memanfaatkan secara optimal yang sudah ada dan pemeliharaannya serta menciptakan sumberdaya rekayasa berdasarkan kepentingan kebutuhan /multi guna untuk banyak pihak secara adil dan merata. Secara tidak langsung dalam aktivitas BKR telah melaksanakan berbagai akses pemberdayaan, akses tersebut meliputi akses kebutuhan, teknologi dan pembiayaan/swadaya. Berpangkal pada akses maka tujuan dari pemberdayaan mengangkat kemampuan dan menyeimbangkan politisasi rakyat dengan pembangunan social terutama pilar kesehatan dan ekonomi.

Strategi dari pemberdayaan perempuan dalam BKR cenderung diarahkan pada berbagai pendekatan, seperti: 1) *Basic needs*, sebuah pendekatan yang menuju kearah aneka kebutuhan dasar hidup manusia (remaja) dan keluarga. 2) *Bottom up*, pendekatan ini lebih menekankan pada kegiatan program yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pendanaan dan pemeliharaan hasil kegiatan 3) *Prosperity*, program yang diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya remaja dan keluarga.

Pemberdayaan perempuan dalam aktivitas BKR termasuk dalam level mikro sebab yang menjadi sasaran pemberdayaan dalam level mikro adalah individu (remaja), keluarga dan kelompok kecil. Bentuk kongkrit dalam pemberdayaan level mikro adalah individu, keluarga dan kelompok kecil sebagai sasaran harus dapat dan mampu untuk: a). Mengambil keputusan sendiri, b) Menentukan tindakan yang terkait dengan dirinya c) Mengurangi efek hambatan sosial dan pribadi, d) Mentransfer lingkungan kedalam diri sendiri, e) Mengontrol kehidupan diri sendiri, f) Membentuk masa depan sesuai dengan keinginan.

Problem Pelaksanaan BKR

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Wibowo (2003) dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ada problem yang sulit dipecahkan. Pemecahan problem ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku pemberdaya (Social work) dan situasi masyarakat yang bersangkutan serta kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat pemberdayaan masyarakat berlangsung. Problem tersebut adalah :

1. Mensinergikan berbagai macam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga (pemerintah dan non pemerintah).
2. Mensinergikan pemberdayaan antar bidang dengan tujuan yang beda.
3. Mensinergikan potensi internal dan potensi eksternal

Temuan-temuan dilapangan pada saat penulis melakukan survai dan studi pustaka menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan BKR ada hambatan-hambatan yang sangat berarti seperti :

1. Belum setiap wilayah khususnya Yogyakarta dan Jawa Tengah semua desa/kelurahan melakukan pemberdayaan perempuan melalui BKR.

2. Ada beberapa wilayah penyelenggaraan kegiatan BKR termotivasi bukan untuk meningkatkan kesejahteraan remaja dan keluarga tetapi kader dan ibu-ibu termotivasi untuk lomba BKR tergiat, sehingga pelaksanaannya tidak rutinitas.
3. Kader yang ditunjuk/dipilih oleh tokoh masyarakat belum semua memahami maksud dan tujuan BKR sehingga pelaksanaannya sering mengalami kebingungan.
4. Belum semua aparat pemerintah tingkat desa/kelurahan memotivasi dan memberi bantuan kepada PKK untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan melalui BKR.
5. Keterbatasan kemampuan kader dalam memanfaatkan potensi local yang dapat dipergunakan sebagai sumber bantuan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui BKR.
6. Ada sebagian warga yang tahu dan mampu tentang seluk beluk pelaksanaan BKR tetapi mereka tidak bersedia sebagai kader BKR.

Jadi berdasarkan teori yang diungkapkan Wibowo diatas jika cek silang dengan problem dilapangan dipandang sangat sinkron sebab kenyataannya pelaksanaan BKR di level RW dan RT belum melibatkan semua dan mensinergikan lembaga-lembaga social masyarakat yang ada, termasuk di dalamnya potensi eksternal dan internal. Sebagai contoh hasil penelitian Sugiyanto (2003) di kabupaten Kebumen Jawa Tengah menunjukkan tidak semua *stakeholder* dilibatkan oleh kader.

Penutup

Dalam pelaksanaannya kader BKR berjalan sendiri berdasarkan pengetahuan yang dia miliki sehingga langkah-langkah pelaksanaan program BKR tidak sesuai dengan teori pemberdayaan, dalam teori sebelum pelaksanaan harus dimulai dari tahapan sbb : a). Persiapan/engagement, penyiapan petugas dan penyiapan lapangan, b). Pengkajian/ assessment meliputi individu dan orang kunci (keyperson), kelompok-kelompok masalah yang dihadapi, kebutuhan, pendekatan, kualitatif/kuantitatif, c). Perencanaan alternatif program (designing) harus melibatkan warga (partisipasi). d). Pemformulasian rencana aksi, membantu kelompok untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tertulis. e). Pelaksanaan program (implementasi), mengantisipasi agar tidak terjadi pertentangan antar warga f). Evaluasi, menekan pada pengawasan pelaksanaan program secara terus menerus, pelaku social work, masyarakat. g). Terminasi tahap pemutusan hubungan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

BKKBN, 1998, ***Buku Pegangan Kader Bina Keluarga Remaja***, BKKBN Yogyakarta.

Onny S. Priyono dan AMW Pranarka, 1996, ***Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi***, Center of Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.

Sugiyanto, 2004, ***Modul ORNOP dan Pemberdayaan***, Prodi Ilmu Sosiatri STPMD "APMD" Yogyakarta.

Sugiyanto, 2004, ***Skripsi "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pelaksanaan Program BKR"*** Prodi Ilmu Sosiatri STPMD "APMD", Yogyakarta.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992, ***Pembangunan Keluarga Sejahtera***, BKKBN, Jakarta.

Wibowo, 2003, ***Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan***, International Forum on Globalization.

Wijayanto dan Boyke, 2005, ***Sentuhan Qolbu***, Trans TV Episode Minggu, 28 Agustus 2005.

Bab 5

Membangun Sebuah Harapan: Pengalaman Mengikuti Kegiatan Organisasi Perempuan di Kampung

Rini Dorojati

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam menapaki langkah mewujudkan cita-citanya. Perempuan yang telah berkeluarga, cita-cita mulia pastilah ingin mewujudkan keluarga sejahtera. Walaupun sangat relatif, setiap keluarga bekerja keras ingin mewujudkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Permasalahannya adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapainya tidak sama dan kadangkala banyak hambatan. Oleh karena itu menyatukan perempuan dalam wadah organisasi akan sangat membantu perempuan yang telah berumah tangga mewujudkan impian-impian dan harapannya. Mengikuti kegiatan dalam organisasi di lingkungan menjadi salah cara atau jalan yang dilakukan oleh para perempuan, sebagai tempat perwujudan eksistensinya sebagai warga masyarakat dan warganegara yang memiliki hak sederajat dengan pria.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, peran keluarga sangat penting. Sebab keluarga menjadi sumber inspirasi bagi anggota didalamnya untuk mengikuti perubahan itu. Peran luar pun tak kalah pentingnya. Namun secara umum pembentukan watak seseorang akan diperoleh pada awal kehidupan di dalam keluarga. Di dalam keluarga itulah karakter masyarakat akan terbentuk. Ibu menjadi penting dalam membentuk keluarga yang berbudaya. Dalam masyarakat Jawa dan Yogyakarta pada khususnya, perempuan menempati posisi yang strategis dalam mewujudkan sebuah keluarga yang menjadi harapan bangsa. Dari sinilah sepak terjang perempuan menjadi bahasan dalam bab ini. Pengalaman penulis mengikuti organisasi di lingkungan tempat tinggal merupakan upaya menyajikan realita untuk pembelajaran bersama.

Perempuan Berorganisasi di Kampung

Pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam pembangunan dikaji oleh Moser (1989), yang mengemukakan lima pendekatan yaitu (1) pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*); (2) pendekatan keadilan (*the equity approach*); (3) pendekatan pengentasan kemiskinan (*the anti-poverty approach*); (4) pendekatan efisiensi (*the efficiency approach*); (5) pendekatan pemberdayaan (*the empowerment approach*). Pada pendekatan kelima yaitu pemberdayaan menekankan pentingnya perempuan untuk meningkatkan keberdayaannya dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan meningkatkan kemandiriannya (*self reliance*) dan kekuatan dalam dirinya (*internal strenght*). Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologis, sosial budaya, ekonomi dan politik yang berkaitan erat satu sama lain (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997: 161).

Adapun strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individu, kelompok dengan saling memberdayakan sesama perempuan dalam kelompok atau organisasi, khususnya organisasi perempuan (Priyono, 1996: 220).

Perempuan dapat berdaya melalui pembentukan organisasi kelompok yang beraneka ragam tujuannya. Perempuan yang bekerja dengan perempuan lain dalam organisasi atau kelompok akan menjadi lebih berdaya. Sebab jaringan kerja dan berorganisasi merupakan tindakan kolektif yang cenderung memperkuat proses pemberdayaan sosial budaya, psikologis dan politik bagi perempuan. Selain itu perempuan sebagai kelompok akan menjadi lebih berdaya dalam masyarakat, dengan menetapkan dirinya sebagai seorang swatantra (*autonomicus*). Adapun pemberdayaan dalam kelompok terjadi melalui komunikasi yang menimbulkan pemikiran asli yaitu keprihatinan terhadap kenyataan hidup.

Ditinjau dari tujuannya, organisasi perempuan dapat bersifat mencari keuntungan dan nirlaba. Partisipasi perempuan dalam organisasi nirlaba telah memberi kemungkinan bagi perempuan untuk membentuk struktur pemberdayaan paralel, sehingga perempuan memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Lebih lanjut McCarthy (1994) menyatakan bahwa terdapat tiga strategi perempuan berpartisipasi dalam organisasi nirlaba. Pertama, *separatisme*, kedua *asimilasi*, ketiga *individualisme*. Menurut Priyono, di Indonesia strategi tersebut dapat diperluas menjadi sembilan model strategi partisipasi perempuan dalam organisasi yang merupakan kondisi atau syarat pendukung untuk dapat memberdayakan perempuan melalui: (1) Pemisahan, yaitu perempuan bekerjasama dengan perempuan lainnya dalam kelompok organisasi untuk membantu orang lain; (2) Emansipasi, perempuan bekerja dan berjuang bersama pria dalam organisasi, lembaga atau yayasan, koperasi atau kelompok usaha bersama sebagai saran untuk memberdayakan perempuan; (3) Asimilasi, organisasi perempuan yang berkaitan dengan profesi atau kedudukan suaminya; (4) Integrasi yaitu, kelompok/organisasi perempuan berperan sebagai penunjang untuk organisasi yang dimotori oleh pria; (5) Status sosial; perempuan yang memiliki kedudukan atau status terhormat dalam masyarakat perlu dan ingin menunjukkan tanggungjawabnya sosialnya dengan melakukan beberapa kegiatan sosial dan amal. Oleh Mc. Cathy disebut *Noblesse oblige*; (6) Pengamalan bakat dan minat; (7). Individualisme, perempuan cenderung bertindak sendiri; (8) Naungan, di bawah pelindung. Pejabat yang berwenang mengambil inisiatif dalam pembentukan kelompok perempuan atau sebaliknya kelompok atau organisasi perempuan menunjuk pejabat pemerintah setempat sebagai pelindung (9) Keluarga.

Organisasi perempuan dapat merupakan loncatan untuk memasuki arena politik, juga memberikan kesempatan mengembangkan potensi. Namun dalam pengembangan pemberdayaan perempuan seringkali hambatan itu datang dari sesama perempuan (Priyono, 1996: 226).

Berdasarkan pengertiannya, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama (Mooney dalam Manullang, 2001:59). Sejalan pendapat tersebut, menurut Harjito (2001:5), organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui

tindakan individu secara terpisah. Adapun pendapat lain, menurut Sutopo (2000:50), pengertian organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila ditinjau dari kebutuhannya, organisasi dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, memiliki dua pengertian yaitu sebagai wadah dan sebagai proses. Sebagai wadah, organisasi merupakan alat manajemen atau *tool of management*; sedangkan sebagai proses, organisasi dinamis atau selalu bergerak menuju tercapainya tujuan dengan cara pembagian tugas dan tanggungjawab kepada anggotanya, mengadakan hubungan kedalam maupun keluar dalam rangka mencapai keberhasilan. Adapun hubungan di dalam organisasi dikenal dua macam hubungan yaitu hubungan formal dan hubungan informal.

Selain itu, ciri-ciri organisasi adalah: (1) Adanya sekelompok orang; (2) Antar hubungan (3) Kerjasama. Organisasi besar ataupun kecil tidak boleh mengabaikan orang-orang di dalam organisasi. Baik secara individu maupun kelompok, orang-orang tersebut tentu mempunyai berbagai kepentingan. Kepentingan orang-orang dalam organisasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu kepentingan individu, kelompok dan organisasi. Kepentingan organisasi tidak akan mulus tanpa memperhatikan *individu interest* maupun *group interest*. *Organisasi interest* merupakan titik temu antara keduanya. Antar hubungan sebagai ciri kedua dari organisasi dapat bersifat pribadi dan dapat bersifat sosial, dapat pula bersifat hubungan kerja. Hubungan-hubungan ini menjadi kunci keberhasilan suatu organisasi..

Organisasi mempunyai dua sifat yaitu statis dan dinamis. Sebagai wadah dan sifat dinamis, maka organisasi selalu berusaha untuk mempertahankan keberadaannya (*existence*) dan berusaha untuk mengembangkan diri (*develop*). Hal ini sesuai dengan prinsip organisasi. Sebagai kunci keberhasilan organisasi adalah efektivitas. Adapun prinsip organisasi yaitu dapat bertahan hidup dan dapat berkembang., maka supaya organisasi dapat bertahan hidup harus mempunyai teknik-teknik tertentu yaitu pengorganisasian.

Pengorganisasian adalah penyatuan, pengelompokan dan pengaturan orang-orang agar dapat digerakkan sebagai kesatuan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Teknik pengorganisasian adalah suatu strategi yang ditempuh organisasi dengan mendayagunakan komponen-komponen organisasi dalam menghadapi segala situasi yang mengganggu keefektivitasan organisasi (Hardjito, 2001: 113).

Ditinjau dari karakteristik organisasi, menurut Ibnu Syamsi (1997:42-46) organisasi dapat dikelompokkan menurut modelnya. Thompson mengelompokkan kedalam tiga model yaitu model tertutup, terbuka dan sintesa keduanya.

Adapun istilah kampung dalam kamus bahasa Indonesia berarti desa; sekelompok rumah penduduk di kota (Poerwadarminta, 1949: 67).

Dari uraian secara teoritis tentang organisasi perempuan dan kampung, selanjutnya bagaimana kenyataan ditingkat mikro yaitu organisasi perempuan di suatu kampung dalam hal ini adalah wilayah terkecil yaitu RT dan RW, berikut

pengalaman penulis mengikuti organisasi perempuan dengan segala dinamikanya disajikan dibawah ini.

Perempuan yang terlibat dalam organisasi di lingkungan tempat tinggal ditinjau dari kesadaran sebagai makhluk sosial dapat dikelompokkan menjadi dua, **pertama** adalah para perempuan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan; yang **kedua** adalah yang ikut-ikutan. Kelompok pertama menyadari bahwa melakukan sesuatu bagi orang lain memberikan rasa kepuasan dalam kehidupannya, sedangkan kelompok kedua mengikuti kegiatan di lingkungan merupakan hal wajar untuk pergaulan. Dari kedua kelompok tadi akan tercermin dari keterlibatannya dalam struktur organisasi di masyarakat. Hal terpenting dari berbagai organisasi perempuan di kampung apapun kondisinya akan dirasakannya manfaatnya bagi para pelakunya seperti manfaat sosial, ekonomi maupun budaya. Ukuran kemanfaatan bagi seseorang sangat relatif. Sebab tidak sedikit para perempuan yang memandang bahwa mengikuti kegiatan di kampung tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu, hanya ngerumpi, hanya arisan yang tidak seberapa besarnya. Pandangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain merasa tidak sederajat atau dengan bahasa lain tidak selevel, terbiasa dengan kelompok yang seragam, atau memang belum pernah mengikuti kegiatan kampung yang heterogen. Pandangan tersebut muncul, karena kurang pedulinya jiwa menyatu dengan lingkungan. Padahal kegiatan organisasi perempuan di kampung yang semuanya sifat dasarnya sosial akan mengasyikkan jika diikuti dengan jiwa merdeka atau berfikir yang lapang.

Kampung dapat dikonotasikan sebagai wilayah yang luas, maupun wilayah yang sempit misalnya tingkat Rukun Tetangga. Dalam pengertian yang luas dapat berupa desa atau lingkungan asal-usul seseorang. Sebagai satu kesatuan alam dan manusia, kampung memiliki dinamika sosial ekonomi maupun budaya bagi warganya. Dinamika sosial berkaitan hubungan yang terjadi antar penduduk di wilayah setempat dan penduduk setempat dengan penduduk di wilayah lain. Hubungan itu terjadi karena berbagai kepentingan dasar maupun kepentingan lain yang membuat seseorang individu atau kelompok dapat tercapai keinginannya atau kebutuhannya. Hubungan tersebut menimbulkan pula kepentingan ekonomi seperti jual beli, barter, kredit dan usaha lainnya. Bagi setiap wilayah tidak sama dalam mengikuti dinamika sosial ekonomi masyarakatnya. Faktor budaya dapat pula menjadi pola hubungan sosial ekonomi masyarakat tersebut terbentuk.

Perempuan di kampung memiliki peran yang besar dalam mendinamisasikan warganya, sebab banyak hal yang dapat dilakukan di kampung memerlukan sentuhan/perhatian perempuan misalnya bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, cara merawat anak, merawat hubungan hubungan sosial dengan tetangga, mengatasi wabah penyakit . Selain itu sebagai ibu rumahtangga kelangsungan keluarga menjadi bagian hidup perempuan. Bagaimana seluruh keluarga makan, pakaian bersih, dapat beraktivitas. Perempuan juga menginginkan eksistensinya diakui dilingkungan. Disamping sebagai ibu rumahtangga , perempuan juga sebagai pencari nafkah. Mengikuti kegiatan organisasi di kampung merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan harapan-harapan para perempuan sebagai warga negara dan warga masyarakat menuju keluarga yang bahagia.

Gambaran Kampung

Penulis bertempat tinggal di sebuah kampung di wilayah kota Yogyakarta bagian selatan yaitu di sebuah kelurahan perbatasan kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Karakteristik penduduknya memiliki ciri masyarakat kota dan desa. Unsur komersial menjadi ciri masyarakat kota, sedangkan guyub serta mempertahankan adat merupakan salah satu ciri masyarakat agraris. Munculnya berbagai usaha jasa toko, warung, rental VCD, rental komputer dan internet dan pedagang kaki lima merupakan fenomena lain akibat dari perkembangan fisik desa seperti rumahsakit serta beberapa perguruan tinggi di Kelurahan ini. Kegiatan sosial keagamaan merupakan kegiatan yang menonjol pada masyarakat di sini. Menurut sejarah, di lokasi ini pernah berdiri pondok pesantren dengan santri dan kyainya yang cukup disegani. Namun Pondok pesantren tersebut saat ini sudah tidak ada, yang tersisa adalah bekas bangunan yang tinggal pondasi. Namun banyak ahli agama bertempat tinggal di kampung ini.

Sejalan perkembangan fisik, di kelurahan ini menimbulkan pula perubahan fisik rumah penduduk yang sebelumnya dari non atau semi permanen menjadi permanen. Demikian pula pemilikan berbagai barang rumahtangga dan kebutuhan-kebutuhan pun berubah. Alat komunikasi dan transportasi telah menjadi kebutuhan. Daya tarik bagi pendatang pun semakin meningkat, sebab masyarakat melihat peluang untuk menambah penghasilan dengan jalan menyediakan jasa menyewakan sebagian rumahnya untuk kos-kosan mahasiswa atau keluarga. Jumlah pendatang semakin lama semakin bertambah. Pola hidup pendatang yang sering tidak mengindahkan norma menjadikan tambahan masalah baru di kampung seperti menggunakan narkoba dan hidup bebas.

Perubahan-perubahan sosial dan ekonomi maupun budaya tersebut, posisi perempuan juga dituntut meningkatkan perubahan wawasannya. Sehingga dalam berbagai kegiatan keagamaan yang banyak wadah bagi perempuan, penambahan wawasan rohani menjadi suatu kebutuhan agar tidak mengalami *cultural shock* bagi mereka dan keluarganya. Banyak sekali kegiatan keagamaan dengan jadwal hari dan pasaran yang berbeda-beda. Jenis kegiatannya pun berbeda-beda antara lain: belajar membaca al-Qur'an, mengkaji isi al-Qur'an, dan ceramah-ceramah.

Pelestarian budaya tradisional sebagian masih dilaksanakan antara lain brokohan berisi beras, telur dan gula jawa, bancakan untuk puput puser dan selapanan, pernikahan: rewangan, sinoman dan midodaren undangan dengan memberi tonjokan. Tonjokan adalah pemberian makanan sebagai sarana untuk menghadiri pada acara perhelatan misal pernikahan. Setelah hadir maka kadangkala yang punya hajat memberikan makanan lain sebagai ucapan terimakasih berupa kue saat ini. Kematian diumumkan melalui masjid-masjid. Para pelayat dari berbagai wilayah RW banyak yang hadir walaupun belum mengenal betul. Semua perempuan yang hadir melayat atau mendatangi hajat menggunakan jilbab. Budaya tersebut menunjukkan salah satu ciri masyarakat.

Profesi perempuan sebagai pencari nafkah sangat beragam, sebagaian besar sebagai wirausaha seperti penjahit, membuka warung sayur-mayur,

pedagang di pasar; membuat kerajinan, industri aluminium, usaha *rongsok* atau barang bekas seperti botol, koran, plastik. Sebagai pekerja atau buruh industri atau rumahtangga; sedikit PNS dan guru serta ibu rumahtangga.

Menjadi Anggota Organisasi Perempuan

Organisasi PKK merupakan salah satu wadah kegiatan perempuan atau organisasi perempuan di kampung yang sifatnya formal dan nonformal. Formal karena diakui oleh pemerintah. Dan non formal sifat keanggotaannya tidak mengikat. Artinya perempuan yang masuk menjadi anggota tidak diperlukan syarat tertulis yang terperinci, jadi sifat keanggotaannya terbuka. Sebenarnya kegiatan perempuan di kampung dapat saja dinamakan selain PKK, namun kenyataannya gerakan PKK telah diterima oleh kaum perempuan. Selama ini para perempuan di masyarakat tidak memperlakukan PKK.

Sebagai suatu gerakan yang meningkatkan peran perempuan, PKK sebelumnya merupakan kepanjangan singkatan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, sekarang telah berubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Konsekuensi dari perubahan nama organisasi tersebut adalah pola pembinaan yang lebih mengarah pada pemberdayaan daripada pembinaan. Di dalam strata wilayah lebih kecil yaitu di tingkat RW atau RT, PKK bergerak melalui para kader. Segala informasi dari pemerintah disampaikan kepada warga. Informasi yang disampaikan dapat berupa tindakan yang harus dilakukan, atau bantuan yang akan diterima oleh warga. Dalam struktur organisasi sosial kemasyarakatan PKK tercakup dalam kelompok kerja empat.

Adapun program pokok PKK begitu banyak, namun tidak semua program tersosialisasi kepada anggota, sehingga anggota PKK pun kadangkala atau umumnya tidak tahu apa itu kepanjangan PKK. Menjadi anggota PKK yang penting mengikuti kegiatannya sudah cukup.

Apakah semua perempuan di masyarakat sebagai ibu rumahtangga di mana penulis bertempat tinggal mau mengikuti kegiatan PKK? Sebagaimana memang merasa perlu mengikuti, ada sebagian tidak mau. Mengapa tidak mau, antara lain sebagai pendatang atau kontrak rumah, sehingga tidak wajib mengikuti kegiatan kampung. Dalam hal ini penulis berusaha memberikan saran, bagaimana menarik agar bergabung dalam kegiatan perempuan di lingkungan, yaitu pertama, dengan cara memberikan kesempatan kepada tetangganya kanan-kiri mengajak (persuasif) mengikuti kegiatan ibu-ibu. Hasilnya sebagian mau dan sebagian tidak mau merespon dengan berbagai alasan. Bagi yang tidak mau, setiap saat tetap diberi undangan. Namun dalam kegiatan yang lain ditinggalkan oleh warga. Strategi kedua, pengurus mendatangi warga tersebut agar bersedia berkumpul dengan warga.

Apsari merupakan organisasi perempuan yang berkaitan dengan program kependudukan. Anggota Apsari adalah para perempuan yang berusia reproduktif sekitar 15-49 tahun. Namun hal inipun terbuka pula bagi perempuan yang berusia tidak produktif terutama pengurusnya/kader. Anggota Apsari mengikuti kegiatan program Keluarga Berencana, termasuk melakukan pendataan dan penyediaan fasilitas bagi para ibu untuk melaksanakan KB. Kalau sebelumnya mendapat bantuan alat kontrasepsi, saat ini lebih diarahkan kepada kemandirian. Anggota Apsari kebanyakan para ibu muda. Cara merekrut anggota

saling menginformasikan. Hal-hal yang dirasakan kebutuhan ibu-ibu untuk mengembangkan wawasan tentang kesehatan, kerumahtanggaan dan kecantikan akan menarik untuk mengikuti. Selain itu cara jemput bola juga ditempuh. Pengurus menghampiri saat pertemuan, sehingga merasa memiliki teman, kemudian saling diperkenalkan maka yang lain akan mengenal. Untuk selanjutnya mereka akan merasa memiliki organisasi itu.

Dasawisma memiliki keanggotaan yang terdiri dari ibu-ibu yang rumah tinggalnya mengelompok dengan jumlah 10 KK. Sebelumnya pengurus PKK RT melaksanakan pendataan melalui peta dan jumlah warga/KK. Idealnya dasawisma setiap 10 KK, namun kelebihan tiga atau empat KK hal yang wajar. Sebab dalam satu rumah mengalami tambahan KK akibat dari perkawinan anaknya, sehingga keluarga baru tadi masih tinggal di lingkungan orangtua. Rata-rata setiap RT terbagi menjadi 4 dasawisma. Setiap dasawisma bebas melaksanakan kegiatannya. Dalam hal ini kegiatan direncanakan dengan melalui FGD yang difasilitasi oleh pengurus PKK RT. Setiap Dasawisma juga sangat variatif usulannya. Disini akan nampak partisipasi perempuan, karena sekat-sekat semakin tipis, sehingga partisipasi warga akan meningkat. Mereka memutuskan sendiri. Namun kadangkala terdapat anggota yang dominan dalam mengambil keputusan dan kebetulan kondisi sosial dan ekonominya sangat jauh, hal ini menjadi masalah. Sebab anggota yang lain takut melangkah sebelum ada anggota yang dominan tersebut. Langkah yang dilakukan pengurus PKK RT adalah memberikan dorongan kepada anggota lainnya bahwa semua anggota berhak untuk mengambil keputusan secara musyawarah atau mufakat.

Dinamika Organisasi

a. Pengurus Yang Itu-Itu Saja

Dalam berorganisasi, kepengurusan merupakan hal yang sangat menentukan kelangsungan dari organisasi perempuan di kampung. Sebab disamping waktu, tenaga dan biaya pengurus menjalankan roda organisasi tanpa imbalan apapun. Sebuah organisasi perempuan di kampung bisa berjalan atau tidak bisa berjalan tergantung dari semangat pengabdian pengurusnya. Pada saat pemilihan pengurus para anggota mengusulkan nama, tetapi kalau ditunjuk menjadi pengurus banyak yang tidak mau. Bagaimana cara menjalankan organisasi di kampung? Rasa kurang percaya diri sebagian besar anggota menyebabkan tidak mau menjadi pengurus disamping merasa belum berpengalaman. Namun sebenarnya bisa dipupuk dengan menumbuhkan rasa memiliki dan rasa kepedulian pada lingkungan. Kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan, para warga ini akan mau berkiprah terhadap dinamika sosialnya.

Penulis tinggal di lingkungan sebuah kampung yang masyarakatnya sedang mengalami perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat kota. Para pendatang dan warga asli belum cair. Artinya hubungan pendatang dan warga asli kadangkala masih diperbincangan. Hal ini mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepengurusan organisasi. Di dalam kepengurusan PKK, ibu-ibu yang bersedia membantu kegiatan dijadikan pengurus. Pembentukan pengurus dasarnya musyawarah. Adapun struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris I, dan 2, bendahara 1 dan bendahara 2 dan seksi-seksi.

Dalam penentuan ketua, anggota secara aklamasi menunjuk isteri RT. Seksi-seksi terdiri dari seksi pendidikan, olahraga, humas, arisan dan kesejahteraan. Dalam penentuan kepengurusan, kadangkala milih-milih sesuai kesanggupannya. Saat ini satu periode kepengurusan PKK sama dengan periode kepengurusan RT/RW. Sebelumnya tidak ada batas waktu, sehingga dari waktu ke waktu hanya itu-itu saja. Menawarkan pergantian pengurus kepada anggota, jawabannya tidak ada yang mau dan mereka mengatakan terus. Seorang pengurus yang telah lama mengikuti organisasi perempuan mengatakan “*Kulo seneng nderek kegiatan perempuan wonten kampung soale kathah pikantuk pengetahuan lan kathah kenalan sing pinter-pinter*” (Dalam bahasa Indonesia:” Saya senang mengikuti kegiatan perempuan di kampung, sebab banyak pengetahuan yang diperoleh dan banyak kenalan yang pandai-pandai”).

Pengurus melakukan rapat-rapat seperlunya jika memerlukan berbagai pertimbangan. Merencanakan kegiatan tidaklah mudah. Penulis mengikuti kepengurusan untuk mengusulkan rencana kegiatan tahunan agar setiap bulan terjadwal selama setahun. Sebagian mengatakan bahwa kegiatan sebaiknya mengikuti kondisi saja, tidak perlu direncanakan.

PKK tingkat RW, pengurusnya adalah yang aktif mengikuti kegiatan di tingkat RT. Pada umumnya di tingkat RW pengurusnya secara sosial ekonomis lebih mapan. Walaupun tidak seluruhnya, namun dengan status sosial ekonomi yang mapan terlihat dalam sistem pegambil keputusan yang lebih luas dan cara berfikir dengan berbagai alternatif pemecahannya. Para pengurus antara lain istri mantan ketua RW atau istri mantan RT, tokoh masyarakat dan kader. Dalam Kegiatan PKK RW penulis sebagai anggota.

Kepengurusan Apsari lebih heterogen. Umumnya ibu-ibu berusia muda secara produktif maupun dari umur perkawinan. Pada awalnya pengurus adalah para perempuan yang aktif dalam PKK RW. Siapa saja yang terlibat adalah ibu-ibu yang bersedia memikirkan organisasi itu. Pada periode terakhir yaitu tahun 2003-2006, pengurus dilakukan pemilihan secara demokratis dengan cara lintingan. Sangat menarik karena mereka memilih seseorang yang dirasa bisa menjadi jembatan aspirasi ibu muda. Dari pemilihan suara terbanyak itulah ketua terpilih kemudian angka dibawahnya menjadi sekretaris, bendahara dan seksi-seksi lainnya. Para senior sepakat melakukan alih generasi. Untuk mengatasi kepengurusan yang itu-itu saja, salah satu jalan adalah mencari kader, dan para senior siap mengundurkan diri.

b.Keuangan: Arisan-Simpan Pinjam

Salah satu kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi perempuan di kampung adalah kegiatan arisan. Arisan tersebut sebagai kegiatan yang sifatnya dapat mengikat anggota untuk selalu hadir dalam pertemuan anggota dilakukan setiap bulan sekali., dan bukan kegiatan utama. Jumlah uang arisan yang akan diperoleh tidak menjadi masalah, sebab yang diperlukan pada kegiatan arisan ini adalah dimana kegiatan pertemuan berikutnya akan dilangsungkan. Besarnya iuran arisan sebanyak RP2000,- ada pula yang Rp2500,- atau Rp1000. Jumlah uang arisan diperoleh sekitar RP 35000,-. Apabila satu RT jumlah KK 55, maka baru akan mendapat giliran menerima pertemuan rutin setelah empat tahun. Ditingkat RW maupun dasawisma iuran arisan jumlahnya relatif sama.

Selain arisan, kegiatan simpan pinjam merupakan kegiatan yang menarik bagi para ibu-ibu, Sebab simpan pinjam dapat digunakan sebagai sarana pemupukan modal sekaligus akumulasi pendapatan. Walaupun menarik, pada organisasi di tingkat RT tempat tinggal penulis kegiatan ini ditiadakan, mengingat saran dari tokoh masyarakat yang juga seorang ibu. Menurut tokoh masyarakat tersebut, kegiatan simpan pinjam dapat menyebabkan anggota tidak mau hadir dalam pertemuan anggota. Sebab kalau terdapat anggota yang belum mampu mengangsur menyebabkan anggota tadi tidak hadir dalam pertemuan RT, sehingga tidak perlu diadakan. Dari saran tersebut pengurus mempunyai alternatif lain yaitu mengadakan simpan pinjam diluar pertemuan, karena banyak anggota yang menyarankan pinjaman untuk biaya sekolah anak-anak. Hasilnya adalah pengurus berusaha melakukan pendekatan terhadap tokoh panutan tersebut untuk memberikan pendapat. Hasil konsultasi ditanggapi positif dan justru beliau bersedia menjadi donatur untuk dipergunakan bagi anggota yang membutuhkan, dengan catatan tidak perlu menetapkan jumlah jasanya terserah kepada anggota dengan jalan memberikan uang sekadarnya, dan dimasukkan kotak tertutup. Setiap bulan dibuka guna penghitungan. Dana pendidikan tersebut dengan ketentuan betul-betul dipergunakan untuk kegiatan pendidikan ditunjukkan dari nota atau SPP. Setelah berlangsung waktu kurang lebih dua tahun dana tersebut telah berkembang.

Ternyata bagi ibu-ibu yang tidak memiliki anak bersekolah juga membutuhkan. Oleh karena keterbatasan jumlah dana maka, pengurus sepakat mencoba membuat sumber lain dengan nama “dana serbaguna”. Setelah dibicarakan dengan tokoh tersebut diatas, tokoh tersebut akan menyerahkan sejumlah dana lagi. Terserah ibu-ibu pengurus untuk mengelolanya. Jasa tidak ditentukan, angsuran maksimal 5 kali. Jadi bukan simpan pinjam melainkan pinjaman bergulir.

Organisasi perempuan lainnya pun melaksanakan usaha simpan pinjam dengan ketentuan jumlah simpanan wajib bervariasi ada yang 100,-, ada yang model saham 5000-10000,-. Cara meminjam, jumlah uang terkumpul ditawarkan kepada anggota. Apabila yang membutuhkan banyak, maka dibagi atau sesuai permintaan. Jika yang membutuhkan tidak ada atau tidak banyak maka ditawarkan secara bergiliran. Angsuran rata-rata selama 5 kali atau lima bulan. Apabila setelah melampau belum lunas maka akan dijadikan pinjaman baru, konsekuensinya akan dimintakan bunga baru. Sumber modal pinjaman berasal berbagai sumber yaitu masyarakat, pemerintah dan anggota.

c. Menjadi Pengurus Simpan Pinjam dan Pemakai jasa

Menjadi pengurus simpan pinjam selama 6 tahun, cukup mendapat pengalaman. Sebetulnya telah terjadi pergantian kepengurusan. Akan tetapi setelah pergantian justru banyak masalah akibat pelayanan yang kurang memuaskan. Anggota merasa bahwa pelayanan pengurus baru seperti majikan dan buruh. Dan selalu diomongkan dimuka umum. Saat di warung, ditagih. Saat dijalan ditagih. Mau pinjam uang belum dihitung. Akibat dari pelayanan yang kurang memuaskan tersebut, anggota mengancam akan membubarkan diri dan menarik semua simpanannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus mengambil inisiatif melaksanakan pemilihan pengelola simpan pinjam.

Kemudian hasil musyawarah pada saat pertemuan rutin terpilihlah pengelola simpan pinjam pada periode sebelumnya sampai sekarang mengelola uang tersebut.

Pada awalnya anggota menyimpan uang sebagai saham sebesar Rp1000,-. Dan simpanan wajib sebesar Rp100,- per bulan. Anggota dapat meminjam minimal 10.000 dan maksimal 50.000,-. Saat ini minimal pinjaman 50.000, maksimal pinjaman mencapai 400.000,- . Angsuran 5 kali dengan jasa 2 persen per bulan.

Mengurus simpan pinjam harus dapat memahami karakter peminjam. Harga diri anggota harus dijaga dan dapat memahami kesulitan anggota. Apabila terdapat anggota yang sulit ditagih, anggota lain berusaha memberitahu dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati. Pada saat kondisi masyarakat mengalami kesulitan ekonomi seperti saat ini, para ibu melaksanakan strategi penghematan. Mereka Lebih baik meminjam sedikit tapi bisa mengangsur daripada pinjam banyak tetapi tidak bisa mengangsur. Ditawari tambahan pinjaman sebesar 50.000,- atau 20.000 mereka tidak mau.

Bagi ibu yang menunggak , sebagian hadir pada saat pertemuan rutin dan mereka mengatakan belum bisa mengangsur. Namun adapula yang malu, dan tidak datang pada saat pertemuan rutin.. Cara penanganan terhadap ibu-ibu tersebut antara lain menemui langsung untuk datang dan mengangsur semampunya.

Sebagai pengguna jasa simpan pinjam, penulis dapat meminjam di pengurus PKK RW sebesar RP50.000,- sampai Rp 200.000,-. Tidak dapat menambah lebih banyak, karena setelah terkumpul jasanya, umumnya dipergunakan untuk membeli seragam.

d. Kesalahpahaman Antar Anggota

Dalam berorganisasi kadangkala terjadi kesalahpahaman antar anggota dan pengurus. Hal ini dapat disebabkan masalah pribadi yang sebelumnya sudah ada. Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan salah satu selalu tidak benar. Salah satu contoh: seorang kader tidak datang karena bersamaan tanggalnya dengan kegiatan kader di kelurahan, pada saat kader bisa hadir dapat arisan salah seorang anggota mengatakan arisan tidak usah diberikan karena dianggap tidak rajin datang. Dalam pertemuan itu menjadi sedikit percecokan antara kader dan anggota. Dalam masalah tersebut, pengurus/ketua meminta kepada penulis untuk menjadi penengah. Pada pertemuan bulan berikutnya penulis hadir dan memberikan penjelasan, serta mengharapkan masalah tersebut tidak terulang lagi.

Sering terjadi salah paham antar kader. Kader yang junior menganggap kader yang lebih senior tidak dapat apa-apa. Kalau memberikan penjelasan kepada anggota malah membingungkan. Kan kader yang merasa lebih senior dikatakan tidak bisa apa-apa, merasa sakit hati. Seperti ungkapan kader senior: “Kulo pancen wong bodho, mboten saget omong kados ibu niku, nanging nyatane kelurahan tekan sepriki masrahke gawean dhateng kulo sanes piyambakipun”. Dalam bahasa Indonesia :”Saya memang orang bodoh, tidak dapat bicara seperti ibu itu, tetapi kenyataannya kelurahan sampai saat ini memberi tugas kepada diri saya bukan kepada dia”. Apabila terjadi kesalahpahaman, penulis mendengarkan

permasalahan dan sebagai jembatan untuk menjelaskan duduk permasalahan. Oleh karena kader yang saling berselisih merasa benar, maka jalan tengah yang dilakukan penulis adalah menetralkan permasalahan dengan cara diskusi menyadarkan kepada kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk bisa saling memahami hal tersebut.

e. Kader yang Rajin dan Malas

Dalam organisasi perempuan di tingkat lokal, kader merupakan istilah untuk anggota yang aktif membina dan menggerakkan masyarakat sebagai wakil kegiatan di tingkat kelurahan/waga. Kader memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mengikuti kegiatan organisasi di tingkat kelurahan. Ada beberapa ibu kader yang aktif di tingkat kelurahan. Apakah karena getolnya mengikuti kegiatan di kalurahan, tidak atau memahami tugas pokok dan kewajibannya, sebab setiap ada kegiatan di kalurahan yang diluar tugasnya beliau selalu hadir. Dalam masalah ini kader lain pun mempertanyakan, sehingga apa saja merasa lebih tahu tentang segala sesuatu yang perlu diinformasikan ke masyarakat. Hal ini yang menyebabkan tugas kader lain merasa diambil, sehingga enggan menginformasikan hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Selain ada yang rajin, ada kader yang malas. Karena kesibukannya di kantor dan keluarga, menyebabkan kader tersebut tidak ada waktu untuk menghadiri kegiatan di kelurahan. Akibatnya mereka mendapat penilaian yang kurang baik, sehingga kadang-kadang informasi bagi warga agak terlambat dan apabila ada bantuan menerima yang paling akhir. Ungkapan kader yang jarang datang pada acara pertemuan bulanan di kelurahan sebagai berikut: “Pun kajenge dinilai kesed, soale akeh gawean kantor, undangan kelurahan sok lali lan awak kesel “(bahasa Indonesia: Biarkan dinilai malas, sebab banyak pekerjaan di kantor, undangan dari kelurahan kadangkala saya lupa dan badan capai).

f. Memperingati HUT Indonesia

Melaksanakan kegiatan perayaan HUT kemerdekaan, merupakan saat yang menyenangkan bagi ibu-ibu, acara santai dan menghibur mewarnai kegiatannya. Olahraga merupakan salah satu acara yang disarankan ibu-ibu, dan biasanya diadakan di halaman tanah milik warga dekat sebuah sungai kecil. Namun saat ini tidak ada ada tempat untuk melakukan olahraga, karena lapangan tersebut telah dibeli warga untuk pengembangan usahanya. Sehingga cara lain yang ditempuh adalah melakukan olahraga jalan santai mengelilingi wilayah beberapa RW sambil menikmati sisa-sisa sawah penduduk yang mulai terkikis dengan pembangunan perumahan penduduk.

Selain itu lomba cerdas cermat untuk para lanjut usiapun membuat senang hati ibu-ibu karena penuh gelaktawa. Alat untuk setiap grup sebagai tanda menggunakan *blek* kaleng roti, piring maupun ember. Yang penting suara berbeda dan alat pemukul berupa sendok. Materinya bahasa jawa, agama maupun hitungan sederhana. Menggunakan kerudung (jilbab) juga dilombakan karena merupakan pakaian yang sering digunakan ibu-ibu. Setiap tahun jenis lomba berbeda-beda

g. Mbah Pawiro yang Energik

Ibu yang sudah berusia lanjut tetapi memiliki keahlian dalam menanak nasi dalam jumlah banyak, menjadikan ibu Pawiro sering diundang oleh warga untuk membantu saat hajatan. Karena setia dengan tugasnya, kadangkala simbah ini tidak mau menolak tugas yang diminta tetangga. Akibatnya sering-sering sakit. Keluarganya pun sudah mengingatkan tetapi ia tetap menjalankannya. Untuk itu selaku anggota PKK, maka pengurus berusaha untuk menyampaikan pesan dari keluarga untuk mengurangi kegiatannya. Saat ini beliau sudah jarang melakukan hal tersebut yang telah ditekuni sejak usia mudanya dan menikmati kegiatannya membuat kipas. Ia sangat aktif tidak mau diam. Kegiatan lansia selalu diikuti.

h. Mbak Minah : Pekerja Keras dan Beban Ekonomi

Ia tidak mau menerima kartu askes dari pemerintah karena merasa tidak mendaftarkan diri dan gengsi dianggap tidak mampu atau miskin. Hal ini menjadikan permasalahan dalam menyelesaikan petugas/kader yang menangani jaminan kesehatan. Tetapi seminggu setelah menolak ia merasa membutuhkan. Sosok ini sangat kontroversial. Sebab mbak Minah setiap pagi bangun jam 03.00 memasak bergedel untuk dititipkan di beberapa warung. Setelah menitipkan bergedel, ia belanja dagangan ke pasar besar untuk dijual di warung sewaanannya di pasar Telo Karangajen. Sebagai ketua Dasawisma ia selalu memimpin pertemuan anggota, membicarakan segala ihwal kegiatan anggota. Karena dalam dasawisma ini beberapa anggota juga sebagai keluarganya, kadangkala ejekan dan kata-kata kurang baik dilontarkan anggota keluarganya, karena ia sebagai menantu dan ipar yang bekerja keras menghidupi keluarganya sehingga dianggap lebih dominan dibanding suaminya. Seolah-olah anggota keluarganya meremehkan kemampuannya. Iapun tenang-tenang saja tetap percaya diri.

i. Suami yang Rajin Tetapi Ringan Tangan .

Seorang suami yang rajin mencari nafkah, sangatlah membahagiakan keluarga. Namun apabila suami yang rajin tetapi ringan tangan, sangatlah menyusahkan keluarga terutama isteri. Seorang anggota PKK mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Perlakuan itu sering dilakukan di dalam rumahtangga. Namun anggota tersebut berusaha untuk menyembunyikan dan merasa malu. Semakin tak tahan dengan perlakuan suaminya yang menjadi-jadi, ia melarikan diri keluar dari rumah, dan ternyata diluar rumahpun istrinya diperlakukan sangat kasar. Hal tersebut diketahui oleh tetangga sekitar. Para tetangga berpendapat, hal itu masalah pribadi rumahtangga, sehingga merasa tidak etis untuk campur tangan. Hal tersebut diulang-ulang akhirnya, kondisi anggota secara fisik menunjukkan kesakitan, akhirnya pengurus bertindak dengan jalan mengajak salah satu tokoh masyarakat yaitu seorang bapak menemui pasangan tersebut, untuk membicarakan masalahnya agar tidak terulang. Ternyata pada saat pengurus datang, sang istri menunjukkan tekanan jiwa yang berat . Disinalah penulis dan ketua PKK serta tokoh masyarakat melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh suami anggota tersebut dengan mengatakan bahwa sang isteri kerasukan mahluk halus penunggu pohom mangga, sehingga harus ditangani.

Hari berikutnya anggota tadi lari dari rumah dan minta perlindungan. Karena sepengetahuan penulis terdapat lembaga yang menangani korban kekerasan pada perempuan, maka ia antarakan ke lembaga tersebut untuk melapor masalah tersebut. Setelah didata dan diberikan beberapa saran, maka salah satu sarannya agar melaporkan kepada polisi. Atas saran polisi dengan memberikan beberapa pertimbangan, polisi di Polsek menyarankan melaporkan di tingkat kelurahan, karena ada petugas yang menangani masalah tersebut. Pada akhirnya berdasarkan berbagai saran dan pertimbangan, ibu tersebut kembali ke rumah orangtuanya dengan membawa dua anak, sedangkan anak yang sulung tetap tinggal bersama bapaknya. Kadang-kadang saja ia ke rumah suaminya. Karena jarang diberi nafkah, ia memutuskan mencari nafkah sebagai penjual sayuran keliling.

j. Bernyanyi dan Menembang

Potensi diri yang dimiliki para ibu memerlukan penyaluran dan pengembangan. Sebab tanpa wadah mereka tidak dapat berkembang. Salah satu berkesenia adalah kelompok qosidah. Masyarakat muslim di kampung penulis telah terbiasa mendengarkan lagu-lagu qosidah dan telah terbiasa pula membaca alquran. Adanya pelatih di lingkungan tempat tinggal penulis mendorong kemunculan kesenian yang dilakukan oleh ibu-ibu yang tergabung menjadi dua kelompok. Cukup eksis karena mereka senang dapat menghibur diri dan dapat tampil di acara pengajian atau pertemuan keagamaan yang memang sering dilakukan di kampung penulis. Jika anggota tidak aktif tidak diperkenan tampil. Sebab ada anggota yang hadir menjelang pentas saja. Karena ada yang anggota yang mengingatkan tentang kehadirannya, maka anggota yang hanya hadir saat menjelang pentas akhirnya mengundurkan diri.

Selain bernyanyi, saat ini para ibu berusia lanjut dan sebagian ibu muda belajar menembang (Jawa). Hal ini dapat terlaksana karena melihat potensi warga berkesenian jawa, yang sudah lama di tinggalkan karena tidak diminati lagi oleh sebagian besar warga kampung. Selain itu masih ada seorang warga yang sudah berusia lanjut dan memiliki pengalaman mengajarkan berbagai cabang seni Jawa seperti menari, menabuh gamelan, kethoprak dan menembang. Maka ibu-ibu yang menjadi pengurus kegiatan lansia dan perempuan mengangkat potensi tersebut menjadi salah satu agenda kegiatan organisasi. Walaupun relatif masih awal, hasil berkesenian itu telah ditampilkan dalam acara memperingati HUT kemerdekaan ke 60.

k. Mbak Mar : Dari Pembantu Menjadi Pemimpin

Mbak Mar merupakan sosok yang menarik. Sebab perubahan status sosialnya membawa mbak Mar menjadi sorang pemimpin organisasi perempuan di di tingkat RW. Sebelumnya ia adalah seorang pembantu rumahtangga yang berasal dari sebuah desa di kabupaten Gunung Kidul. Setelah beberapa waktu bekerja ia dipersuntunting oleh jejaka dari kampung ini. Jadilah mbak Mar warga di kampung ini, dari migran menjadi bukan migran. Ia aktif mengikuti kegiatan organisasi perempuan dan ia mempunyai banyak usul. Maka pada saat pergantian pengurus beliau di pilih menjadi ketua Apsari. Semua pengurus

memberikan semangat, kepada mbak Mar yang dipilih secara demokratis memperoleh suara terbanyak.

Usai pertemuan, anggota yang tidak memilih mbak Mar mempertanyakan kemampuannya. Setiap ada suara yang tidak enak, mbak Mar menyempatkan diri berkunjung untuk konsultasi. Kepercayaan dirinya mengalami pasang surut. Saran penulis, semua suara supaya ditampung dan justru yang menyebabkan kurang harmonisnya situasi organisasi supaya ditinggalkan. Yang penting organisasi berjalan dan selalu belajar. Jadilah sekarang Mbak Mar yang tahan terhadap gunjingan dan semakin arif memimpin anggotanya. Pendidikan mbak Mar adalah SD, beranak dua, suaminya sopir angkutan rongsok yang banyak diusahakan oleh sebagian warga kampung. Saat ini ia tetap bekerja sebagai pembantu rumahtangga di daerah Karangajen, dia tidak minder lagi, percaya diri meningkat..

Penutup

Organisasi perempuan dalam lingkungan wilayah yang terkecil merupakan sarana untuk meningkatkan kemandirian perempuan (*self reliance*). Kemandirian tersebut dalam rangka mewujudkan harapan sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga. Melalui pendekatan beberapa macam seperti pemberdayaan, kesejahteraan, efisiensi maupun keadilan merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya,

Berbagai status sosial ekonomi perempuan yang mengikuti organisasi di kampung menuntut kearifan dalam pemberdayaannya. Karakteristik model organisasi yang telah ada, yang sifatnya terbuka, hubungan-hubungan informal sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi perempuan. Namun dari segi pengembangan perlu kreativitas dari pengurus dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap pengembangan potensi perempuan dalam pembangunan.

Penggunaan teknik-teknik pengorganisasian perlu dilakukan inovasi, sehingga keterlibatan anggota masyarakat lain terutama kaum bapak dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan dapat secara nyata diwujudkan guna mengembangkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menerima perubahan yang semakin cepat.

Referensi

- Hardjito, Didiet, (2001), *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*, Jakarta: Rajin Grafindo Persada.
- Priyono, Onny S. (1996), "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Mitra Seajar Pria", dalam *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Onny S.priyono dan Pranarka, A.M.W. Jakarta: CSIS.
- Manullang, M. (2002), *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner, (1997), *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Kalyamitra.

Sutopo, (2000), *Administrasi, Manajemen Dan Organisasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S. (1949), *Logat Kecil Bahasa Indonesia*, Djakarta/Batavia:J.B.Wolters Uitgevermaatschappij.

Yasin, Muhammad. (1982), *Organisasi Dan Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara.

Bab 6

RELEVANSI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DALAM UPAYA MEMBERDAYAKAN TENAGA KERJA DESA

Dipersiapkan oleh: Drs. Hastowiyono, M.S

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menghadapi masalah kemiskinan dengan segala kompleksitasnya. Sejak pemerintahan orde baru terutama mulai tahun 1970-an sangat gencar dikumandangkan upaya-upaya mengatasi kemiskinan. Dengan bertumpu pada slogan pembangunan segala upaya dikerahkan untuk maksud tersebut. Politik ekonomi terbuka dengan modal asing sebagai panglima pembangunan, namun pengangguran dan kemiskinan tetap saja menumpuk dari hari ke hari.

Sudah menjadi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia berada di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Susenas tahun 1990 sebesar 72,72% jumlah orang miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan dan 37,28% sisanya berada di kota (BPS, 1990). Kondisi tersebut diperburuk oleh krisis multidimensi yang terjadi dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah pemulihan. Menurut catatan World Bank, persentase kemiskinan naik dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 20,3% pada tahun 1998 (World Bank; 2000: 280).

Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya agar terjadi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, tetapi mengapa sampai saat ini desa tetap saja miskin? Apakah kemiskinan yang dialami warga masyarakat pedesaan itu berhubungan erat dengan keadaan ketenagakerjaannya? Strategi pembangunan seperti apa yang sekiranya lebih sesuai dikembangkan untuk memberdayakan tenagakerja desa? Melalui tulisan ini pertanyaan-pertanyaan itu akan dicoba untuk menemukan jawabnya.

Dinamika Kependudukan Desa

Dipandang dari sudut demografis, Indonesia tampak mengalami kemajuan yang cukup spektakuler. Kemajuan itu tampak dari tingkat/laju pertumbuhan penduduk yang secara konsisten mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hasil sensus penduduk menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama periode 1990-2000 rata-

rata sebesar 1,49 persen per tahun. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk satu dekade sebelumnya (1980-1990) sebesar 1,97 persen per tahun. Penurunan laju pertumbuhan penduduk secara nasional ini diyakini merupakan dampak dari menurunnya tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas (terutama mortalitas bayi dan anak). Berdasarkan perhitungan *World Bank* (2000: 286), Indonesia berhasil menurunkan Tingkat Fertilitas Total (Jumlah Kelahiran yang dimiliki Wanita atau Ibu sepanjang masa Reproduksi) dari 4,3 pada tahun 1980 menjadi 2,7 pada tahun 1999. Begitu pula Tingkat Mortalitas Bayi menurun dari 90 jiwa/1000 kelahiran pada tahun 1980 menjadi 43 jiwa/1000 kelahiran pada tahun 1999. Selain karena penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas, terlepasnya Timor-Timur dari Republik Indonesia juga sedikit menyumbangkan penurunan laju pertumbuhan penduduk (sekitar 750 ribu jiwa).

Apabila laju pertumbuhan penduduk selama periode 1990-2000 di desa diperbandingkan dengan kota, ternyata laju pertumbuhan penduduk desa mengalami penurunan hingga angka minus, sedangkan kota mengalami laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia (tanpa Timor-Timur) sebanyak 123.115.716 jiwa untuk desa dan 55.330.950 jiwa untuk kota, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 115.861.372 jiwa untuk desa dan 85.380.627 jiwa untuk kota. Berarti laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun untuk desa sebesar **-0,61** persen dan kota **4,43** persen. Tanpa mengingkari adanya penurunan fertilitas penduduk desa sebagai keberhasilan Program Keluarga Berencana, merosotnya pertumbuhan penduduk desa dan melonjaknya pertumbuhan penduduk kota tersebut diyakini lebih banyak diakibatkan karena proses urbanisasi; baik dalam pengertian perpindahan penduduk desa ke kota maupun proses meng"kota" nya desa. Dalam kaitannya dengan fenomena urbanisasi ini, Prijono (2003:29) berpendapat bahwa, walaupun kehidupan di kota-kota besar kurang menyenangkan, tetap saja penduduk kota akan bertambah. Bukan semata-mata disebabkan oleh arus perpindahan dari desa ke kota seperti yang terjadi pada akhir dasawarsa 1970-an, tetapi karena pemekaran kota itu sendiri. "Pencaplokan" atau *anexisasi* daerah-daerah pinggiran kota telah menyebabkan penduduk desa pinggir kota menjadi "penduduk kota" yang sesungguhnya.

Jumlah penduduk merupakan sumber dari ketersediaan tenaga kerja. Dengan demikian menurut logika sederhana, menurunnya jumlah penduduk di daerah pedesaan tentu diikuti menurunnya jumlah angkatan kerja. Berkurangnya jumlah penduduk sampai

tingkat tertentu memang dapat berhubungan langsung dengan penurunan jumlah angkatan kerja, akan tetapi yang terjadi di daerah pedesaan Indonesia tidak demikian.

Situasi Angkatan Kerja Desa

Secara garis besar penduduk dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan penduduk yang melakukan aktifitas ekonomi (bekerja atau mencari pekerjaan) dan bagian kedua terdiri dari penduduk yang tidak melakukan aktifitas ekonomi. Dengan kata lain, kelompok penduduk bagian pertama merupakan pencari nafkah dan bagian kedua merupakan penduduk penerima nafkah. Dalam Studi Kependudukan golongan penduduk pencari nafkah ini lebih dikenal dengan istilah angkatan kerja, sedangkan golongan penduduk penerima (bukan pencari) nafkah disebut bukan angkatan kerja. Biasanya definisi angkatan kerja yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan meliputi penduduk yang telah memasuki usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas) yang secara nyata memiliki pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab (misalnya sakit, cuti, menunggu panen) dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumahtangga dan orang-orang yang tidak ingin atau tidak mampu bekerja didefinisikan sebagai bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja atau tenaga kerja desa merupakan bagian penduduk di wilayah pedesaan yang telah dan akan menanggung beban ekonomi penduduk secara keseluruhan. Mereka ini yang melakukan aktifitas produksi (baik barang maupun jasa) untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri beserta keluarganya.

Untuk memperoleh gambaran situasi angkatan kerja di daerah pedesaan, maka dalam tulisan ini pengertian angkatan kerja menggunakan definisi dari BPS (2001); yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu (terhitung pada saat sensus dilakukan) mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab; dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah angkatan kerja desa tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk desa. Seperti telah disebutkan, laju pertumbuhan penduduk desa pada periode 1990-2000 menunjukkan angka minus (berarti jumlah penduduk berkurang), akan tetapi jumlah

angkatan kerjanya justru bertambah. Hasil sensus penduduk menunjukkan jumlah angkatan kerja desa pada tahun 1990 tercatat sebanyak 53.707.148 jiwa kemudian meningkat menjadi 59.134.517 jiwa pada tahun 2000. Berarti selama satu dasa warsa ini jumlah angkatan kerja desa bertambah sebanyak 5.427.369 atau laju pertumbuhannya 0,97 persen per tahun. Kalau dilihat dari jumlah pencari kerja (pengangguran terbuka), data SP-1990 dan SP-2000 menunjukkan pada tahun 1990 sebanyak 1.118.559 jiwa dan pada tahun 2000 sebanyak 2.445.411 jiwa. Angka-angka ini menggambarkan selama sepuluh tahun jumlah pengangguran terbuka di desa menjadi lebih dari 2 kali lipat (218.62%). Perlu diketahui bahwa batasan umur untuk menggolongkan penduduk sebagai angkatan kerja yang digunakan pada SP-1990 lebih muda (10 tahun) daripada SP-2000 (15 tahun). Tentunya peningkatan jumlah pengangguran terbuka di desa akan lebih tinggi lagi jika batasan umur yang diperhitungkan dalam SP-2000 sama dengan yang digunakan dalam SP-1990.

Situasi angkatan kerja di desa lebih diperburuk lagi dengan adanya setengah pengangguran, terutama *setengah pengangguran terpaksa*. Dengan menggunakan kriteria jam kerja kurang dari 35 jam/minggu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan persentase *setengah pengangguran terpaksa* cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2000 dan 2001 masing-masing sebesar 15 persen, kemudian meningkat menjadi 17 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 18 persen pada tahun 2003. *Setengah pengangguran terpaksa* ini paling banyak terjadi (sekitar 80 persen) pada lapangan usaha sektor pertanian. Sebenarnya mereka ini (baik petani maupun non-petani) mengharapkan atau secara aktif telah mencari tambahan pekerjaan, namun terpaksa tidak atau belum diperoleh yang disebabkan karena banyak hal. Keadaan ini menggambarkan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia di desa. Secara kuantitas sektor pertanian memang mampu menampung tenaga kerja yang banyak jumlahnya, tetapi sifat pekerjaan di sektor pertanian tidak memerlukan durasi waktu rutin harian yang panjang. Apalagi dari waktu ke waktu rata-rata luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga petani semakin sempit, sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan apa saja secara serabutan untuk menambah jam kerjanya. Apalagi bagi orang-orang desa yang tak bertanah, pekerjaan serabutan merupakan alternatif terdekat yang terpaksa harus mereka pilih.

Tabel 1
Komposisi Angkatan Kerja Desa di Indonesia
menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2000

Pendidikan Tertinggi	Bekerja (%)			Mencari Pekerjaan (%)			Seluruh Angkatan Kerja		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TidakTamat SD	28.11	36.49	31.72	9.48	13.95	11.38	27.34	35.57	30.87
Sekolah Dasar	47.33	45.96	46.74	39.08	39.48	39.25	46.99	45.69	46.43
SLTP	12.37	9.65	11.20	24.34	20.88	22.87	12.87	10.11	11.69
SLTA	10.48	6.68	8.85	24.76	22.63	23.86	11.08	7.33	9.47
Diploma I & II	0.57	0.51	0.55	0.53	0.76	0.63	0.57	0.52	0.55
Diploma III	0.36	0.26	0.31	0.56	0.78	0.66	0.36	0.28	0.33
Universitas	0.75	0.43	0.61	1.22	1.47	1.33	0.77	0.47	0.64
Tak Terjawab	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, 2001

Kalau ditinjau dari kualitas angkatan kerja, dalam hal ini menggunakan indikator pendidikan yang ditamatkan, terbukti bahwa kualitas angkatan kerja desa sebagian besar masih rendah. Hal ini terbukti dari sekitar 77 persen dari jumlah seluruh angkatan kerja berlatar belakang pendidikan tidak tamat SD dan sebagian lagi hanya tamat SD (lihat Tabel 1).

Ada empat faktor, baik struktural maupun kultural, yang kemungkinan menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja desa:

Pertama, rumahtangga-rumahtangga di desa sebenarnya menginginkan anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan orangtuanya, namun kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan kemampuan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi tidak terjangkau. Persoalannya tidak ada sekolah tanpa biaya, terutama untuk SLTP ke atas, sedangkan kemampuan ekonomi rumahtangga sangat terbatas. Di sisi lain, ada kebutuhan yang tak mungkin ditunda, yaitu kebutuhan makan. Itu sebabnya bagi rumahtangga desa yang tergolong miskin lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan makan daripada pendidikan bagi anak-anaknya.

Kedua, penduduk desa yang berpendidikan lebih tinggi banyak yang meninggalkan desanya untuk bekerja di kota, sehingga yang tertinggal di desa pada umumnya yang berpendidikan relatif rendah. Bagi rumahtangga yang secara ekonomi tergolong mampu, dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi, ada ketimpangan peluang kerja yang cukup menyolok antara desa dengan kota. Peluang kerja di luar sektor pertanian yang memerlukan tenaga kerja

terampil (berpendidikan lebih tinggi) dan lebih menjanjikan penghasilan lebih tinggi banyak terpusat di kota. Untuk merespon ketimpangan ini, maka setelah memperoleh pendidikan yang tinggi, mereka berbondong-bondong pergi meninggalkan desanya untuk mengadu nasib di kota

Ketiga, sikap orangtua yang masih bias jender dalam pemberian kesempatan pendidikan, anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi daripada saudara perempuannya. Sebagian terbesar masyarakat Indonesia masih memegang teguh pandangan bahwa kaum laki-laki berposisi sebagai pemimpin dan penanggungjawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, anak laki-laki lebih diprioritaskan untuk dapat bersekolah sampai tingkat yang lebih tinggi agar kelak memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun rumahnya. Sementara itu, dalam perkembangannya banyak kaum perempuan yang terdorong untuk memasuki dunia kerja, meskipun dengan latar belakang pendidikan yang umumnya lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, struktur angkatan kerja desa semakin diwarnai oleh pendidikan yang rendah.

Keempat, menurunnya minat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat yang lebih tinggi (terutama ke perguruan tinggi) karena kurangpercayaan masyarakat terhadap perolehan pekerjaan yang lebih baik seperti yang diharapkan. Pada umumnya masyarakat desa memiliki pandangan bahwa nilai warisan yang lebih berharga untuk diberikan kepada anak-anaknya adalah berupa kepandaian atau kecakapan untuk mencari penghidupan. Pandangan ini mengasumsikan bahwa kepandaian itu tidak akan hilang tetapi justru akan bertambah. Masa depan anak harus lebih baik daripada orangtuanya. Anak diharapkan dapat *memperoleh* pekerjaan yang “bersih” (menjadi pegawai atau karyawan) dengan gaji yang tinggi, tidak seperti orangtuanya yang setiap hari berkutat dengan tanah dan lumpur. Salah satu strategi yang ditempuh untuk menggapai cita-cita itu dengan cara memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang setinggi-tingginya. Jika perlu, sawah-ladang rela dijual untuk membiayai pendidikan anak. Akan tetapi, melihat perkembangan situasi yang sering terjadi banyak kaum berpendidikan yang terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipersepsikan tidak sesuai atau tidak pantas menurut predikat pendidikan yang disandangnya. Kejadian semacam ini telah dianggap sebagai kegagalan dunia pendidikan yang tak mampu memenuhi harapannya, sehingga minat orangtua untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang lebih tinggi menjadi berkurang. Dalam hal ini, tampaknya dunia pendidikan di Indonesia ikut andil kekeliruan dalam arah

pendidikan. Banyak reklame-reklame perguruan tinggi yang sengaja membentuk persepsi masyarakat bahwa “setelah lulus perguruan tinggi akan mudah *memperoleh* pekerjaan”, entah pekerjaan di sektor pemerintahan ataupun di perusahaan swasta. Reklame semacam ini jelas tidak mendorong masyarakat untuk bekerja mandiri.

Rendahnya pendidikan angkatan kerja desa tentunya berkaitan dengan ketrampilan atau kecakapan, terutama dalam penguasaan teknologi, kemampuan mengelola informasi dan kemampuan manajerial. Ketiga bidang kecakapan itu lebih lanjut berhubungan dengan produktivitas tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja pedesaan yang rendah telah berhubungan sebab-akibat dengan banyaknya kemiskinan yang terjadi di desa. Penguasaan teknolgi yang rendah, transformasi pengetahuan dan kecakapan dalam sistem produksi yang alot, lemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen usaha, kesemuanya itu berhubungan erat dengan rendahnya pendidikan. Dengan keadaan semacam ini apabila dibiarkan saja akan semakin memperpuruk kehidupan masyarakat desa. Untuk itu perlu dicari solusi alternatif untuk mensubstitusi pendidikan formal ke dalam kegiatan pembelajaran yang lebih efektif untuk memberdayakan sumberdaya manusia desa.

Tabel 2
Komposisi Angkatan Kerja Desa
menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2000

Lapangan Usaha	Persentase Angkatan Kerja (khusus yg bekerja)		
	L	P	L + P
Pertanian Pangan	49.74	51.48	50.49
Perkebunan	9.60	8.98	9.33
Perikanan	2.58	0.59	1.72
Peternakan	1.02	1.13	1.07
Pertanian Lainnya	5.49	4.77	5.18
Industri Pengolahan	4.43	4.60	4.50
Perdagangan	7.41	9.47	8.30
Jasa	11.03	6.95	9.28
Angkutan	2.60	0.20	1.57
Lainnya	6.04	11.72	8.48
Tak Terjawab	0.07	0.10	0.09
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, 2001

Hal lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan desa yang perlu diketahui adalah sektor usaha yang ditekuni penduduk desa. Berdasarkan SP 2000 (lihat Tabel 2) tercatat sekitar 50 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian pangan, dan proporsinya menjadi sekitar 67 persen kalau yang diperhitungkan sektor pertanian

dalam arti luas. Di luar sektor pertanian, sektor usaha yang cukup banyak ditekuni penduduk desa adalah sektor jasa (sekitar 9 persen) dan perdagangan (sekitar 8 persen). Angka-angka ini menggambarkan bahwa sektor pertanian, khususnya pertanian pangan merupakan sektor usaha yang tidak dapat diabaikan. Sektor ini masih sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk desa. Nilai strategis dari sektor ini telah teruji pada saat terjadi krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Sebagian besar penduduk desa lebih mampu bertahan hidup karena ketersediaan pangan yang mereka produksi sendiri.

Di masa yang akan datang sektor pertanian (khususnya pertanian pangan) tentu tidak akan mampu lagi menampung pasokan tenaga kerja baru sebagai akibat lahan pertanian yang terbatas dan semakin sempit. Di sisi lain, sebenarnya banyak potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai perluasan kesempatan kerja, namun banyak mengalami kendala. Kualitas sumberdaya manusia yang belum memadai, lemahnya penguasaan teknologi, kurangnya modal, dan kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada rakyat desa merupakan kendala-kendala yang selama ini masih terjadi.

Mobilitas Tenaga Kerja dari Desa

Menurut Todaro (hal. 355-360), penduduk desa bermigrasi ke kota dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yang rasional. Migrasi dari desa ke kota merupakan respon atas perbedaan upah riil yang lebih tinggi di kota daripada di desa. Membanjirnya migran dari desa ke kota lambat laun akan membuat kota menjadi semakin padat penduduk dan memacu terjadinya pengangguran yang semakin menumpuk di kota.

Banyak peneliti (antara lain: Mantra, 1978; Kasto, 2002; Abdul Haris, 2002)) membuktikan bahwa mobilitas penduduk dari desa ke luar desa, baik ke kota maupun ke daerah lain termasuk ke luar negeri, dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota merupakan refleksi dari ketimpangan sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Apabila mengacu teori Todaro seperti tersebut di atas, maka apabila ketertinggalan pembangunan desa-desa Indonesia tidak dapat segera diatasi, maka dapat diramalkan daerah-daerah perkotaan akan tetap kebanjiran migran dari desa.

Seperti telah disebutkan, bahwa desa telah mengalami penurunan jumlah penduduk sebagai akibat banyak desa yang berubah menjadi kota dan migrasi dari desa ke kota. Migran dari desa ini menuju ke kota, bahkan ke luar negeri, berharap

memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik atau terpaksa sekedar untuk mempertahankan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya di desa. Memang banyak penelitian menemukan bukti bahwa mobilitas penduduk desa, baik nglaju maupun sirkuler, memberikan dampak positif pada kehidupan sosial dan ekonomi desa asal. Dampak ekonomi dan sosial ini terjadi melalui mekanisme remitansi. Namun demikian, yang perlu dipertanyakan adalah kemampuan kota untuk menampung luapan tenaga kerja dari desa yang terjadi secara terus-menerus? Apabila gejala urbanisasi terjadi secara terus menerus sudah barang tentu akan berakibat buruk bagi kota maupun desa. Meluapnya jumlah penduduk yang memadati kota akan berdampak negatif yang semakin kompleks; baik menyangkut kehidupan sosial, ekonomi maupun politik dan masalah kemanusiaan. Di lain pihak, desa yang semakin banyak ditinggalkan warganya yang memiliki kualitas pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik akan mengalami kehilangan semakin banyak tenaga kerja produktif yang potensial untuk membangun desa.

Pertumbuhan: Paradigma Pembangunan yang Menyesatkan

Selama puluhan tahun pembangunan Indonesia didominasi oleh paradigma pertumbuhan yang dipercaya dapat mengentaskan kemiskinan melalui jargon *trickle down effect*. Paradigma ini memandang ketimpangan sebagai kebutuhan sosial (*social necessity*), karena ketimpangan itu akan menjadi basis produksi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan yang baik baru akan tercapai setelah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang semakin membesar.

Paradigma pertumbuhan memperoleh reaksi yang keras dari beberapa pakar, karena pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mengakibatkan apa yang disebut *trickle down effect* ternyata dalam banyak hal tidak terjadi. Jadi penanggulangan kemiskinan tidak ditangani secara langsung (*direct attack*) tetapi melalui *trickle down effect*, berarti kalupun terjadi penurunan kemiskinan hanya merupakan hasil sampingan dari pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak hal yang terjadi adalah sebaliknya, justru kelompok miskin memberi subsidi kepada orang kaya.

Kritik lain terhadap paradigma pertumbuhan adalah bahwa indikator-indikator agregat (GNP, GDP) yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan tidak dapat mengungkap nasib yang dialami penduduk miskin yang merupakan anggota terbesar dari rakyat. Dalam konteks ini, Dumairy (2005) mengkritik dengan pedas bahwa

kemaslahatan tidak cukup hanya diukur dari dimensi output saja. Kemaslahatan yang diukur berdasarkan kenaikan pendapatan rata-rata per kapita, pilihan produk yang lebih beragam, atau membaiknya sarana dan prasarana kehidupan itu hanyalah merupakan penilaian output yang dapat menyesatkan. Pengukuran yang demikian itu tidak mengungkap anatomi peningkatan kemaslahatan sejati. Berbagai perbaikan kehidupan ekonomi yang ditunjukkan dengan tolok ukur klise tersebut boleh jadi hanyalah perbaikan semu, padahal di dalamnya terkandung pembusukan-pembusukan terselubung. Di balik kecerahan angka-angka statistik yang menyangkut angka pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, cadangan devisa dan sebagainya terlihat segi-segi yang mendorong keprihatinan (Moelyarto, hal. 11; 1987). Banyak industri rakyat terpaksa gulung tikar terlenda oleh banjirnya barang impor dan modal asing. Bahkan saat ini serangan sistem ekonomi pasar bebas dunia yang terbingkai dalam jargon globalisasi telah melanda sektor pertanian di Indonesia. Banyak petani yang menjadi semakin lemah lunglai sebagai akibat membanjirnya impor produk-produk pertanian sejenis dengan yang mereka hasilkan.

Mengapa pembangunan ekonomi model pertumbuhan yang mengacu teori ekonomi neo-klasik yang kapitalistik itu gagal? Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kegagalannya, yaitu: 1) kebijakan pembangunan pemerintah menjadi tidak pro-rakyat (terutama kelompok miskin); 2) pembangunan dilaksanakan secara "top-down" sehingga rakyat lebih diposisikan sebagai obyek daripada subyek pembangunan; 3) rakyat memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber-sumber pengembangan ekonomi sehingga semakin terpinggirkan dalam persaingan, 4) merebaknya praktek korupsi dan kolusi oleh pemegang otoritas negara sebagai dampak pelaksanaan sistem ekonomi yang kapitalistik.

Kalau mau belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, suatu kejadian harus diambil hikmahnya sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki diri. Demikian pula krisis yang melanda bangsa ini harus dapat diambil hikmahnya dan disikapi dengan lebih arif. Paling tidak untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam paradigma dan strategi pembangunan yang perlu dibenahi, terutama yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Sadar bahwa dengan bantuan luar, pengalihan sumber-sumber keuangan, pengalihan pengetahuan dan upaya mendatangkan tenaga ahli dari negara-negara industri ke negara-negara miskin semata-mata bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tanpa keterlibatan aktif penduduk yang mengupayakan perbaikan nasib

mereka, dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, kemiskinan akan terus menggerogoti penduduk di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Isu lokalitas mengemuka seiring dengan gerakan reformasi yang membawa semangat demokratisasi, otonomi dan desentralisasi. Dalam konteks ini, pembangunan harus dapat mendinamisasi kehidupan masyarakat yang bertumpu pada potensi-potensi lokal. Ketimbang bergantung pada bantuan dari luar, lebih baik memanfaatkan secara lebih efektif sumber-sumber lokal yang tersedia untuk kepentingan yang lebih diprioritaskan bagi rakyat. Juga ketimbang terlalu tergantung pada pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dari atas, baik pada level internasional, nasional ataupun regional, lebih baik otoritas dan organisasi-organisasi (institusi-institusi) lokal diberi peran yang lebih penting dalam proses-proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan warga desa.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Konsep pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembalikan dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang terbukti mengalami kegagalan dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkeadilan (Priyono 2003). Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan penjabaran dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang berarti pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi keperluan saat ini tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Strategi pembangunan berwawasan kependudukan dalam proses pembangunan nasional memang dalam jangka pendek akan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang menjadi "primadona" dari suatu pembangunan ekonomi. Namun dengan memperhitungkan aspek kependudukan dalam pembangunan nasional ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai akan lebih berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan memposisikan penduduk sebagai pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Jadi, pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan pada dasarnya sama dengan pendekatan pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*).

Pembangunan berwawasan kependudukan diyakini akan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Perlu diingat bahwa masalah pembangunan bukan hanya masalah ketimpangan, pengangguran, ataupun masalah kemiskinan. Menurut pandangan Denis Goulet (Moelyarto, hal. 9; 1987) pembangunan juga merupakan masalah kelangsungan hidup (*life sustenance*), kehormatan diri (*life esteem*), dan kebebasan (*freedom*). Segi ekonomi dari pembangunan tercermin di dalam konsep kelangsungan hidup. Dalam hal ini, pembangunan harus berusaha memenuhi kebutuhan sebanyak mungkin orang untuk kelangsungan hidup: pangan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. Semuanya itu bukan untuk demi mengejar akumulasi kekayaan dan materi, melainkan merupakan prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup yang layak. Semua orang harus memiliki sandang, pangan, kesehatan dan perlindungan agar dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Dengan begitu semua orang akan dapat mencapai nilai pembangunan yang memungkinkan terbangunnya kualitas diri, yakni berupa keautentikan (*authenticity*), identitas (*identity*), kemuliaan (*dignity*), kehormatan (*respect*), dan pengakuan (*recognition*). Pembangunan tidak hanya diukur dari perubahan secara material berupa kemakmuran dan meningkatnya GNP secara pesat, namun juga pengembangan manusia. Paradigma pembangunan seperti itu memberikan porsi yang besar pada manusia sebagai subyek pembangunan dan manusia sebagai bagian pokok dari pembangunan.

Strategi pembangunan berwawasan kependudukan juga memiliki paradigma yang sama dengan Strategi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan (Sistem Ekonomi Pancasila). Menurut Mubyarto (2004), ekonomi kerakyatan perlu dipahami sebagai suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi sebagian besar rakyat secara adil, manusiawi, dan demokratis. Di Indonesia, pemahaman ekonomi kerakyatan seperti itulah yang dibingkai dengan sistem ekonomi Pancasila. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kerakyatan yang pancasilais hendak mengusung semangat pengembangan ekonomi yang bermoral, berkeadilan dan beradap, nasionalis, demokratis, dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Semangat demikian ini sebenarnya berkesesuaian dengan basis moral kehidupan bangsa Indonesia, karena secara kultural semangat kebersamaan dalam berbagai aspek kehidupan sudah dimiliki bangsa ini sejak berabad-abad lamanya.

Sejalan dengan pemikiran tentang ekonomi kerakyatan tersebut, Dillon (1999) mengajukan alternatif pembangunan ekonomi berparadigma *people driven*. Paradigma ini menghendaki suatu proses pembangunan dimana semua kebijakan, kelembagaan dan teknologi yang kita rakit didorong oleh realitas kebutuhan dan kemampuan rakyat. Paradigma ini merupakan jawaban atas paradigma pembangunan yang selama ini terbukti telah mengabaikan kemampuan yang dimiliki bangsa. Melalui *people driven* proses pertumbuhan yang dicapai bersifat *growth through equity*, secara prinsip akan menyebarkan distribusi pendapatan dan sumberdaya nasional secara lebih baik dan adil, dan akan mengurangi kemiskinan secara berkesinambungan. Hal ini dapat terwujud karena proses pembangunan menuntut pencapaian pertumbuhan yang melibatkan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat terutama yang hidup di pedesaan.

Memperhatikan situasi ketenagakerjaan desa seperti telah dipaparkan, perlu dipikirkan oleh semua pihak untuk mencari jalan keluar agar warga masyarakat desa dapat keluar dari kesulitan-kesulitan kehidupan yang dialami selama ini. Tenaga kerja di daerah pedesaan tidak sepatutnya hanya dipandang sebagai faktor produksi, mereka ini adalah orang atau manusia yang harus dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sadar atas berbagai kelemahan atau kekurangan yang masih menyelimuti banyak tenaga kerja desa, maka dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional harus tetap meletakkan tenaga kerja desa sebagai subyek pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu, gagasan Pembangunan Berwawasan Kependudukan perlu menjadi acuan dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan desa. Ada tiga alasan mendasar atas gagasan ini. *Pertama*, tenaga kerja desa umumnya berpendidikan rendah dan miskin, sehingga tidak mungkin (tidak *fair*) apabila mereka ini dibiarkan bersaing dalam sistem ekonomi liberal-kapitalistik. *Kedua*, ada keyakinan bahwa desa memiliki potensi pembangunan yang besar untuk dikembangkan, namun selama ini *stakeholders* desa belum banyak yang memiliki kemerdekaan untuk berpartisipasi secara autentik dalam pembangunan. *Ketiga*, semakin banyak *stakeholders* desa yang berpartisipasi dalam pembangunan yang diikuti kualitas tenaga kerja yang semakin baik niscaya akan mendatangkan kesejahteraan yang semakin merata.

Ciri khas dari pendekatan pembangunan berpusat pada manusia atau pembangunan berwawasan kependudukan adalah sebagai berikut (Moelyarto, hal. Supriatna, hal: 140-147, 2000; Poernomo, 154-155, 2004):

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibuat ditingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipasi.
2. Fokus utama adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas sesuai dengan daerahnya sendiri.
3. Pendekatan ini memiliki toleransi terhadap perbedaan, sehingga mengakui arti penting dari keputusan individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi.
4. Dalam proses pembangunan, pendekatan ini memfokuskan pada *social learning* yang di dalam proses tersebut individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris, dan dituntun oleh kesadaran kritis individual.
5. Budaya kelembagaan ditandai dengan adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yang menandai unit-unit lokal yang mengelola dirinya sendiri, yang terintegrasi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horisontal dapat terwujud.
6. Jaringan koalisi dan komunikasi aktor lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah bank-bank pedesaan dan lain-lain akan menjadi basis tindakan-tindakan lokal yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar yang luas atas sumber-sumber dan kemampuan lokal untuk mengelolanya.

Dalam pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan, sumberdaya manusia (tenaga kerja) desa merupakan bagian integral dari berbagai proses pembangunan. Manusia yang mandiri merupakan syarat mutlak dari berjalannya sebuah proses pembangunan. Keberadaan kelembagaan lokal (desa) dan berbagai pendekatan yang langsung ke grassroots memberikan peluang pada pengembangan sumberdaya manusia desa sebagai pelaku pembangunan yang sebenarnya.

Strategi Pemberdayaan Ketenagakerjaan Desa

Mengacu konsep pembangunan berwawasan kependudukan di atas, maka perlu diupayakan secara serius berlangsungnya pembaharuan desa yang diharapkan berdampak pada terciptanya kualitas tenaga kerja desa yang memadai. Tujuan utama pembangunan tertuju pada manusianya, bukan terfokus pada pengejaran produktifitas barang atau jasa. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi lebih efektif apabila dilakukan melalui pemberdayaan tenaga kerjanya. Pemberdayaan tenaga kerja desa akan menghasilkan kualitas tenaga kerja yang handal, selanjutnya dengan terciptanya kehandalan tenaga kerja desa dengan sendirinya akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktifitas.

Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan desa, pemberdayaan ekonomi rakyat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian terbesar rakyat Indonesia. Untuk itu, strateginya berpusat pada upaya mendorong percepatan transformasi struktural yang memperkuat kedudukan dan peranan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Transformasi struktural yang dimaksud meliputi perubahan dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dan dari ketergantungan menuju kemandirian (Sumodiningrat, hal. 29-31, 1999; Supriatna, hal. 139-147, 2000; Poernomo, hal: 150-151; 2004).

Mengingat situasi ketenagakerjaan di daerah pedesaan yang masih diliputi banyak kelemahan, maka untuk mencapai transformasi struktural tersebut harus ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan asset produksi (*production assets*). Yakni memberikan ruang yang lebih luas pada petani miskin untuk dapat mengakses lahan tanah yang mulai sempit dan mencegah adanya monopoli lahan. Selain itu, dorongan diversifikasi, penggunaan sistem *mixed farming* dan penciptaan teknologi agroindustri sangat diperlukan.
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan. Hal ini berarti perlu bagi petani untuk menggalang kekuatan guna dapat meningkatkan pemupukan modal. Kemitraan guna memperoleh efisiensi usaha mutlak diperlukan.
3. Peningkatan pengembangan industri berbasis rakyat. Artinya prioritas ditekankan pada industri kecil dan menengah yang dapat menampung sebagian besar masyarakat desa. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat. Industri rakyat yang banyak terdapat di pedesaan harus

didorong untuk berkembang menjadi industri-industri kecil dan menengah yang kuat sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

4. Kebijakan ketenagakerjaan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai *embrio* wirausaha baru yang diharapkan berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat. Untuk itu, secara luas harus diselenggarakan pelatihan ketrampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara memperoleh pendanaan. Bagi mereka harus disediakan sistem pendanaan seperti kredit yang syarat-syarat dan biayanya diperingan, modal ventura, guarantee fund dan sebagainya.
5. Pemerataan pembangunan antar wilayah dan daerah. Dengan demikian kesempatan untuk mengembangkan ekonomi rakyat bukan hanya di daerah yang sudah relatif maju melainkan juga bagi daerah-daerah yang masih tertinggal. Perlu juga diingat bahwa karakteristik desa-desa di Indonesia memiliki keragaman sumberdaya alam, budaya, dan tingkat ekonomi penduduknya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi setempat sehingga dapat mendorong berkembangnya perekonomian lokal.
6. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini sumberdaya manusia termasuk petani dan nelayan sebagai subyek pembangunan terbesar dari komposisi penduduk desa harus mendapat porsi besar dalam program pembangunan. Tugas utama pendidikan adalah peningkatan sumberdaya manusia. Pendidikan non-formal (pelatihan-pelatihan) lebih cocok bagi masyarakat miskin dan sumberdaya manusia miskin, peningkatan keahlian pada penguatan teknologi lokal, serta peningkatan keswadayaan lokal dalam menggali kearifan lokal. Meski demikian, pendidikan umum sebagai jalur pendidikan yang mapan juga harus mendapatkan porsi yang besar. Pelayan kesehatan juga tak kalah pentingnya dengan pendidikan. Tersedianya tenaga kerja desa yang sehat lebih menjamin produktifitas kerja yang lebih tinggi dan akan melahirkan generasi yang sehat pula. Semakin baik pendidikan dan kesehatan tenaga kerja desa lebih memungkinkan tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup dalam aspek yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Dengan demikian, perubahan struktur ekonomi di daerah pedesaan bagaimanapun tidak bisa lepas dari sumberdaya manusia yang mendukungnya. Tanpa kekuatan sumberdaya manusia yang memadai maka pembangunan tidak dapat memberikan

pondasi yang kokoh bagi pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses transformasi struktural sebagaimana telah disebutkan, maka perbaikan pendidikan bagi tenaga kerja desa merupakan suatu keharusan.

Pendidikan yang dimaksud bukanlah semata-mata pendidikan formal, melainkan meliputi pendidikan non-formal. Bentuk-bentuk pelatihan dan pendidikan lapang dipandang lebih cocok untuk diterapkan di kalangan tenaga kerja desa. Bentuk-bentuk sistem latihan dapat dibuat sangat fleksibel dan dapat menggunakan model: magang, sistem ceramah klasikal, sistem peragaan, sistem bimbingan, sistem latihan praktek, sistem diskusi, sistem games (permainan) dan sistem kombinasi. Dalam pelaksanaan pelatihan perlu disesuaikan dengan model pendidikan orang dewasa, yaitu memegang penuh kebebasan dan kemandirian.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi ketenagakerjaan di daerah pedesaan hingga saat ini belum cukup memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang umumnya masih rendah, pemilikan asset produksi yang sangat terbatas, akses sumber-sumber ekonomi yang lemah, penguasaan informasi dan pasar yang lemah, dan berbagai kelemahan lainnya masih mewarnai ketenagakerjaan di desa. Keadaan semacam ini tidak memungkinkan untuk dipacu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cepat.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menganut arus utama ekonomi neo-klasik yang liberal-kapitalistik tidak sesuai dengan keadaan ketenagakerjaan di desa. Oleh karena itu, penduduk desa yang umumnya masih diliputi berbagai kelemahan tidaklah mungkin untuk dilepas dalam persaingan pasar bebas. Mereka harus diberdayakan untuk menjadi tenaga kerja yang produktif dengan menciptakan peluang-peluang atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Selama situasi ketenagakerjaan desa masih seperti itu, maka kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan justru akan mempertajam ketimpangan.

Pembangunan berwawasan kependudukan yang lebih menitik beratkan perhatiannya pada pembangunan manusia diyakini lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya berada di pedesaan dan pada umumnya dalam keadaan yang kurang berdaya dan miskin. Pembangunan berwawasan kependudukan juga lebih memberikan peluang terhadap upaya-upaya pemberdayaan

tenaga kerja desa. Tenaga kerja desa tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi sebagai faktor produksi saja, melainkan harus dipandang secara holistik sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, upaya-upaya pemberdayaan tenaga kerja desa harus dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, spirit kemandirian dan pendekatan lokalitas.

Pembangunan ekonomi sebagian terbesar rakyat Indonesia (penduduk pedesaan) harus ditempuh melalui strategi mendorong percepatan transformasi struktural yang memperkuat kedudukan dan peranan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Transformasi struktural yang dimaksud meliputi perubahan dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dan dari ketergantungan menuju kemandirian. Untuk menjamin terjadinya transformasi struktural tersebut harus diciptakan keadaan yang memungkinkan (*enabling setting*) bagi berkembangnya perekonomian desa dan salah satu upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan adalah peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan bagi tenaga kerja desa. Melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan tidak saja membuahakan produktifitas kerja tetapi juga akan mendorong terciptanya kesadaran kritis tenaga kerja yang sangat berguna bagi pengembangan kehidupannya lebih lanjut.

Terakhir, upaya-upaya untuk menjaga keberlangsungan gerakan keluarga berencana (pengendalian fertilitas oleh masyarakat) tak kalah pentingnya dengan pemberdayaan tenaga kerja seperti yang telah disebutkan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi dan penyediaan kontrasepsi yang lebih mudah diakses oleh warga masyarakat desa. Penurunan fertilitas (kelahiran) dalam jangka waktu yang panjang akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk sehingga laju pertumbuhan angkatan kerja dapat lebih diperlamban. Penurunan laju pertumbuhan angkatan kerja tentu saja akan menghindarkan terjadinya kelebihan tenaga kerja, atau dengan kata lain kesempatan kerja akan lebih berkesesuaian dengan ketersediaan angkatan kerja desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). ***Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990***. Jakarta, 1991
- , ***Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000***. Jakarta, 2001
- , ***Pengembangan Metode Penghitungan Pengangguran: Pengangguran Terbuka Dan Setengah Pengangguran Indonesia 2000 – 2002***. Jakarta, 2003.
- , ***Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2003***. Jakarta, 2004.
- Dillon, H.S. ***Pertanian: Membangun Bangsa***. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Dumairy. ***Ekonomi Etik: Rangsangan Moral Dan Sosial Dalam Berekonomi***. Yogyakarta: Makalah untuk Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila, PUSTEP - UGM, 23 April 2005.
- Korten, D.C. dan Sjahrir. ***Pembangunan Berdimensi Kerakyatan***. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Mubyarto. ***Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir Dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada***. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Mubyarto. ***Teori Ekonomi Dan Kemiskinan***. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, 2004.
- Moelyarto. ***Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Startegi***. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1987.
- Poernomo, Mangku. ***Pembaruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa***. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 2004
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. ***Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia***. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Sumodiningrat, Gunawan. ***AGENDA PEMULIHAN EKONOMI: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Dan Otonomi Daerah***. Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1999.
- Supriatna, Tjahya. ***Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan***. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Tjiptoherijanto, Prijono. ***Kependudukan Birokrasi Dan Reformasi Ekonomi: Pemikiran dan Gagasan Masa Depan Pembangunan***. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Todaro, Michael P. ***Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga***. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

World Bank. ***World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty***. New York: Oxford University Press, Inc., 2000.

Bab 7

Kegiatan Pelayanan dan Permasalahan Lansia

Hartono

Seiring dengan berhasilnya kegiatan pembangunan mendorong semakin meningkatnya usia harapan hidup dan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia. Ini menunjukkan bahwa pembangunan telah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Disisi lain, kondisi ini menimbulkan masalah baru yang menyangkut semua aspek kehidupan, salah satu masalah diantaranya para Lanjut Usia.

Dilain pihak berkembang pula sistem kehidupan yang baru yang lebih sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Namun hal ini tidak mengakomodasi pertumbuhan penduduk lansia yang dialami oleh hampir semua masyarakat. Keluarga semakin cenderung mempertahankan kehidupan keluarga batih yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya selain itu karena fasilitas tempat tinggal dan biaya hidup yang semakin mahal (sistem penggajian yang berdasarkan pada anak isteri dan 2 anak) sehingga sebagian besar secara terpaksa keluarga harus mengurangi beban jumlah anggota keluarga yang menjadi bebannya.

Di Indonesia perhatian terhadap penduduk lansia meningkat terutama karena jumlahnya yang cenderung meningkat pesat. Pada tahun 1971 penduduk lansia baru sekitar 5,31 juta jiwa atau hanya sekitar 4,48 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 1980 berjumlah 7,9 juta jiwa atau 5,5 persen, dan meningkat menjadi 11,3 juta jiwa atau 6,3 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 lansia diperkirakan berjumlah 15,8 juta jiwa atau 7,6 persen. Diperkirakan pada tahun 2020, jumlah lansia akan mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,34 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 1998: 10).

Tingkat harapan hidup bagi bangsa kita dari tahun 1980–2000 menunjukkan telah terjadi perubahan usia harapan hidup dari rata-rata 52,7 tahun menjadi rata-rata 64,5 tahun (tahun 2000) bahkan diprediksikan menjadi rata-rata 67,4 tahun (tahun 2010) dan rata-rata 71,1 tahun (tahun 2020) dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia, hal ini tentunya akan memicu pertumbuhan jumlah lansia di Indonesia. Pada gilirannya hal ini akan membawa konsekuensi timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan lansia seperti bidang kesehatan, sosial ekonomi dan rahkani (Ayu Kesumaningtyas, 2004)

Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 1990 memiliki jumlah penduduk lansia tertinggi dibanding dengan 26 provinsi lainnya, yakni sebesar 11,6% dari sekitar 2,9 juta jiwa penduduknya (BPS, 1990), sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia per Provinsi tahun 2000 ditemukan bahwa DIY menunjukkan persentase lansia tertinggi di antara provinsi di Indonesia yaitu 13,72% dari total penduduk DIY (BPS, 1998).

Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN (1999) menyatakan, Indonesia telah memasuki era penduduk berstruktur tua (*aging population*), yaitu suatu

negara dengan proporsi lansia telah berada pada patokan penduduk berstruktur tua (yakni 7 persen). Dengan demikian DIY sudah lama berada pada era penduduk berstruktur tua jauh mendahului Indonesia. Bandingkan dengan Jepang yang telah lama memasuki era penduduk berstruktur tua, dan pada tahun 2000 Jepang menduduki peringkat teratas dalam urutan proporsi lansianya di dunia. Pada tahun tersebut proporsi lansia di Jepang telah mencapai 21,5 persen dari total penduduk.

Keberadaan penduduk lansia pada awalnya menjadi garapan ilmu kedokteran yang memang sangat besar peranannya dalam membantu lansia menjadi sehat dengan mempengaruhi proses fisiologisnya sehingga memperpanjang hidup penduduk lansia. Namun kemudian keberadaan lansia ini menarik perhatian banyak ilmuwan dari berbagai bidang dan disiplin ilmu untuk mengkaji masalah lansia yang disebut Gerontologi, yaitu suatu pendekatan ilmiah dari berbagai aspek proses ketuaan yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, perilaku, lingkungan dan lain-lain (Depkes RI, 1998). Perhatian terhadap lansia terjadi dimana-mana tidak saja di Indonesia tetapi juga di tingkat dunia.

WHO pada tahun 1995 menggariskan bahwa fokus pembinaan bagi kelompok lansia adalah upaya promotif dan meminimalkan ketergantungan mereka. DIY sebagai provinsi yang penduduk lansianya tertinggi dituntut untuk lebih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan lansia. Berbagai kegiatan yang dilakukan berbagai institusi yang memiliki komitmen terhadap masalah lansia telah banyak dilakukan, baik institusi pemerintah maupun swasta.

Menurut Ayu Kesumaningtyas (2004) beberapa permasalahan lansia dikemukakan antara lain rawan terhadap penyakit kemunduran fisik, mental, sosial, karena terjadi kemunduran di berbagai segi karena faktor usia kesempatan dan produktivitas kerja menurun perubahan bentuk keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti, gerak/mobilitas terbatasekonomi/biaya hidup serta tempat tinggal

Sementara itu menurut Sullivan dan Thompson, dalam seluruh siklus kehidupan setiap orang manusia memiliki beberapa tahapan sejak lahir hingga usia lanjut. Setiap tahapan yang dialami atau dilalui dalam kehidupan (masa anak, remaja, pemuda, dewasa dan lansia akan selalu terasa ada masalah penyesuaian dengan status dan peranan yang terkait dengan tahapan itu. Oleh karena itu setiap orang tidak merasa asing dengan isu masalah remaja, masalah pemuda maupun masalah lansia. Dan ini akan dapat membantu menjelaskan jenis masalah yang sering timbul dalam setiap tahapan mulai dari masalah anak, remaja maupun sampai masalah lansia (Paulus, 1999).

Dari pendapat itu jelas bahwa lansia sebagai tahapan kehidupan manusia, dimana setiap tahap tentu memiliki persoalan sendiri akibat dari perubahan fungsi yang menimbulkan ketidakseimbangan sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Hal ini tidak dapat dihindari, apabila hal ini tidak dapat dilakukan dengan baik dipastikan akan muncul berbagai masalah. Ada dua kelompok dalam kehidupan manusia yaitu masa muda dan masa lansia yang selalu memunculkan masalah akibat dari perubahan fungsi dan perubahan yang dialami. Pada masa lansia kondisi ini pada umumnya akan mempengaruhi munculnya masalah-masalah baru baik kesehatan, ketidakmampuan ekonomi

dan psikologis, dimana pemecahannya membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak.

Mengenai kehidupan keluarga lansia di Indonesia pada umumnya biasanya mereka masih sebagai kepala keluarga. Ini memperlihatkan masih kuatnya kemandirian di kalangan lansia, yang mungkin mereka itu tidak saja masih mempunyai sumber penghasilan sendiri tetapi juga mungkin masih mempunyai tanggungan dari anak-anaknya. Dari beberapa hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar lansia ini tinggal bersama anak-anaknya, dan hanya sedikit yang tinggal sendiri. Kondisi ini mungkin ada kaitannya dengan kondisi budaya, yang menganggap tidak pantas bagi anak-anaknya membiarkan orang tuanya tinggal sendiri. Tradisi yang dianut sebagian besar masyarakat kita masih melihat orang tua itu merupakan seseorang yang harus dihormati, tempat berbalas budi dan sebagainya sebagai tanggung jawab anak-anaknya. Oleh karena itu kehadiran lembaga-lembaga Asuhan Orang Tua (panti Verda) yang mulai diperkenalkan seharusnya tidak bertentangan dengan tradisi yang masih hidup bahkan mungkin saling mendukung .

Perubahan nilai sosial masyarakat yang mengarah kepada tatanan masyarakat individualistik, menyebabkan para lansia kurang mendapat perhatian sehingga sering tersisih dari kehidupan masyarakat dan menjadi terlantar. Kurangnya kontak sosial ini menimbulkan perasaan kesepian, murung. Hal ini tidak sejalan dengan hakekat manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan kehadiran orang lain.

Di luar perhatian dari berbagai institusi tersebut yang sangat besar peranannya dalam menyejahterakan lansia, para lansia dan keluarga lansia itu sendiri perlu sedini mungkin mempersiapkan diri agar menjadi lansia yang sejahtera. Mempersiapkan masa tua agar mandiri dan berguna bagi masing-masing calon lansia perlu dilakukan sedini mungkin. Berbagai masalah yang dihadapi lansia sedapat mungkin dipersiapkan pemecahannya. Masalah yang pada umumnya dihadapi oleh lansia dapat dikelompokkan ke dalam masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah kesehatan dan masalah psikologis.

Sampai saat ini pelayanan lansia di Indonesia masih sangat terbatas baik jangkauan maupun jenisnya. Baru ada dua pelayanan yang kita kenal yaitu pelayanan jaminan pensiunan bagi lansia mantan pegawai negeri, TNI/POLRI maupun yang bekerja didalam naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun pelayanan dan penyantunan lansia yang diberikan oleh Departemen Sosial melalui panti-panti werda bagi lansia yang terlantar. Semakin lama kondisi akan semakin meningkat baik variasi maupun jenis permasalahan yang dihadapi oleh lansia seiring dengan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam penanganannya.

Karakteristik dan Masalah Lansia

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan pasal 1 ayat 2 dinyatakan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia enam puluh (60) tahun ke atas. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila

kita perhatikan penetapan usia lanjut ini seiring dengan tingkat berkembangnya usia harapan hidup sebagai akibat keberhasilan dibidang kesehatan dan pembangunan .

Disamping ketentuan diatas, pada kenyataannya banyak lembaga-lembaga formal dan non formal tidak menggunakan kriteria umur seperti diatas sebagai batasan untuk mengelompokkan seseorang sudah menjadi lansia lebih pada kemampuan organ fisik seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (TNI, POLRI, dll) atau tingkat produktifitas.

Ada suatu pendapat bahwa masa tua (lansia) merupakan suatu masa kehidupan yang telah berhasil dilewati dengan berbagai lika-liku kehidupan, ia telah keluar sebagai pemenang melalui berbagai krisis masa anak-anak, corak ragam masalah masa remaja dan seribu satu macam ujian masa dewasa. Masa tua mempunyai nilai khusus. Suatu masa yang penuh dengan banyak pengalaman dan pergumulan hidup sebagai insan yang lemah telah berhasil keluar sebagai pemenang dalam arena kehidupan (Wauran, 1981: 12).

Tetapi disisi lain lansia merupakan masa, dimana seseorang memiliki kondisi organ-organ fisik yang mengalami penurunan fungsi dan pada umumnya ditandai dengan adanya beberapa hal:

- Dilihat dari segi organ fisik tubuh pada umumnya ditandai dengan menurunnya beberapa fungsi organ tubuh misalnya fungsi mata mulai kabur, telinga tidak mendengar, cepat lelah/capek, sakit-sakitan, sukar tidur dan sebagainya sehingga organ-organ tubuh tidak lagi berfungsi secara sempurna atau dengan kata lain mulai renta terhadap berbagai sakit/ penyakit.
- Akibat dari kondisi organ fisik yang tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan menurunnya kemampuan bekerja dan produktivitas kerja, ditandai memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. Hal ini berakibat pada menurunnya pendapatan. Pada sebagian lansia, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, masa tua berarti tidak produktif atau tidak berpenghasilan lagi. Lansia ini tergantung atau menjadi beban anak cucu atau anggota keluarga lainnya.
- Secara ekonomis, lansia dapat diklasifikasikan atas tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Meskipun demikian memang masih banyak lansia yang masih produktif sebagai akibat dari pengalaman yang masih dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kaitan ini insan lansia dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (i) kelompok lansia yang sudah uzur, pikun (*senile*) yaitu mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (ii) kelompok lansia yang masih produktif, yaitu mereka yang mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain; dan (iii) kelompok lansia yang miskin (*destitute*), yaitu termasuk mereka yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang kelangsungan kehidupannya (Wirakartakusumah, 1994).
- Dari segi sosial ditandai dengan menurunnya kontak/hubungan sosial, baik dengan anggota keluarga, anggota masyarakat maupun teman kerja akibat terputusnya hubungan kerja karena pensiun. Di samping itu ada kecenderungan meluasnya pemahaman tentang keluarga inti yang terdiri dari anak, ibu dan ayah saja . Kondisi ini dipengaruhi adanya perubahan orientasi

kehidupan yang semakin modern sehingga pola hubungan lebih bersifat semakin individualis, formal dan rasional.

- Seiring dengan menurunnya fungsi organ fisik (tubuh) juga berpengaruh terhadap adanya penurunan fungsi organ non fisik (mental dan spiritual) ditandai dengan munculnya masalah mental, psikologi. Masalah psikologis yang dihadapi lansia pada umumnya meliputi: kesepian, terasing dari lingkungan, ketidakberdayaan, kurang percaya diri, ketergantungan, keterlantaran terutama bagi lansia yang miskin, *post power syndrome* dan sebagainya. Kehilangan perhatian dan dukungan dari lingkungan sosialnya yang biasanya berkaitan dengan hilangnya otoritas atau kedudukan, dapat menimbulkan konflik atau keguncangan. Aspek psikologi merupakan faktor penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan seorang lansia. Aspek psikologis ini lebih menonjol dari pada aspek materiil dalam kehidupan seorang lansia. Bahkan sering melaksanakan kegiatan-kegiatan diluar control bahkan kebalikan pada kegiatan seperti anak kecil, dan tanda-tanda lainnya.

Melihat adanya beberapa tanda-tanda karakteristik yang dimiliki oleh para lansia di atas menunjukkan bahwa kondisi lansia sangat rentan terhadap berbagai persoalan baik kesehatan, ekonomi, (pendapatan pemenuhan kebutuhan pokok), psikologi dan lain-lain sehingga dalam menjalani kehidupan merupakan kelompok yang terlemah dan menghadapi masalah.

Menurut Djailani kenyataan yang terlihat nyata di depan mata adalah para lansia merupakan kaum terlemah yang paling banyak menerima kenyataan. Kondisi inilah yang harus direnungkan dan dicarikan solusi pemecahannya. Selain itu ujarnya lagi, suatu pemandangan rutin dan kasat mata bila disekeliling kita banyak terlihat para lansia yang bertahan hidup dengan mengorek tempat sampah, mengemis di sekitar lampu merah. Di sisi lain, Jakarta juga merupakan gudangnya para lansia potensial segala bidang. Dari dua kutub yang mencolok ini, Wagub bidang Kesra ini mempertanyakan mengapa tidak memadukan dan menyatukan dua sisi kehidupan yang memang saling terkait dan membutuhkan ini dalam satu tindakan nyata saling mengisi dan mengasahi. "Para lansia yang memiliki kemampuan dalam segala bidang agar turut aktif dan mau terjun langsung ditengah-tengah para lansia yang tidak mempunyai kemampuan dan potensi lebih, sehingga kesulitan yang tengah mereka rasakan tidak menjadi beban pemerintah, lingkungan tempat tinggal dan keluarganya (Djailani, 1999).

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi serta upaya memberdayakan penduduk lansia potensial perlu dilakukan adanya berbagai aktivitas produktif. Hal ini merupakan salah satu upaya penunjang kemandirian lansia, tidak saja dari aspek ekonomis, tetapi sekaligus pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan yang melibatkan berbagai unsur yang ada baik dari kalangan lansia itu sendiri, keluarga, masyarakat maupun LSM serta pemerintah. Disamping itu perlu juga disusun arah kebijakan dalam mengatasi masalah-masalah lansia secara integral sebagai acuan bersama dalam mengatasi masalah.

Usaha Pelayanan Dalam Mengatasi Masalah Lansia

Uraian di atas menunjukkan bahwa kondisi lanjut usia merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki organ tubuh fisik dan non fisik mulai

menurun sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara baik dan maksimal dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga sering menghadapi berbagai masalah baik kesehatan, pendapatan, psikologi dan sebagainya.

Sebagian dari insan lansia menjadi beban bagi penduduk produktif karena kondisi fisik, mental, sosial yang menurun sehingga tidak memungkinkan mereka berperan dalam pembangunan. Dari sisi lain lansia memiliki pengalaman, kearifan, keahlian, semangat kejuangan dan kekayaan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh generasi yang lebih muda. Oleh karena itu, lansia layak diikutsertakan dan diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan.

Dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para lansia perlu dilakukan adanya beberapa langkah dalam mendorong pemberdayaan kaum lansia itu sendiri sehingga kelompok ini merasa mendapatkan perhatian disamping usaha-usaha lain yang harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah agar akses kelompok lansia ini dapat disalurkan dan ditampung dalam memenuhi kebutuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya

1. Peran Lansia dalam Mengatasi Masalah

Upaya pengembangan kualitas dan pemberdayaan lansia diarahkan pada tiga unsur yaitu: kemandirian, kesejahteraan dan kemanfaatan. Lansia yang mandiri adalah lansia yang kondisinya sehat dalam arti luas sehingga mampu menjalankan kehidupan pribadi.

Dewasa ini sudah mulai dirasakan perlunya dibentuk kelompok-kelompok lansia. Kelompok lansia ini menghimpun para lansia dalam upaya meningkatkan kualitas mereka, yang biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan periodik. Dalam pertemuan itu akan dibicarakan hal-hal yang terkait secara langsung dengan keberadaan lansia. Keberadaan kelompok disesuaikan dengan latar belakang kebutuhan masing-masing kelompok lansia baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomis, sosial budaya, kesehatan maupun psikologis.

a. Membentuk kelompok (organisasi) Lansia

Menghadapi kenyataan ini perlu dibentuk kelompok-kelompok lansia sebagai forum komunikasi yang memiliki kegiatan mempertemukan para anggotanya agar kontak sosial berlangsung. Kontak sosial ini sangat berguna bagi lansia agar lansia memiliki kesempatan untuk saling bertukar informasi, saling belajar dan saling bercanda. Kontak sosial akan mendatangkan perasaan senang yang tidak dapat dipenuhi bila ia dalam keadaan sendirian. Oleh karena itu upaya mempertemukan sesama lansia dan sebaliknya meninggalkan kebiasaan lansia sebagai penunggu rumah perlu ditinggalkan. Upaya menghimpun kelompok lansia dalam wadah kegiatan memungkinkan mereka berbagi rasa dan menikmati hidup (Ancok, 1993).

Adapun kelompok yang diperlukan sebagai sarana untuk menampung aspirasi dan wadah kegiatan para lansia antara lain:

1. Kelompok keagamaan / pengajian bagi lansia

Kelompok yang bergerak di bidang keagamaan ini akan memberikan bekal bagi para lansia dalam melaksanakan kehidupan dengan baik dan siramam bidang agama merupakan kebutuhan pokok bagi lansia. Pada umumnya lansia

mengharapkan: panjang umur, semangat hidup, tetap berperan sosial, dihormati, mempertahankan hak dan hartanya, tetap berwibawa, kematian dalam ketenangan dan diterima di sisi-Nya (*khusnul chotimah*), dan masuk surga. Keinginan agar lebih dekat kepada Tuhan merupakan kebutuhan lansia. Proses menua yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, dirasakan sebagai beban mental yang cukup berat. Peningkatan kualitas lansia adalah upaya yang dilakukan terhadap lansia untuk meningkatkan kondisinya dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia seutuhnya.

2. Kelompok Olah raga dan kesehatan (Pos Yandu Lansia)

Pembentukan kelompok ini sangat diperlukan dalam mendorong tumbuhnya kemandirian para lansia di bidang kesehatan. Adanya pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun non fisik secara rutin dan mandiri sehingga akan menumbuhkan motivasi dan kemampuannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu dapat bangun tanpa bantuan, mandi, ke WC, kerja ringan, olahraga, berpakaian rapi, membersihkan kamar, tempat tidur, mengunci pintu dan jendela, pergi ke pasar dan kegiatan seksual. Disamping itu juga untuk menjaga dan terjaminnya kondisi fisik setiap lansia agar tetap bugar dan sehat

3. Kelompok Kegiatan Ekonomi Produktif (KUBE)

Kelompok ini diperlukan guna memberi kesempatan atau menjamin agar para lansia mendapatkan kesempatan dalam menyumbangkan tenaganya untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan secara ekonomis sesuai dengan kondisi dan kemampuannya (industri rumah tangga). Sehingga ia dapat menciptakan kemandirian. Kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa tergantung dan bantuan dari anak/cucu maupun orang lain. Lansia yang sejahtera adalah lansia yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Sedangkan lansia yang bermanfaat adalah lansia yang membawa faedah bagi keluarga, masyarakat dan bangsa (koperasi, yayasan, kelompok usaha ekonomi produktif, dan lain-lain) serta kelompok yang lain sesuai dengan kebutuhan para lansia.

Atas dukungan pemerintah dan masyarakat di dalam masing-masing desa dan RW bahkan pada tingkat Kelurahan telah muncul dan dibentuk adanya beberapa kelompok lansia misalnya POSANDU LANSIA, Kelompok Senam Lansia dan kelompok-kelompok lainnya. Yang menjadi masalah adalah tidak semua kelompok yang sudah terbentuk berjalan seperti yang diharapkan. Pada umumnya setelah kelompok lansia berjalan beberapa saat, kemudian berhenti tanpa aktivitas lagi. Disadari betapa pentingnya arti kelompok bagi kehidupan manusia perlu diupayakan agar kelompok tetap aktif dan merupakan tempat yang menyenangkan bagi lansia.

b. Kegiatan lain

Disamping itu secara mandiri maupun secara berkelompok para lansia perlu meningkatkan pengetahuan, ketampilan serta kemampuan secara mandiri melalui berbagai kegiatan baik pendidikan, kursus-kursus ketrampilan,

pelatihan-pelatihan atau kegiatan lainnya dalam rangka mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada dan hidup secara mandiri .

2. Peran Keluarga serta Masyarakat

Permasalahan lansia merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu untuk rangka membatu masalah lansia dan memberikan semangat para lansia diperlukan adanya upaya kegiatan yang dapat dilakukan antara lain;

1. Bagi keluarga yang memiliki lansia agar tetap menghormati lansia dan menjunjung tinggi sebagai orang tua yang berjasa sesuai dengan nilai-nilai budaya yang kita miliki tanpa harus melakukan proteksi secara berlebihan , meskipun proses perubahan kehidupan semakin modern.
2. Memberikan kesempatan secara luas kepada para lansia untuk dapat melaksanakan perannya diberbagai kegiatan secara rutin dan tidak perlu ada kekhawatiran (pengawasan) yang berlebihan sehingga para lansia masih diakui keberadaannya dan hidup secara berdampingan dengan anak dan cucunya .
3. Membantu memecahkan permasalahan (solusi) yang dihadapi secara wajar dan sempurna (khususnya kesehatan, psikologi dan lainnya).
4. Membantu dalam pengembangan dan memfasilitasi baik secara fisik maupun non fisik dalam mendukung kegiatan kelompok lansia yang ada (Posyandu, Senam Lansia)
5. Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi terpeliharanya kesehatan jasmani, rohkani serta dukungan bagi lansia untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diinginkan lansia secara wajar dan tetap memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya sehingga dalam kehidupan mereka itu berjalan dengan normal.

Dengan adanya beberapa kegiatan itu kiranya para lansia akan merasa diperhatikan dan tidak merasa dipinggirkan sehingga mereka dapat menjalani dan menikmati kehidupannya dengan baik, sejahtera. Ini merupakan bentuk penghormatan keluarga (anak, menantu dan cucu) dan masyarakat dalam memberi penghargaan atas pengabdian dan jasa yang selama ini mereka berikan.

3. Peran Pemerintah

Dalam undang-undang kesejahteraan lansia (1998) ditegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar dalam melindungi para lansia agar mereka hidup sejahtera. Sehubungan dengan hal itu kiranya pemerintah perlu segera mengambil langkah dan peranan dalam mendorong terciptanya kehidupan lansia di indonesia menjadi sejahtera antara lain:

1. Membuat program kebijakan dan regulasi dalam di bidang peraturan perundang-undangan untuk mendorong kalangan masyarakat dan swasta (LSM) untuk ikut peduli terhadap permasalahan lansia dengan mendirikan panti-panti sosial (panti werda/jompo) khususnya bagi lansia yang mampu sehingga meningkatkan daya tampung dan pelayanan bagi lansia di Indonesia.

2. Meningkatkan koordinasi antardepartemen dan instansi pelaksana lainnya, agar siap tanggap dengan program masing-masing terhadap permasalahan yang dihadapi para lansia baik di tingkat nasional maupun daerah (DepKes, BKKBN, DepSos, dan sebagainya)
3. Melalui lembaga-lembaga panti-panti jompo yang telah dibentuk (ada pemerintah meningkatkan pelayanan, fasilitasi serta kemampuan dalam memberikan bantuan melalui beberapa kelompok lansia yang ada agar lansia hidup lebih nyaman, sehat dan sejahtera dengan daya tampung terhadap lansia menjadi lebih besar/banyak khususnya bagi lansia yang terlantar.
4. Mengusahakan anggaran di APBN maupun APBD secara khusus yang digunakan untuk mendorong terciptanya pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi lansia (baik di bidang pelayanan Kesehatan, pelayanan memenuhi kebutuhan pokok, pelayanan perumahan, dan lain-lain) dalam mengurangi beban masalah yang dihadapi para lansia miskin dan terlantar sehingga dapat hidup secara sejahtera.
5. Melaksanakan berbagai pelatihan/kursus ketrampilan bagi para lansia yang potensial agar dapat berkarya secara produktif sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan pembinaan kelompok-kelompok lansia yang ada dan kegiatan lainnya.

Dengan adanya beberapa langkah kegiatan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pemecahan masalah lansia bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab berbagai pihak baik lansia itu sendiri, keluarga, masyarakat, swasta maupun pemerintah, sehingga diharapkan penanganan masalah lansia ini menjadi idial untuk menuju kepada lansia yang mandiri, sejahtera dan bermanfaat dan ini perlu dipersiapkan secara dini oleh masing-masing individu itu sendiri dengan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Penutup

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan memberikan dampak akan semakin meningkatnya usia harapan hidup bagi bangsa Indoensia, sehingga mendorong jumlah dan permasalahan lansia semakin meningkat dan komplek, ditambah lagi adanya proses perubahan kehidupan yang semakin modern dan komplek yang akan mendorong meningkatnya rasa individualisme.

Permasalahan yang dihadapi para lansia pada umumnya sebagai akibat dari proses perubahan fungsi/peran di dalam kehidupan masyarakat dan akibat dari penurunan fungsi-fungsi organ fisik dan mental seiring dengan proses penuaan yang dialami sehingga masalahnya lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan, penurunan tingkat produktivitas, masalah psikologi, penurunan mental dan sebagainya. Meskipun kondisinya demikian kadang-kadang tidak disadari oleh para lansia, sehingga mereka masih merasa kuat, produktif dengan tidak sadar bahwa dirinya rentan terhadap permasalahan tersebut.

Peran keluarga dan masyarakat sangat besar dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh para lansia, mengingat para lansia pada umumnya masih banyak yang tinggal dalam satu lingkungan (rumah) sehingga penghormatan kepada orang tua masih banyak dilaksanakan, tanpa harus melakukan proteksi yang berlebihan perlu para lansia diberikan kebebasan secara terkontrol sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatannya secara wajar dengan menciptakan kondisi yang kondusif akan memberikan kehidupan yang lebih panjang dan sejahtera.

Pemerintah perlu menyusun satu kebijakan sosial yang memberikan jaminan sosial bagi lansia. Disamping itu perlu meningkatkan kemampuan daya tampung terhadap panti-panti werda dan fasilitas pelayanan bagi lansia yang ada agar memadai dalam memberikan santunan dan pelayanan baik kesehatan, ekonomi, sosial dalam rangka meningkatkan pemberdayaan lansia untuk mendorong kemandirian lansia bidang kesehatan, ekonomi, sosial maupun mental spiritual sehingga lansia merasa mendapatkan perhatian dan hidup sejahtera.

Secara ideal penanganan permasalahan lansia harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab secara bersama diantara lansia sendiri, keluarga, masyarakat, swasta, LSM serta pemerintah sesuai dengan peran masing-masing sehingga memberikan peluang yang lebih banyak para lansia untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam menikmati kehidupan secara baik nyaman dan sejahtera.

Referensi

- Biro Pusat Statistik RI , 1980, *Hasil Sensus Penduduk Indoensia tahun 1980*., BPS Indonesia , Jakarta.
- Esmuningrum, Titik. (2000), *Program Pemberdayaan Lansia PKBI Memesuki Usia Lanjut dengan Sehat dan Produktif*, Jakarta: PKBI.
- Kesumaningtyas, Ayu. (2004), *Hari Lansia Nasional Kewajiban Negara Menjamin Kesehatan* , Jakarta: PKBI.
- Paulus Tangdilitin. (1999), *Masalah-Masalah Sosial suatu Pendekatan Sosiologis* , Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suardiman, Siti Partini (2002), *LANSIA Propinsi DIY*, Yogyakarta: BKKBN Prop DIY.
- Waura M.H, (1981). *Menikmati Kebahagiaan Masa Tua*, Bandung: Indonesia Publishing House.

Bab 8

Menjadi Lanjut Usia Dengan Senang Hati

Nelly Tiurmida

Kehidupan masa lanjut usia apabila dimasuki dengan persiapan yang baik akan menjadi suatu masa yang paling gemilang dan membahagiakan bagi kehidupan seseorang. Karena orang lanjut usia dapat menikmati suatu masa kehidupan yang tenteram dan menyenangkan sebab mereka memiliki naluri yang sehat serta tujuan yang positif untuk melakukan berbagai hal yang berguna dalam kehidupan ini.

Manusia berkembang dari ketidakberdayaan menjadi manusia perkasa, dan akhirnya menjadi renta, kembali tidak berdaya. Namun, pertumbuhan dan perkembangan cakrawala dunianya semakin luas, serta semakin dalam dan intens hidupnya.

Sekalipun demikian, banyak orang merasa khawatir dan takut menghadapi kehidupan masa tua. Kekhawatiran tersebut disebabkan banyak hal, bahkan orang hanya melihat beberapa hal yang tidak menyenangkan, seperti berkurangnya tenaga dan kekuatan fisik, beberapa jenis penyakit termasuk penyakit orang tua dan penderitaan lain yang biasa dialami pada masa tua, cemas karena masalah hidup, keluarga, kehidupan sosial, dan masih banyak yang lainnya. Betapa banyak orang lanjut usia merasa sepi dan tidak berguna.

Memang segalanya perlu dipersiapkan agar para lanjut usia dapat menjalani hidupnya dengan bijak. Karena, lebih banyak kenyataan dalam kehidupan orang lanjut usia yang menggembirakan dan kini sedang dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan masa lanjut usia bukanlah suatu masa yang harus dikhawatirkan atau ditakuti, asal saja setiap orang sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa yang indah tersebut.

Lanjut usia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai usia panjang, dan terjadinya tidak dapat dihindari oleh siapapun. Istilah untuk orang yang sudah lanjut usia belum ada yang baku. Orang sering menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda, seperti manusia lanjut usia (manula), golongan lanjut umur (glamur), usia lanjut (usila), manusia lanjut usia (lansia), bahkan di Inggris biasa disebut dengan istilah warga negara senior (Wayudi Istiono dan Akhmadi, 2004: 33).

Sebenarnya pada umur berapakah orang dapat disebut berusia lanjut? Memang belumlah ada ketentuan yang pasti pada umur berapa orang dapat disebut lanjut usia, namun berdasarkan atas definisi *World Health Organization* (WHO), usia di bawah 65 tahun tergolong Usia Pertengahan (*Middle Age*); usia di antara 65 tahun sampai dengan 74 tahun tergolong *Junior Old Age*; usia antara 75 tahun sampai dengan 90 tahun tergolong *Formal Old Age*; dan antara

90 tahun sampai dengan 120 tahun digolongkan *Longevity Old Age* (orang tua berumur panjang) (Hung Zhao Guang, 2002: 4).

Seseorang yang mampu melewati masa lanjut usia adalah orang yang telah merasakan berbagai seluk-beluk kehidupan. Karena dirinya telah keluar sebagai pemenang melalui berbagai krisis masa anak-anak, corak ragam masalah remaja, dan seribu satu macam ujian masa dewasa. Oleh karena itu, masa lanjut usia mempunyai arti khusus, yaitu sebagai suatu masa yang penuh dengan banyak pengalaman dan pergumulan hidup sebagai insan yang lemah yang telah berhasil menjadi pemenang dalam arena kehidupan.

Pemikiran dan Pembahasan

Proses menjadi lanjut usia atau menjadi tua menghadapkan orang pada salah satu tugas yang paling sulit dalam perkembangan hidupnya. Menurut kodratnya, manusia menolak melepaskan mahkota hidupnya dalam proses menjadi tua. Akibatnya, dengan sakit hati dirinya hanya dapat “menerima”. Kini lepaslah segala ambisinya, dirinya menjadi kesal dan kehilangan semangat hidup. Bagi para lanjut usia, di masa tersebut dirasakannya hidup praktis sudah berhenti, meskipun dirinya masih mondar-mandir sebagai warga masyarakat yang gelisah tanpa tujuan. Menghadapi keadaan seperti itu kesempatan yang indah bagi pertumbuhan dan pengembangan diri menjadi hilang, karena tidak dipahaminya bahwa proses menjadi tua memberikan kesempatan yang besar untuk pematangan diri sebagai manusia secara utuh (Alfons Deeken, 1986: 13).

Menjalani proses masa penuaan adalah hal yang wajar bagi setiap orang, namun bukanlah berarti kualitas hidup menjadi menurun. Tidak seorangpun di dunia ini yang mampu mencegah proses penuaan, dan hal yang dapat dilakukannya adalah mengusahakan agar mampu menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang baik dan penuh kebahagiaan.

Masih banyak orang yang belum memikirkan masa lanjut usia karena masa tersebut dianggap merupakan suatu masa yang telah kehilangan gairah hidup dan hal-hal lain yang memberikan harapan, suatu masa singkat yang tersisa dalam kehidupan dan tinggal sedikit saja nilai yang berarti. Penilaian demikian bermula dari anggapan bahwa kehidupan di masa lanjut usia itu tidak lagi memberikan banyak faedah, bahkan ada yang berpandangan negatif yang menganggap bahwa kehidupan masa lanjut usia hanyalah menjadi beban bagi orang lain.

Oleh karena itu, setiap insan hendaklah melihat kehidupan masa lanjut usia itu dari segi positif, agar pandangan dan perhatiannya menjadi lain sehingga akan muncul di hadapannya nilai-nilai yang indah dari kehidupan masa lanjut usia, yaitu sebagai suatu masa keemasan pada bagian akhir dalam sejarah kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang agung dan mulia. Dengan demikian, kehidupan masa lanjut usia patutlah dihargai dan dihormati sehingga setiap orang tanpa perlu merasa ragu dan khawatir menghadapi dan memasuki masa yang indah tersebut.

Setiap orang pastilah memiliki pengalaman unik yang berbeda antara seseorang dan lainnya. Pengalaman inilah yang akan membentuk pola pikir dan pola hidupnya dalam menjalani masa lanjut usia. Oleh karena itu, jika tidak mencermati dan memahami proses kehidupan yang harus dilalui sejak masa

kanak-kanak, remaja, dewasa, dan masa lanjut usia dapat menyebabkan seseorang merasakan takut, tidak dapat menerima kenyataan, bahkan tidak mengetahui cara menghadapi usia lanjutnya.

Para ahli gerontologi (ilmu mengenai lanjut usia) menyatakan bahwa masa lanjut usia pada manusia adalah suatu gejala umum atau suatu proses kehidupan. Apabila seseorang mengalami lanjut usia berarti dirinya telah tiba pada suatu kenyataan yang tidak dapat disembunyikan. Kulitnya menjadi kering dan keriput, rambut kepala menjadi tipis dan berubah menjadi putih, mata dan kemampuan melihat menjadi kabur, pendengaran menjadi berkurang, dan fisik serta tenaganya mulai melemah. Ketika memasuki usia lanjut setiap orang akan mengalami perubahan secara fisik maupun mental, bahkan secara mental para lanjut usia juga sering berbeda persepsi dengan orang yang lebih muda.

Namun demikian, kenyataan-kenyataan tersebut bukanlah menjadi sebab bahwa lanjut usia dapat melumpuhkan orang secara keseluruhan. Bahkan sebaliknya, usia lanjut hendaklah menjadi pengalaman yang sangat memperkaya kehidupan seseorang jika dapat membawanya berpartisipasi penuh dalam hubungan interpersonal yang baik, dan sering memberi serta menerima cinta kasih dengan sepenuh hati secara rela menghadapi kenyataan yang tidak terelakkan, yaitu kematian atau maut.

Berdasarkan atas sensus penduduk tahun 2000, jumlah warga lanjut usia mencapai 15,8 juta jiwa atau 7,6%; dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 18,2 juta jiwa atau sebanyak 8,2%; sedangkan tahun 2015 diperkirakan mencapai 24,4 juta jiwa atau 10%. Pada peringatan Hari Lansia Nasional ke-9 tanggal 29 Mei 2004 yang lalu, bahkan jumlah populasi kelompok orang usia lanjut di Indonesia dilaporkan meningkat dan Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO/World Health Organization*) telah memperhitungkan bahwa di tahun 2020 Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah warga lanjut usia sebesar 414% dibandingkan dengan tahun 1990. Ini merupakan sebuah peningkatan tertinggi di dunia (Anonim, 2004: 1).

Seiring dengan meningkatnya taraf kesehatan dan gizi masyarakat serta menurunnya kejadian penyakit infeksi, maka angka kematian bayi berkurang dan angka harapan hidup bertambah dengan makin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Populasi penduduk lanjut usia yang makin besar ini menuntut semua pihak untuk memikirkan cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi, termasuk masalah kesehatan, baik biologis, psikologis, sosiologis maupun mental dan spiritual (Wahyudi Istiono dan Akhmadi, 2004:1).

Setiap orang hendaklah mengenali tingkatan umur yang berbeda-beda, mulai dari kanak-kanak, remaja, dan dewasa perlu pula mengetahui betapa pentingnya dan sulitnya menghadapi masa peralihan dengan tepat dari tingkat kanak-kanak ke tingkat remaja, kemudian ke tingkat dewasa. Namun, hal tersebut tidak selalu disadari oleh setiap insan, dan banyak pula orang yang kurang menyadari bahwa peralihan dari tingkat tengah usia yang aktif ke tingkat lanjut usia yang membawa krisis berat dalam kehidupan seseorang.

Krisis pada orang lanjut usia sering terjadi apabila tiba-tiba menghadapi sesuatu hal yang tidak diharapkannya, bahkan dirinya tidak siap pula untuk menghadapinya, seperti berkurangnya tenaga dan kekuatan fisik, pendengaran yang berkurang, daya ingat yang berkurang, kesepian, tidak berguna; dan

menurunnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan alam, misalnya terhadap iklim, tekanan udara, keadaan lingkungan, dan sebagainya; bahkan tubuhnya menjadi lebih renta.

Akan tetapi, kenyataan-kenyataan tersebut bukan menjadi alasan bahwa ketuaan itu haruslah melumpuhkan seseorang secara keseluruhan, karena menjadi tua tidak selamanya harus diukur dari umur seseorang. Dalam hal ini, ukuran ketuaan bagi seseorang hendaklah dilihat dari tiga segi; pertama, ketuaan berdasarkan atas umur; kedua, berdasarkan pada emosional atau perasaan dan tingkah laku; ketiga, ketuaan berdasarkan atas intelektual atau jalan pikiran dan kecerdasan otak. Walaupun demikian, ketiga ukuran ini tidak selalu sama bagi setiap orang karena dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai orang yang jika dilihat dari umurnya tampak masih muda, tetapi dari segi emosional dan intelektualnya sudah lebih tua atau lebih dewasa. Sebaliknya, ada pula orang yang sudah tua umurnya, namun emosional dan intelektualnya tampak masih muda, cerdas, dan segar, bahkan ada pula orang yang masih bersifat kekanak-kanakan dan belum dewasa. Oleh karena itu, yang perlu atau penting diketahui dalam ukuran ketuaan manusia bukanlah dilihat dari umur berdasarkan atas jumlah tahun, melainkan yang utama dilihat adalah fisik, mental, dan spiritualnya (MH Wauran, 1981: 13).

Banyak orang yang memasuki masa lanjut usia dengan sikap seolah-olah dirinya harus berhenti dari semua kegiatan, misalnya berhenti bekerja dan berhenti mengembangkan pikiran, padahal masih banyak hal yang dapat dikerjakannya, bahkan pikirannya masih sanggup dikembangkan dengan cara yang kreatif serta menggali gagasan-gagasan baru untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan bagi kehidupannya sendiri. Bahkan, masih banyak pula orang beranggapan bahwa ketika memasuki masa usia lanjut, itulah waktunya bagi dirinya untuk beristirahat dan hanya mengenang masa silam, membiarkan kaum muda bergiat terus-menerus, sementara itu kaum tua hanya menonton. Banyak pula orang yang merasa cemas memasuki usia lanjut, sebagian ada yang beranggapan seolah-olah masa itu menjadi suatu beban yang berat, dan sebagian yang lain merasa sengsara menjelang tutup usia.

Sehubungan dengan berbagai pernyataan tersebut diatas, tampak bahwa kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting. Kehidupan masa lanjut usiapun memiliki kesempatan yang sama dengan tahap-tahap kehidupan sebelumnya dalam hal menikmati kebahagiaan yang berarti. Persoalan tentang kematian bukan hanya berlaku bagi kehidupan di masa tua, melainkan juga bagi semua orang dalam berbagai tahap kehidupan manusia. Kehidupan masa lanjut usia bukanlah suatu masa yang harus dikhawatirkan atau ditakuti, asalkan setiap orang harus sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa yang indah itu.

Lebih lanjut Alfons Deeken (1986: 67) menyatakan bahwa bentuk-bentuk dan pernyataan kegembiraan dan kebahagiaan yang khas pada masa muda, tidak lagi mempunyai daya tarik di masa lanjut usia. Bahkan, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tidak dapat lagi dilaksanakan orang lanjut usia, seperti olah raga yang memerlukan kekuatan fisik, perjalanan jauh, pesona cinta remaja, dan lain-lain yang pada masa lalu mungkin merupakan sumber kebahagiaan sewaktu masih muda. Namun kini, bagi sebagian besar orang lanjut usia semuanya itu

tinggal kenangan, karena bagi dirinya tidaklah menguntungkan untuk bermimpi tentang kesukaan yang berada di luar jangkauannya. Dalam hidup ini setiap orang hendaklah secara bertahap harus mengembangkan minat pada bentuk-bentuk baru yang memberikan kegembiraan. Orang diciptakan agar bergembira, dan dirinya haruslah merasakan kegembiraan apabila ingin menjadi orang sepenuhnya, begitu pula halnya dengan para warga lanjut usia.

Persiapan memasuki masa lanjut usia ini bukanlah pada waktu seseorang telah menjadi tua. Karena, dengan berbuat demikian biasanya sudah terlambat, sedangkan persiapan ke arah itu haruslah dimulai pada masa muda. Masalahnya bukanlah terletak pada bagaimana keadaan tua seseorang, melainkan bagaimana seseorang itu menjadi tua. Oleh karena itu, kehidupan pada masa lanjut usia apabila dimasuki dengan persiapan yang baik akan menjadi suatu masa yang paling menyenangkan dan membahagiakan bagi kehidupan seseorang. Terdapat beberapa tugas mulia bagi orang-orang di lanjut usia, dan dirinya akan lebih bahagia apabila dapat melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti beribadah, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, jangan memfitnah, serta cakap mengajarkan dan memberikan contoh hal-hal yang baik; hal tersebut berarti mendidik generasi muda untuk saling mengasihi kepada suami dan isteri serta anak-anaknya, saling menghormati, hidup bijaksana, baik hati, dan taat kepada orang tua.

Setiap orang harus dapat menemukan caranya masing-masing agar mendapatkan kegembiraan di masa lanjut usianya. Bagi sementara orang dapat terjadi, cucu-cucunya yang dapat menjadi sumber kesenangan dan kepuasan, bagi lain orang mungkin mengembangkan perhatiannya di bidang seni, musik, dan buku-buku. Dimungkinkan juga kesenangan baru didapatkannya pada keagungan dan keindahan ciptaan Tuhan atau kebanggaan yang sehat atas prestasi hidup seseorang dapat memberikan kepuasan bagi sementara orang yang sudah pensiun. Usia lanjut dapat pula menjadi pengalaman yang sangat memperkaya orang dalam berpartisipasi penuh pada hubungan interpersonal yang ideal, saling memberi dan menerima cinta kasih dengan sepenuh hati. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh orang lanjut usia ialah secara rela menghadapi kenyataan yang tidak terelakkan, yaitu kematian.

Demi menjaga kesehatan fisik para lanjut usia hendaklah memahami dan melaksanakan saran Hung Zhao Guang (2002: 6), yaitu:

1. Tiga buah setengah menit, maksudnya ketika terjaga dari tidur jangan segera turun dari tempat tidur, rebahlah dulu kira-kira setengah menit lalu duduk di tempat tidur selama setengah menit kemudian turunkan kedua kaki di kaki tempat tidur selama setengah menit. Dengan melewati tiga kali setengah menit tersebut kekurangan darah pada otak akan terhindari, jantung kembali bekerja secara normal serta menghilangkan kemungkinan jatuh dan patah tulang, serangan jantung, dan stroke.
2. Tiga buah setengah jam, maksudnya setiap pagi setelah bangun tidur harus berolah raga selama setengah jam, tidur selama setengah jam pada siang hari. Hal ini diperlukan para lanjut usia karena biasanya tidur tidak terlampau malam dan bangun pagi-pagi sekali sehingga memerlukan sedikit istirahat di tengah hari. Pada sore hari setelah makan malam para lanjut usia hendaklah

berjalan pelan-pelan selama setengah jam, dengan demikian para lanjut usia akan dapat tidur dengan nyenyak pada malam hari serta dapat mengurangi kemungkinan *Myocardial Necrosis* (otot jantung mengeras) dan tekanan darah tinggi.

Memperhatikan saran di atas, tampak penting sekali bagi orang lanjut usia melakukan kegiatan fisik dengan teratur dan gerak badan secukupnya setiap hari. Faktor kesehatan jasmani yang terpelihara dengan baik, berbagai kegiatan positif, kemauan yang kuat untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan, sikap mental yang sehat; semua hal tersebut dapat memberikan kegembiraan dan kepuasan bagi orang lanjut usia.

Selain menjaga kesehatan fisik, kebutuhan batin orang lanjut usia perlu pula mendapatkan perhatian agar dirasakannya bahwa dirinya masih berguna dan diperlukan. Para lanjut usia sering tidak sanggup menerima keadaan dirinya yang tampaknya perlu lebih banyak bergantung kepada anggota keluarga dan anak-anak atau orang lain. Bahkan, terdapat pula orang lanjut usia yang sama sekali tidak ingin menerima kenyataan tersebut dan kenyataan lainnya, seperti menurunnya kekuatan fisik.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan masyarakat dan generasi muda untuk mencegah tekanan mental dan sekaligus pula memenuhi kebutuhan batin orang lanjut usia, yakni memberikan lebih banyak perhatian, cinta kasih, pelayanan, serta kegembiraan. Bahkan, dapat pula memberikan dorongan kepada orang lanjut usia untuk menyumbangkan kebijaksanaannya, pengalamannya, dan pemikirannya bagi kepentingan keluarga dan masyarakat sehingga para lanjut usia tersebut selalu merasa masih diperlukan. Selain itu, berinteraksi secara terus-menerus dengan sesama secara tidak disadari dapat membuat memori para lanjut usia terlatih sehingga memperlambat kepikunan dan degradasi mental lainnya. Saling bercerita akan menimbulkan rasa diterima sebagai bentuk pengakuan sosial yang membarakan semangat hidup (Gesit Ariyanto, 2004: 11).

Selanjutnya, hal terpenting menghadapi para lanjut usia ialah setiap orang harus dapat mempersiapkan dirinya masing-masing untuk mengalami kehidupan seperti yang diharapkannya di masa usia lanjut dan bagaimana hidup ini dijalani sehingga orang yang telah lanjut usia dapat menyesuaikan cara hidupnya agar di tahun-tahun terbaik berikutnya menjadi tahun-tahun terbaik pula dalam kehidupannya sehingga dirinya selalu tetap bersemangat menjalani kehidupan, dan menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan (menjadi tua tetap berguna).

Tetap sehat dan aktif serta tidak menjadi beban orang lain merupakan dambaan setiap orang lanjut usia saat menjalani masa tuanya. Sebenarnya hal ini tidaklah sulit jika para lanjut usia selalu menjalani pola hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, menjalankan pola makan yang baik, berolah raga secara teratur, menghindari tekanan terhadap kondisi psikologis, dan tetap berpikiran positif terhadap berbagai hal.

Pada akhirnya, bagi para lanjut usia, jalankanlah gaya hidup yang dapat memperkuat “fisik dan tubuh kita”, seperti dijelaskan oleh Sismadi Partodimulyo (2004: 4) sebagai berikut.

1. Berpikir selalu positif. Jangan sampai ditembus oleh depresi, pikiran negatif, emosional, dan stres.
2. Berusaha dengan jalan relaksasi meditatif.
3. Mengonsumsi makanan berimbang, seperti karbohidrat, protein, lemak, perbanyak vitamin dan mineral, makanlah sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar.
4. Janganlah mengonsumsi obat sekehendak hati hanya karena merasakan kurang enak badan.
5. Berolah raga secara teratur dan cukup untuk membantu melenturnya tubuh sehingga dapat menunda proses penuaan. Pilihlah olah raga dengan benturan ringan (*low impact*) untuk menjaga kesehatan jantung dan kekuatan tulang tetap terjaga, misalnya berjalan kaki.
6. Cukup istirahat. Seperti halnya mesin, tubuhpun perlu beristirahat dan waktu istirahat yang cukup (6-7 jam sehari) akan memberikan kesempatan bagi kulit untuk melakukan regenerasi.
7. Berharaplah setiap hari.

Dengan demikian, masa lanjut usia dapat dijalani dengan senang hati, bahagia, tetap muda, dan berguna.

Penutup

Mengenali proses kehidupan, seseorang dapat memperoleh konsep diri yang lebih kuat sehingga dirinya berusaha mengembangkan segi positif dan dapat mengatasi segi negatif yang dimilikinya. Selanjutnya, dirinya pun mampu memupuk sifat-sifat positif sesuai dengan perannya sebagai orang yang berusia lanjut.

Pengembangan diri yang dilakukan hendaklah sejalan pula dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Hal ini dapat membangkitkan rasa senang karena selain mampu mengembangkan diri, lingkungan pun dapat menerima dengan baik.

Kehidupan masa lanjut usia akan membahagiakan hidup seseorang jika dimasuki dengan persiapan yang baik sehingga para lanjut usia dapat menikmati suatu masa kehidupan yang tenteram dan menyenangkan, tetap bersemangat menjalani kehidupan serta mempunyai kesibukan agar tidak dihantui oleh pikiran buruk tentang kehidupan lanjut usianya karena umur boleh bertambah terus, tetapi tetap muda di usia tua.

Referensi

- Anonim, (2004), "Orang Lansia pun Wajib Diimunisasi", *Media Indonesia Online*. Rabu 1 Juni.
- Ariyanto, Gesit. (2004), "Dicari Panggilan Hati untuk Lanjut Usia", *Kompas*, 29 Mei 2004: 11.
- Deeken, Alfons. (1986), *Usia Lanjut*. Yogyakarta: Kanisius.

- Hung Zhao Guang. (2002), *Gaya Hidup Warga Usia Pertengahan dan Usia Lanjut serta Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*. Jakarta: Perkumpulan Pancaran Hidup.
- Istiono Wayudi dan Akhmadi. 2004. *Hidup Sehat untuk Lanjut Usia*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM.
- MH Wauran. (1981). *Menikmati Kebahagiaan Masa Tua*. Bandung: Indonesia Publishing.
- Partodimulyo, Sismadi. (2004), *Sarasehan Para Lanjut Usia*. Makalah pada Seminar Hidup Sehat Untuk Lanjut Usia. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UGM-Badan Komunikasi Paguyuban Lanjut Usia (BKPL).

Bab 9

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Partisipasi

M. Barori

Ada tiga aktor penting yang mewarnai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di aras desa. *Pertama*, pemerintah desa sebagai aktor negara. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bekerja nonstop 24 jam sehari, mereka adalah pamong desa yang menjalankan fungsi regulasi, kebijakan, pelayanan dan kemasyarakatan. Di satu sisi pamong desa merupakan pemimpin masyarakat desa, dan di sisi lain, mereka juga menjadi kepanjangan tangan negara. Mereka menjalankan tugas-tugas birokrasi negara, mulai dari mengeluarkan surat-surat administratif sampai dengan mobilisasi rakyat untuk mendukung program-program pembangunan yang dibimbing pemerintah.

Kedua, Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai aktor masyarakat politik yang memainkan peran representasi, artikulasi, intermediari dan kontrol terhadap pemerintah desa. Meski belakangan BPD dituding sebagai “sumber masalah” di desa, tetapi kehadiran institusi perwakilan itu merupakan indikator minimal bagi demokrasi desa. Tanpa ada BPD berarti tidak ada proses dan mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) terhadap pemerintah desa. Sebelum BPD lahir, dulu ada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diketuai oleh Kepala Desa, yang ternyata tidak menjalankan fungsi kontrol, melainkan sebagai “lembaga stempel” kepala desa.

Di desa sebenarnya juga ada pemilihan kepala desa secara langsung, yang menurut banyak pihak, sebagai bentuk pesta demokrasi yang melibatkan partisipasi dan arena mewujudkan kedaulatan rakyat. Tetapi secara empirik pilkades tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Orientasi calon kades pada umumnya mencari *praja* (kedudukan, kekayaan dan kehormatan). Studi Frans Husken (2001), misalnya, menunjukkan bahwa pilkades merupakan arena pertarungan politik untuk merebutkan kekuasaan untuk mengontrol kekayaan desa. Karena itu sangat lumrah kalau pilkades sering diwarnai dengan konflik lokal dan permainan politik uang.

Ketiga, aktor masyarakat sipil. Di desa ada organisasi masyarakat sipil yang beragam bentuknya dan jumlah yang banyak. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, RT, RW, maupun Karang Taruna merupakan organisasi masyarakat sipil yang bersifat formal. Di satu sisi setiap organisasi ini digunakan oleh unsur masyarakat untuk merajut kerjasama, solidaritas, prakarsa lokal dan menolong dirinya sendiri (*self help*). Di sisi lain pemerintah menggunakan berbagai organisasi itu untuk mewedahi dan mengendalikan secara tunggal dan seragam terhadap berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Mereka juga digunakan untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah. Karenanya, berbagai organisasi formal itu lebih menonjol sebagai organ korporatisme negara ketimbang korporatisme masyarakat.

Ketiga aktor di atas tentu mempunyai posisi, peran dan ruang yang berbeda-beda. Tetapi ketiganya tentu tidak bisa dipisahkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Lalu apa yang menghubungkan antara ketiganya? BPD secara institusional sebenarnya merupakan jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat sipil, melalui fungsi representasi dan artikulasi yang dijalankan oleh BPD. Jika mengikuti skema pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), partisipasi merupakan arena dan proses yang menghubungkan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat sipil, yang tentu saja memberi bobot yang lebih besar kepada masyarakat sipil. Dalam konteks sistem, partisipasi warga merupakan bentuk input bagi proses pembuatan kebijakan, sekaligus sebagai tuntutan dan mandat yang memungkinkan pemerintah desa bekerja secara transparan, akuntabel dan responsif.

Selama ini partisipasi masyarakat, seperti halnya demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, merupakan sesuatu yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tetapi secara empirik keduanya juga problematik. Debat akademik dan politik sehari-hari selalu menampilkan sejumlah pertanyaan (baik yang kritis maupun sinis) yang ditujukan pada demokrasi. Siapa yang disebut rakyat? Apakah orang miskin, kerumunan, gerombolan, atau massa di jalanan pantas disebut rakyat? Bagaimana cara rakyat memerintah? Bukankah rakyat sudah mempunyai wakil rakyat dalam parlemen yang bertugas membawa mandat dan menjalankan pemerintahan? Apakah kepala pemerintahan dan wakil rakyat belum cukup absah (*legitimate*) menjalankan pemerintahan?

Pertanyaan senada juga sering ditujukan kepada isu partisipasi masyarakat. Siapa masyarakat itu? Apakah setiap individu maupun kerumunan massa di jalanan bisa disebut masyarakat? Siapa yang berhak berpartisipasi dan bagaimana cara berpartisipasi? Mengapa partisipasi setiap hari perlu dilembagakan? Bukankah masyarakat sudah menjalankan partisipasi politik dalam pemilihan umum untuk memilih kepala pemerintahan dan wakil rakyat? Apakah kepala pemerintahan dan wakil rakyat (BPD) belum cukup absah (*legitimate*) menjalankan pemerintahan, sehingga masih perlu adanya tambahan partisipasi? Bukankah masyarakat sudah begitu repot menjalankan aktivitas sosial-ekonomi mereka sehari-hari?

Berbagai pertanyaan di atas tentu sangat relevan dengan konteks dan proses pembuatan kebijakan desa. Anjuran akademik, perintah regulasi, ungkapan resmi pejabat maupun seruan aktivis umumnya menegaskan bahwa pembuatan kebijakan sebaiknya atau seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya agar kebijakan yang diambil itu sesuai dengan aspirasi masyarakat, lebih *legitimate* dan tidak menimbulkan kerugian (risiko buruk) bagi masyarakat. Banyak contoh kebijakan pemerintah yang akhirnya menimbulkan masalah atau bahkan ditentang oleh masyarakat karena kurangnya partisipasi.

Akan tetapi bagi kalangan yang berhaluan formalis, partisipasi sebenarnya merupakan sesuatu yang bikin repot dan tidak efisien. Lagipula mereka sering kebingungan menghadapi persoalan tentang siapa (representasi) masyarakat dan bagaimana (prosedur) mekanisme atau wadah partisipasi. Mereka sering

mengatakan bahwa perumusan kebijakan lebih baik diserahkan kepada yang “berwenang” (pemerintah dan wakil rakyat) maupun kepada yang “ahli” atau para tokoh masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Jika kebijakan hanya diserahkan kepada yang “berwenang” maka akan menghasilkan kebijakan otokratis atau oligarkis, yang pada praktiknya sering bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Sedangkan kebijakan yang hanya diserahkan kepada yang “ahli” maka proses dan hasilnya adalah kebijakan teknokratis yang miskin pemberdayaan (pembelajaran dan partisipasi) masyarakat. Kedua model kebijakan itu memang efisien dan efektif, tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan pertentangan dari masyarakat karena tidak aspiratif, sekaligus melemahkan kompetensi warga, membuahkan sikap apolitik (apatis) dan menimbulkan *distrust* antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu dibutuhkan proses dan hasil kebijakan yang demokratis (transparan, responsif, partisipatif dan *legitimate*) melalui proses deliberatif (permusyawaratan) antara pemerintah desa dan warga masyarakat.

Kondisi Partisipasi

Partisipasi warga di aras desa adalah barang yang mahal atau sering disebut dengan partisipasi semu. Partisipasi sering diungkapkan oleh kepala desa, tetapi pemahaman dan praktiknya bias menjadi sosialisasi kebijakan dan mobilisasi dukungan. Banyak kepala desa yang aktif menyampaikan sosialisasi kehendak dan kebijakannya kepada masyarakat, dari kelompok ke kelompok, atau dari dusun ke dusun, dan dari RT ke RT, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Dukungan itu tidak lain adalah kesediaan masyarakat menjalankan program dan berbagi swadaya atau gotong royong, karena pemerintah dan desa sudah memberikan stimulan. Umumnya program yang dikemas itu adalah pembangunan prasarana fisik, sebab ini adalah proyek yang mudah dilihat mata dan indikator prestasi kepala desa, mudah diperhitungkan, dan mudah menggali swadaya masyarakat.

Tetapi paduan antara stimulan dan swadaya itu butuh pencermatan secara kritis. Dalam konteks pembangunan fisik yang bias kota, paduan stimulan-swadaya merupakan pendekatan utama yang diterapkan untuk pembangunan di aras desa. Selama ini pemerintah, termasuk daerah, tidak mempunyai komitmen yang memadai dalam membangun desa dan mengalokasikan dana ke desa, sehingga jalan yang selalu ditempuh adalah memberikan stimulan dan kemudian warga desa *sharing* swadaya. Pada umumnya angka swadaya masyarakat ini memberikan kontribusi angka yang cukup besar dalam struktur APBDes, sementara komposisi APBD tidak mengenal swadaya masyarakat.

Mobilisasi dukungan swadaya itu di aras desa sebenarnya tidak berjalan secara mulus dan otentik. Kebanyakan warga desa merasa terpaksa dalam membayar iuran untuk swadaya, agar mereka tetap dianggap sebagai warga yang lumrah dalam bermasyarakat. Jika mereka tidak bersedia mendukung swadaya maka akan dituding sebagai orang yang tidak lumrah oleh para pemimpin atau tokoh masyarakat. Yang paling bersemangat mengerahkan swadaya adalah kepala desa dan para tokoh masyarakat yang umumnya hidup lebih mapan ketimbang warga biasa. Kepala desa tentu sangat berkepentingan dengan swadaya sebab besaran swadaya merupakan salah satu indikator prestasinya

dalam membangun desa. Pemerintah juga sering mengklaim besarnya swadaya masyarakat sebagai prestasi keberhasilannya.

Tidak banyak pihak yang memandang kritis terhadap swadaya masyarakat. Belum lama ini kami berdiskusi dengan Bupati Gunungkidul, Suharto, yang ternyata sangat peka terhadap persoalan eksploitasi atas swadaya masyarakat. Berikut ini tuturnya:

Di Gunungkidul pendekatan stimulan kami cermati justru memberatkan rakyat desa. Semakin banyak stimulan yang diberikan ke desa, maka semakin berat beban rakyat desa. Rakyat akan menjual gaplek atau barang lain untuk mengimbangi stimulan. Masalahnya terletak pada kesenjangan antara kota-desa dan antara sektoral-wilayah. Pembangunan lebih berorientasi pada sektor dan lebih banyak di kota. Karena itu, mulai sekarang, kami sudah mencanangkan keseimbangan pembangunan. Desa kami perhatikan secara serius. ADD akan kami berikan kepada desa sebagai bentuk alokasi yang menjadi hak desa dan insentif kepada desa.

Konsep alokasi atau insentif tampaknya merupakan alternatif pengganti atas stimulan, yang berguna untuk memberi ruang bagi partisipasi warga desa. Selama ini partisipasi dalam arti yang sebenarnya mengalami kemundulan karena terbatasnya insentif yang diberikan oleh pemerintah. Di Gunungkidul misalnya, warga desa cenderung enggan berpartisipasi dalam Musbangdes karena mereka sudah bersusah-payah tetapi ternyata tidak ada uang yang muncul alias *mboten up*. Jika uang tidak muncul dari kabupaten, maka yang akan menjadi penggantinya adalah swadaya. Mereka malah lebih bersemangat terlibat dalam musyawarah proyek PPK (Program Pengembangan Kecamatan), karena proyek ini jelas mendatangkan uang ke desa yang bisa langsung dibagi-bagi ke dusun.

Pengalaman berharga lain juga muncul dari daerah-daerah yang sudah melancarkan kebijakan alokasi dana desa (ADD). ADD merupakan bentuk alokasi atau insentif yang lebih pasti bagi desa, sehingga membangkitkan semangat pembelajaran dan partisipasi warga desa.

Namun insentif adalah solusi partisipasi yang parsial. Bahkan bisa menjadi partisipasi yang semu, sebab rakyat bersedia berpartisipasi karena ada maunya. Partisipasi tentu tidak lepas dari konteks sistem dan tradisi politik di desa. Kepala desa umumnya lebih mengandalkan otoritas ketimbang partisipasi, bahkan cenderung resisten dengan partisipasi yang luas. “Kalau semuanya harus dibuka dengan partisipasi, lalu wewenang pemerintah desa itu apa?”, demikian ungkap seorang kepala desa ketika memberi tanggapan tentang partisipasi. “Partisipasi masyarakat itu masyarakat yang mana? Kan sudah ada RT, LPMD, sebagai wadah partisipasi. Apakah saya harus melayani aspirasi setiap orang yang ada di jalan”, ungkap kepala desa yang lain. Karena resistensi ini, para kepala desa umumnya tidak begitu peka terhadap segmentasi yang beragam dalam masyarakat. Dia lebih mengutamakan unsur-unsur representasi yang formal, sementara yang informal (jika bukan disebut ilegal) tidak memperoleh tempat yang memadai. Kepala desa sering peka terhadap legitimasi, tetapi tidak dia bangun dengan partisipasi yang memadai. Dia sering melakukan konsultasi

dengan tokoh-tokoh masyarakat, sementara pendekatan sosialisasi kebijakan yang sudah matang ditempuh untuk unsur-unsur representasi dalam masyarakat. Di sisi lain, partisipasi warga kebanyakan mereka serahkan (delegasi) kepada para tokoh masyarakat. Inilah yang membuat kebijakan menjadi elitis-oligarkis.

Desa sebenarnya mempunyai ukuran yang lebih kecil ketimbang ukuran daerah. Di level daerah partisipasi bisa dibuka bukan hanya dengan cara dengar pendapat dalam forum, tetapi juga mempunyai banyak instrumen dalam bentuk media massa, yang berfungsi sebagai jembatan dan ruang publik yang bebas. Sementara di desa, akses dan partisipasi warga terhadap desa masih terlalu jauh. Partisipasi dalam bentuk rembukan umumnya dilokasir di tingkat RT maupun dusun, baru kemudian dibawa naik ke desa oleh elite RT dan dusun.

Jika dusun dan RT merupakan arena lokalisasi partisipasi secara teritorial, PKK merupakan arena lokalisasi partisipasi menurut sektor perempuan. Antara sektor dan wilayah betul-betul terpisah. Dusun dan RT merupakan arena kaum laki-laki, yakni kepala keluarga. Arena PKK betul-betul terpisah dari arena RT dan dusun. Di level desa, partisipasi perempuan juga dibatasi pada PKK desa.

Ruang partisipasi dan sedekah umumnya hanya diberikan kepada organisasi-organisasi korporatis yang resmi. Sementara kelompok-kelompok masyarakat yang informal kurang memperoleh sentuhan. Kelompok tani, pengrajin, keagamaan, dan lain-lain – yang bisa disebut aktor-aktor *civil society* – umumnya masih sangat lemah. Umumnya mereka hanya berorientasi pada kepentingan *self-help* dan kegiatan ritual-keagamaan yang kurang kritis. Yang disebut terakhir ini memang otonom dari negara, tetapi sebagai masyarakat sipil ia menjadi involutif karena tidak *concern* pada isu-isu publik yang menghubungkan warga masyarakat dengan pemerintah.

Meski masih prematur pemuda merupakan aktor yang penting dalam penguatan *civil society* di desa. Kelompok pemuda umumnya yang menjadi motor penggerak organisasi baru karena mereka tidak puas dengan Karang Taruna yang dibentuk Orde Baru untuk mengontrol pemuda. Perkumpulan pemuda yang terwadahi dalam Karang Taruna dulunya adalah organisasi korporatisme negara yang paling getol mengkerangkeng aktivitas para pemuda pada ranah hobby dan olahraga belaka. Tetapi sejak reformasi berjalan, muncul adanya kecenderungan positif yang membawa pemuda menjadi lebih kritis dalam menyikapi dinamika sosial politik yang berlangsung di desanya. Kini kegiatan pemuda sudah mulai mengarah pada kegiatan sosial yang produktif. Di banyak desa, para pemuda mulai mencoba menggerakkan aktivitas sosial di komunitasnya masing-masing. Aktivitas Karang Taruna yang biasanya berada di level desa, sudah mulai bergeser di level dusun atau komunitasnya masing-masing. *Trend* semacam ini menunjukkan bahwa kaum muda mulai tidak bisa dikooptasi, bahkan oleh struktur pemerintahan paling rendah yang ada, yaitu desa.

Selain ada banyak organisasi, desa sebenarnya juga kaya akan ruang publik. Berbagai forum (RT, kampung, selapanan, rembug desa, dan lain-lain) merupakan ruang publik yang konkret dan sudah lama berkembang di desa. Sebagai ruang publik, forum bisa digunakan sebagai arena menyemai proses pembelajaran dan deliberasi (diskusi atau musyawarah) untuk membicarakan

(memetakan masalah, mencari solusi dan perbaikan) pengelolaan barang-barang publik (keuangan desa, lingkungan, sampah, keamanan, jalan kampung, pertanian, tanah, dan lain-lain) maupun hubungan sosial. Proses belajar dan hasil forum tentu sangat berguna untuk membangun pemahaman bersama, membuat cerdas warga desa, membuat kebijakan yang responsif dan menggerakkan tindakan bersama.

Berdasarkan pemantauan kami, sayangnya proses pembelajaran dan deliberasi dalam forum itu belum berjalan secara optimal. Sebagian besar orang, terutama rakyat biasa, yang datang ke forum umumnya hanya unjuk wajah, basa-basi, dan asal datang untuk menunjukkan dirinya sebagai “orang lumrah” dalam bermasyarakat. Forum belum berjalan secara progresif, yang terjadi baru sebatas sosialisasi rencana elite desa dan tanya jawab, sarat dengan dominasi elite dan yang memanfaatkan forum hanya segelintir orang yang “melek” masalah. Forum yang intensif biasanya terjadi di kalangan para pengurus kampung atau forum pamong desa beserta BPD, karena mereka termasuk komponen yang “melek” masalah dan “tokoh” yang memperoleh mandat dari rakyat. Hasil pembicaraan mereka lalu dilanjutkan dalam bentuk sosialisasi ke dalam forum yang lebih besar. Karena itu umumnya forum-forum yang bersifat elitis ini belum efektif untuk mencerdaskan rakyat biasa, penyaluran aspirasi, dan partisipasi warga desa.

Kemungkinan Partisipasi

Partisipasi berkaitan dengan tiga hal: arena, substansi dan proses. Arena utama partisipasi adalah kebijakan (baik dalam bentuk peraturan maupun program), sebab kebijakan merupakan tempat yang mempertemukan antara pemerintah desa dan warga masyarakat. Dengan kalimat lain, sebenarnya pertemuan antara pemerintah dan warga desa bukan diukur secara fisik atau kehadiran fisik kepala desa dalam berbagai kegiatan ritual (anjungsana, gotong-royong, jagong dan layat), tetapi juga diukur dengan kebijakan.

Desentralisasi, atau keberadaan pemerintahan lokal seperti desa, pada prinsipnya mendekatkan pemerintah kepada rakyat melalui akuntabilitas dan responsivitas, sekaligus mendekatkan rakyat kepada pemerintah melalui partisipasi. Hubungan simbiosis antara desentralisasi dan partisipasi ini dapat mengarah pada garis pedoman kebijakan yang agak bertentangan. Mekanisme partisipasi warga negara dapat dianggap sebuah prasyarat yang sangat berguna ketika mengevaluasi prospek desentralisasi yang berhasil. Karena itu, desain desentralisasi harus memperhitungkan kesempatan dan keterbatasan yang ditentukan oleh saluran partisipasi lokal. Kekurangan mekanisme partisipatoris, bagaimanapun, dapat dianggap sebuah motivasi untuk desentralisasi dan dapat membantu menciptakan tuntutan lokal terhadap saluran partisipatoris yang lebih banyak untuk menyuarakan preferensi. Saluran partisipasi yang dilembagakan dan kemampuan orang untuk menggunakan saluran tersebut harus dipertimbangkan dalam desain desentralisasi. Pemilu lokal yang jujur dan teratur, semaraknya forum warga, dan tingkat modal sosial yang tinggi (kesatuan komunitas dan sejarah kerja sama) memungkinkan warga negara untuk menandai preferensi mereka secara efisien dan menjalankan pemenuhan keinginan mereka oleh pemimpin.

Partisipasi warga dapat dibenarkan dalam hubungannya dengan legitimasi berorientasi *input* dan *output*, dan ia dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas sistem. Legitimasi berbasis-*input* mengungkapkan nilai partisipasi luas dalam governance, yang memperlihatkan perlunya penentuan-sendiri dan persetujuan rakyat, di mana nilai-nilai demokrasi sangat kuat. Partisipasi warga di luar pemilihan memberi saluran lebih lanjut bagi rakyat untuk mengungkapkan preferensi mereka, dan teori yang berhubungan dengan demokrasi partisipatoris memuat unsur-unsur yang berhubungan dengan legitimasi input. Pateman yang mengupas karya Rousseau, Mill dan Cole, menunjuk pada tiga alasan mengapa partisipasi luas diperlukan sekali—ia mendidik partisipan, ia memberi warga kontrol, dan ia menghasilkan identitas komunitas (1970: 22-29). Pemerintah demokratis, yang dipedomani oleh input partisipasi warga, hanya menghasilkan kebijakan, karena ia tidak akan mungkin setuju pada kegiatan-kegiatan yang tidak adil. Partisipasi warga menyokong dan mendukung sistem partisipatoris, karena “kualitas yang diperlukan warga adalah kualitas proses partisipasi itu sendiri yang mengembangkan dan membantu perkembangan” (Pateman, 1970: 25). Partisipasi warga membantu mendidik rakyat dalam seni partisipasi.

Partisipasi warga juga dapat memberikan kontribusi terhadap legitimasi berbasis-*output*. Keterlibatan warga membantu menjamin persetujuan publik, dan ini pada gilirannya akan membantu pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Mereka yang terlibat dalam penyiapan kebijakan dan permusyawaratan kebijakan lebih mungkin untuk tunduk ketika kebijakan itu berlaku, khususnya jika mereka adalah di kalangan mereka dari mereka yang dipengaruhi dan mendapat dampak. Pembenaran ini adalah pembenaran yang timbul dari perdebatan terdahulu dan lebih belakangan ini. Pateman berargumen partisipasi “membantu penerimaan keputusan bersama” (1970: 43). Demikian pula, model-model keterlibatan misalnya debat publik, keterlibatan dari mereka yang dipengaruhi, atau keterlibatan para ahli dibenarkan secara fungsional dengan alasan bahwa mereka membantu meningkatkan penerimaan dan pemecahan persoalan atau membantu memfasilitasi pelaksanaan. Partisipasi ini dapat juga membantu pembuat kebijakan lebih tahu, dan karena itu membuat keputusan lebih efektif, karena para wakil dan kaum profesional membuat keputusan yang didasarkan pada pengetahuan publik dan keahlian politik dan profesional.

Substansi partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal: suara (*voice*), akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari (Sutoro Eko, 2004). *Pertama*, suara (*voice*) adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri.

Kedua, akses berarti kesempatan, ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses warga terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang

akses warga dan memberikan layanan publik pada warga, terutama kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya warga secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Pemerintah wajib merespons gagasan warga sehingga bisa dirumuskan visi dan kebijakan bersama dengan berpijak pada kemitraan dan kepercayaan.

Ketiga, kontrol warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Kita mengenal kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal. Artinya kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan risiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka. *Self-control* ini sangat penting karena masyarakat sudah lama berada dalam konteks penindasan berantai: yang atas menindas yang bawah, sementara yang paling bawah saling menindas ke samping. Artinya kontrol eksternal digunakan masyarakat untuk melawan eksploitasi dari atas, sementara *self-control* dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama masyarakat, seraya hendak membangun tanggungjawab sosial, komitmen dan kompetensi warga terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Proses partisipasi adalah berbagai kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah dan warga desa, atau kegiatan yang dilakukan warga dalam menyampaikan suara, akses dan kontrol. Berbagai kegiatan itu antara lain: warga melakukan unjuk rasa, forum warga, konsultasi antara pemerintah desa dengan warga, dengar pendapat antara warga dengan BPD, dan masih banyak lagi. Pada prinsipnya proses partisipasi terkait dengan tiga pertanyaan: (a) siapa rakyat yang berpartisipasi; (b) bagaimana rakyat berpartisipasi; dan (c) apa yang dibawa dalam partisipasi.

“Siapa” adalah pertanyaan yang sering terkait dengan representasi yang sering ditanyakan oleh unsur pemerintah. “Kalian ini mewakili siapa?, adalah sebuah pertanyaan defensif yang sering dikemukakan pemerintah ketika menghadapi “gerombolan” orang yang menyampaikan aspirasi. Jika representasi ditonjolkan maka justru menjadi jebakan bagi partisipasi. Pemerintah desa tidak perlu risau mengenai problem representasi (siapa unsur masyarakat yang akan dilibatkan dalam pembuatan kebijakan daerah). Selain ada representasi yang sudah terlembagakan secara formal, dalam masyarakat tentu ada segmentasi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Jika pemerintah desa mencermati dan peka terhadap segmentasi dalam masyarakat, hal ini sudah merupakan langkah yang positif dan maju. Kalau menurut bahasa sekarang, segmentasi bisa disebut *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan. Pada prinsipnya setiap individu atau segmen masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan suara (*voice*) kepada pemerintah. *Voice* ini, meski sangat beragam dan tidak terlembaga, merupakan salah satu bentuk partisipasi publik. Pemerintah desa tidak perlu menyampaikan pertanyaan “kalian ini mewakili siapa” kalau ada individu atau segmen masyarakat menyampaikan suara. Pemerintah desa diharapkan memberikan respons (mendengarkan dan mencermati) *voice* yang muncul dari setiap individu. Kalau memberikan respons

terhadap segmentasi masyarakat mengalami kesulitan karena keragaman dan kerumitan, maka langkah minimal yang bisa ditempuh pemerintah desa dalam partisipasi adalah melibatkan segmen masyarakat yang paling terkena risiko dari sebuah kebijakan.

“Bagaimana” merupakan pertanyaan kritis yang terkait dengan inklusi, yakni bentuk-bentuk keterlibatan warga maupun cara atau metode yang ditempuh pemerintah dalam berhubungan dengan warga. Selama ini cara paling populer yang dilakukan pemerintah desa adalah menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dengan mengundang wakil-wakil warga (ketua RT, RW, dusun, PKK, pemuda, LPMD, tokoh masyarakat, dll). Ini merupakan prosedur yang standar. Pemerintah umumnya sering mengklaim bahwa kebijakan yang diambil sudah partisipatoris dan aspiratif karena sudah melakukan sosialisasi kepada sebagian segmen warga. Banyak kalangan sering memberi usulan agar kualitas partisipasi ditingkatkan dari sekadar sosialisasi (Anda bertanya, saya menjawab) menjadi konsultasi (proses komunikasi dua arah), meski secara teoretis konsultasi ini masih bersifat tokenisme. Konsultasi ini fisibel sebab secara empirik warga masyarakat pada umumnya masih bersifat apatis. Dalam konteks seperti ini, tentu tidak akan fisibel membangun partisipasi pada tangga yang lebih tinggi sampai pada *delegated control*. Sebaliknya kalau mekanisme partisipasi berada di bawah tangga konsultasi, maka yang terjadi adalah manipulasi, bukan partisipasi. Meski konsultasi merupakan mekanisme yang fisibel, namun ia perlu disertai atau bahkan diawali dengan proses deliberasi sehingga konsultasi menjadi lebih bermakna ketimbang sebuah prosedur.

Namun partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu yang mekanis-prosedural, misalnya melibatkan (mengundang) berbagai segmen masyarakat dalam sosialisasi. Mekanisme-prosedur sangat penting tetapi belum cukup untuk dikatakan sebagai partisipasi yang bermakna. Lebih dari sekadar mekanisme-prosedur, partisipasi sebenarnya merupakan sebuah ruang dan arena pembelajaran (pendidikan) politik untuk membangun kompetensi warga. Warga yang kompeten adalah warga yang tahu, *well-informed*, kritis, sadar akan hak-kewajiban, kooperatif, percaya dan mendukung (*supporting*) kebijakan pemda. Kompetensi warga memang tidak bisa dibangun secara instan dalam jangka pendek, tetapi bisa disemai melalui proses *learning by doing* secara berkelanjutan. Dengan kalimat lain, proses keterlibatan (*involvement*) segmen-segmen masyarakat dalam proses kebijakan (misalnya dalam sosialisasi) sangat penting, tetapi proses deliberasi jauh lebih penting ketimbang *involvement*. Deliberasi adalah sebuah proses diskusi, dialog atau permusyawatan baik melalui forum antara segmen masyarakat dengan Pemda-DPRD maupun diskusi dalam ruang publik (forum warga, diskusi publik, dialog melalui media, dll) yang lebih luas. Proses ini sangat penting untuk menggali ide-ide dari berbagai segmen, penyebaran wacana ke publik, sekaligus sebagai arena pembelajaran politik untuk membangun kompetensi warga.

“Apa” adalah pertanyaan kritis yang terkait dengan “amunisi” bagi warga ketika terlibat dalam proses konsultasi dan deliberasi. Amunisi mencakup ide, pengetahuan, aspirasi, kebutuhan dan sebagainya. Tanpa amunisi yang memadai maka partisipasi tidak bermakna. Meski sebuah sosialisasi kebijakan melibatkan banyak orang tetapi mereka hanya sekadar datang tanpa amunisi yang memadai,

maka forum itu menjadi kurang bermakna. Sebagai contoh sekelompok warga yang datang beraudiensi dengan kepala desa hingga bupati sering dituding “asal bunyi” atau malah argumen mereka mudah dipatahkan oleh amunisi kades atau bupati karena mereka memiliki kelemahan dalam menguasai gagasan dan informasi. Penguasa mesti mempunyai “amunisi” yang lebih banyak dan tajam ketika mereka menghadapi gugatan dari warga. Problem ini sering menjadi jebakan di kalangan NGOs, yang menggerakkan partisipasi hanya dengan mengutamakan “siapa” dan “bagaimana” berpartisipasi, tetapi melupakan aspek “apa” yang dibawa dalam partisipasi.

Agenda Penguatan

Agenda penguatan masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup sistem, budaya dan metodologi. Ketiga sisi ini menganjurkan bahwa partisipasi tidak mungkin berdiri sendiri sebagai gerakan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk perpaduan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau partisipasi hanya sebagai berkubang pada prakarsa dan gerakan masyarakat, itu berarti hanya kegiatan yang bertepuk sebelah tangan. Partisipasi semacam ini hanya menggerakkan masyarakat, tetapi tidak mempunyai dampak terhadap kebijakan. Karena itu perubahan atau penguatan partisipasi membutuhkan interaksi yang aktif antara pemerintah desa dan warga masyarakat.

Interaksi itulah yang kita sebut sebagai sistem. Sistem mencakup desain kelembagaan dan tindakan pemerintah yang memungkinkan tumbuhnya partisipasi, jika pemerintah menghendaki tumbuhnya partisipasi yang sejati. Perda atau Perdes tentang partisipasi penting untuk melembagakan partisipasi, tetapi hal itu belum cukup. Di aras desa, partisipasi warga dan responsivitas pemerintah tidak bisa dipisahkan. Partisipasi masyarakat tanpa responsivitas pemerintah sama saja dengan bertepuk sebelah tangan, tidak akan membuahkan kebijakan yang bermakna, seakan-akan yang mempunyai kepentingan terhadap isu-isu publik hanya masyarakat. Sebaliknya responsivitas tanpa partisipasi hanya akan membuat pemerintah yang aktif tetapi masyarakat yang pasif, sehingga proses kebijakan miskin informasi, aspirasi dan pembelajaran bersama. Perpaduan antara responsivitas dan partisipasi akan membuat daerah lebih semarak, kemitraan dan saling percaya (*mutual trust*), dan menghasilkan kebijakan yang lebih *legitimate*-aspiratif.

Pendekatan sistemik tentu juga membutuhkan sentuhan kebijakan dari pemerintah kabupaten. Proses pembangunan yang partisipatif, atau hubungan antara pemerintah desa dan warga desa yang partisipatif, membutuhkan insentif (bukan sekadar stimulan) dari pemerintah kabupaten. Insentif itu tidak lain adalah pembagian kewenangan, keuangan dan tanggungjawab yang memadai kepada desa. Jika dibaca melalui konsep pemberdayaan, maka pendekatan stimulan itu identik dengan memberi “pancing” pada rakyat yang sering dikemukakan banyak orang. Saya paling tidak setuju dengan pemaknaan pemberdayaan dengan metafora memberi pancing. Mengapa? Kalau rakyat diberi pancing (stimulan), pancing itu akan digunakan untuk apa, untuk memancing apa? *Kan*, rakyat desa sudah tidak lagi mempunyai kolam. Pancing yang diberikan oleh pemerintah itu tidak akan berguna karena rakyat sudah tidak

mempunyai kolam, desa tidak mempunyai apa-apa yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Pemberdayaan memang bukan berarti memberi ikan secara langsung kepada rakyat, tetapi yang paling vital adalah membagi kolam beserta bibit ikan dan pancing kepada rakyat desa.

Dimensi kedua dalam penguatan partisipasi adalah budaya, yakni pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan tindakan sehari-hari yang dimiliki pemerintah dan warga desa. Budaya juga berarti tradisi atau kebiasaan yang mengutamakan konsultasi, deliberasi, diskusi, forum dan ruang publik. Pembangunan dan pemerintahan yang partisipatif tentu membutuhkan tradisi seperti itu dan orang-orang desa yang demokratis. Banyak contoh membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sejumlah desa penelitian kami bisa tumbuh secara partisipatif antara lain didukung oleh kepala desa yang progresif dan demokratis. Sebaliknya regulasi yang mewajibkan partisipasi tidak akan mempunyai makna jika orang-orang desa tidak mempunyai budaya demokrasi dan partisipasi. Kepala desa yang hanya terbiasa dekat dengan rakyat secara fisik dan personal (melalui kegiatan ritual) umumnya tidak mempunyai visi dan budaya demokrasi.

Dimensi ketiga adalah pembaharuan metodologi partisipasi. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. *Pertama*, mendorong kesadaran dan kapasitas kritis berbagai organisasi lokal terhadap isu-isu publik (pemerintahan dan pembangunan). Kesadaran dan kapasitas kritis tentu bisa ditempa melalui pembalajaran lokal, sebelum warga masuk ke dalam forum warga, misalnya melalui diskusi di setiap ruang publik yang ada (warung, pos kamling, sungai, sawah, hutan, dan sebagainya).

Kedua, akses dan arus informasi yang terbuka merupakan rujukan pengetahuan bagi warga untuk berpartisipasi. Yang paling dasar informasi memberi pasokan pengetahuan untuk berpartisipasi. Informasi adalah kekuatan. Warga yang berpengetahuan adalah lebih berpendidikan untuk mengambil keuntungan kesempatan, mengakses pelayanan, menggunakan hak-haknya, berunding dengan efektif, membuat pelaku pemerintah dan non-negara bertanggung jawab (*accountable*). Tanpa informasi yang bersangkutan paut (*relevant*), tepat pada waktunya, dan tersajikan dalam bentuk yang dapat dipahami, tidak mungkin bagi warga desa mengambil tindakan efektif. Yang lebih *advanced* partisipasi akan jauh lebih kuat dan bermakna, bahkan menghindari stigma “asal bunyi”, jika ditopang oleh informasi yang memadai. Bagaimanapun partisipasi bukan hanya persoalan “siapa” yang dilibatkan, atau “bagaimana” proses dan mekanisme partisipasi, tetapi juga harus mencakup “apa” yang akan dibawa dalam berpartisipasi. Keterbukaan informasi itu memang tidak mudah, karena pemegang kebijakan biasanya enggan berbagi informasi secara transparan. Karena itu dibutuhkan katalis-katalis lokal, termasuk BPD dan tokoh masyarakat, yang proaktif menjembatani arus informasi antara warga dan pemerintah desa.

Ketiga, proses yang bersifat deliberatif dan inklusif sangat dipengaruhi oleh penguasaan dan keterampilan menggunakan berbagai metode dan teknik partisipasi. Metode partisipasi yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan situasi, sangat diperlukan agar partisipasi yang berjalan menjadi suatu proses yang kreatif, produktif dan sekaligus memberdayakan. Proses yang deliberatif

dan inklusif juga menuntut perubahan peran perencana atau para katalis komunitas menjadi lebih sebagai perantara, negosiator dan mediator. Mereka harus memahami masalah dan melihat peluang untuk masa depan melalui pandangan multipihak. Tantangan yang terbesar dalam proses partisipasi adalah bagaimana suara mereka yang tertinggal dapat didengar dan mempengaruhi keputusan yang diambil.

Keempat, mengeksplorasi nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat partisipasi (kebersamaan dan solidaritas, tanggung jawab, kesadaran kritis, sensitif perubahan, peka terhadap lokalitas dan keberpihakan pada kelompok marginal, dll). Kelima, menghidupkan kembali institusi-institusi *volunteer* sebagai media kewargaan yang pernah hidup dan berfungsi untuk kemudian dikontekstualisasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama dinamika kontemporer (misalnya forum rembuk desa atau rembuk dusun). Keenam, memfasilitasi terbentuknya asosiasi-asosiasi kewargaan yang baru berbasiskan kepentingan kelompok keagamaan, ekonomi, profesi, minat dan hobi, dan politik maupun aspek-aspek kultural lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai arena interaksi terbuka. Ketujuh, mengkampanyekan pentingnya kesadaran inklusif bagi warga desa dalam menyikapi sejumlah perbedaan yang terjadi dengan mempertimbangkan kemajemukan. Kedelapan, memperluas ruang komunikasi publik atau semacam *public sphere* yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk melakukan kontak-kontak sosial dan kerjasama (IRE, 2003).

Penutup

Dalam rangka pengembangan kelembagaan partisipasi, dapat dibingkai dengan tiga kerangka besar. *Pertama*, adanya sistem komunikasi yang efektif diantara anggota atau kelompok masyarakat. *Kedua*, adanya mekanisme yang terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya. *Ketiga*, adanya pengaruh dan keterlibatan masyarakat yang signifikan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan.

Akhirnya penguatan kelembagaan partisipatif akan efektif jika diikuti dengan upaya menghilangkan rintangan-rintangan politik, sosial dan budaya yang menghalangi masyarakat desa untuk ikut ambil bagian secara penuh dalam proses-proses pembangunan. Untuk itu perlu terus didorong model kepemimpinan fasilitatif bagi pemimpin-pemimpin lokal yang mampu menumbuhkan prakarsa, inisiatif dan kreasi masyarakat.

Referensi

- Abe, Alexander. (2005), *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Eko, Sutoro. (2004), *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD Press.
- IRE, *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: IRE Press.
- Sugiartoto, Agus Dody (2003), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo*, Solo: IPGI.

- Sumarto, Hetifah. (2003), *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Sumarto, Hetifah (2004), *Model-Model Pelembagaan Partisipasi Warga Pengalaman Dari Kota Solo*, Makalah Disampaikan dalam Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) VII di Ngawi-Jawa Timur, Tanggal 15-18 Juni 2003
- Suhirman, (2003), *Mendefinisikan Partisipasi: Penelusuran Awal Atas Konsep, tahap, dan Dinamika Partisipasi*, makalah ini Disampaikan dalam Pertemuan Forum Pengembangan partisipasi Masyarakat (FPPM) VII di Ngawi-Jawa Timur, Tanggal 15-18 Juni 2003

Bab 10

Jaminan Sosial

Bagi Keluarga Miskin

Hardjono

*Orang miskin bukanlah suratan
dan tidak cukup dibelas kasihani
perlu diberdayakan
agar mampu mandiri.*

Setiap orang dalam keadaan apapun, dan dimanapun dapat mengalami keadaan yang tidak nyaman, tidak tentu dan ketidakpastian (*insecurity*), yang dapat mengganggu, atau menghambat pelaksanaan fungsi sosial dan ekonominya. Demikian halnya tiap pekerja di bidang apapun, tidak terlepas dari kemungkinan menghadapi risiko kecelakaan kerja, atau bahkan kemungkinan kehilangan pekerjaan. Seorang pekerja bangunan dapat cacat fisik, atau meninggal dunia karena terimpa reruntuhan tembok bangunan atau jatuh terpelanting dari ketinggian tertentu. Penambang pasir dapat tertimbun tanah longsor, yang mengakibatkan sakit atau kematiannya. Seorang sopir atau masinis kereta api, pengendara sepeda motor, tewas karena peristiwa tabrakan. Mahasiswa berangkat kuliah karena kecelakaan lalu lintas dapat masuk rumah sakit. Nelayan yang mencari ikan di tengah laut karena diterpa badai atau gelombang air laut, kapalnya terguling dan tenggelam, mengakibatkan kematiannya. Petani di sawah dapat disambar petir. Dalam bentuk risiko yang lebih ringan, seorang karyawan toko, pramuria tempat hiburan, pekerja pabrik konfeksi, wartawan, guru, dosen, operator komputer, buruh pabrik, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengamen, pengemis, penjual bakso, dapat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau menderita sakit, sehingga kemampuan bekerjanya berkurang, produktivitas menurun dan terhambat masa depannya. Demikian pula terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, karena tempat bekerja mengalami kebangkrutan, sehingga ia menjadi pengangguran. Karyawan yang sudah mencapai batas usia kerja di perusahaan harus bebas tugas, sehingga kehidupan ekonomi keluarganya menjadi menurun, karena tidak memperoleh bekal santunan hari tua. Dapat dibayangkan bagaimana nasib atau masa depan pekerja beserta keluarganya, nasib anak dan isteri yang menjadi tanggungannya, jika tidak ada jaminan sosial apapun yang mereka peroleh. Mungkin mereka akan hanyut dalam lembah kemiskinan, dan masa depan anak-anaknya akan terbengkelai.

Bagi keluarga miskin (gakin) akan semakin parah, jika salah satu anggota keluarga ada yang menderita sakit. Biaya berobat, perawatan kesehatan, ongkos rumah sakit semakin mahal, sehingga biaya tersebut tidak mungkin terjangkau bagi gakin. Demikian halnya jika keluarga tersebut masih dibebani biaya pendidikan anak yang dari waktu ke waktu terus naik, sehingga beban hidup

setiap gakin semakin berat. Semua beban tersebut harus ditanggung sendiri, sementara itu untuk mencukupi kebutuhan pokok saja masih sangat sulit.

Menghadapi hal-hal yang tidak menentu seperti itu, maka jaminan sosial (*social security*) menjadi sangat dibutuhkan dan sangat relevan yang berlaku secara masal, karena merupakan landasan yang elementer bagi pemenuhan kesejahteraan sosial. Jaminan sosial merupakan komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku secara masal bagi seluruh warga negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan dasar terhadap ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi masalah sosial tertentu. Hal ini menekankan bahwa jaminan sosial mengandung muatan normatif yang mengatur hak dari setiap warga negara untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu dapat diformulasikan secara kontekstual sebagai refleksi dari pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap warga negara yang mengalami *social hazards* (risiko sosial). (Ferry Yohanes, 2003, 1).

Mengingat jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi warga masyarakat beserta keluarganya, maka jaminan sosial pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan makro di bidang kesejahteraan sosial dan dilaksanakan berlandaskan komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi hak dan martabat manusia. Dengan demikian jaminan sosial erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, sebagaimana dituangkan dalam deklarasi universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948. Sampai dengan saat ini deklarasi tersebut masih dijadikan referensi bagi setiap negara untuk menaruh komitmennya dalam pelaksanaan HAM melalui jaminan sosial.

Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial antara lain termuat dalam:

- a. Pasal 27 ayat 2 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28 huruf H ayat 3 berbunyi: “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- c. Pasal 34 ayat 1 menyatakan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”
- d. Pasal 34 ayat 2 berbunyi: “Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagi warga negara yang tidak mampu, warga negara yang terlantar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara. Dalam menyelenggarakan jaminan sosial tersebut sejauh mungkin diusahakan agar mampu memberdayakan masyarakat, terutama bagi golongan orang yang tidak mampu melalui mekanisme gotong royong.

Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, hilangnya pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

Sebagai program publik jaminan sosial memberikan hak berupa manfaat dan sekaligus membebani kewajiban berupa iuran secara pasti bagi tenaga kerja dan pemberi kerja. Hak yang diberikan berupa kemanfaatan tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja dan keluarganya. Sedangkan kewajibannya berupa kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini. Jaminan sosial memberikan perlindungan yang sifatnya minimal saja dengan maksud untuk menjaga harkat dan martabat dasar manusia, jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi, sehingga pembiayaannya dapat terjangkau oleh setiap pemberi kerja. Risiko-risiko yang ditanggulangi jaminan sosial menyangkut peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan ataupun membutuhkan perawatan medis.

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 prinsip penyelenggaraan jaminan sosial antara lain:

- a. Prinsip kegotong royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu, dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat. Peserta yang berisiko rendah, membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit.
- b. Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba), bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kebutuhan peserta.
- c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun pesertanya berpindah pekerjaan, atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia.
- e. Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta, sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal, dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan dan mereka yang bekerja secara mandiri, yang pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

- f. Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Prinsip hasil pengelolaan dana berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Dalam pengertian yang luas, jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran serta kemiskinan. Oleh sebab itu jaminan sosial mengandung berbagai unsur termasuk: bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*) dan program-program bantuan dan kesejahteraan lainnya (*other related welfare programs*) (Sentanoe Kertonegoro, 1998, 2).

1. **Bantuan sosial (Bantuan Kesejahteraan sosial)** adalah salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh negara (pemerintah) dan masyarakat, berupa pelayanan fisik dan non fisik sebagai pengganti atas gangguan atau hilangnya fungsi sosial sebagai akibat dari musibah yang menimpa dirinya. Bantuan sosial ini dapat bersifat tetap (permanen), dan tidak tetap (sementara). Bantuan kesejahteraan sosial secara permanen adalah pelayanan sosial baik fisik maupun non fisik yang diberikan kepada para lanjut usia terlantar, penyandang cacat ganda, dan penderita penyakit kronis, yang dalam kesehariannya tidak berdaya menolong dirinya sendiri. Bantuan kesejahteraan sosial sementara diberikan kepada PMKS yang potensial, seperti pengungsi akibat bencana alam banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, maupun korban bencana sosial seperti kerusuhan, amuk massa, peperangan dan bantuan kepada warga masyarakat miskin lainnya.
2. **Asuransi Kesejahteraan sosial** adalah suatu sistem asuransi untuk memberikan perlindungan atau pertanggungungan kepada warga masyarakat terhadap risiko menurunnya taraf kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama sakit, kecelakaan atau meninggal dunia. Asuransi sosial dapat pula berupa program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya, terhadap risiko-risiko yang timbul dari pekerjaannya, seperti sakit, kecelakaan, PHK, pensiun dan meninggal dunia.
3. **Program-program bantuan dan kesejahteraan lainnya.** Pelayanan terhadap penderita sakit bagi keluarga miskin melalui program Kartu Sehat, pemberian alat kontrasepsi, penyuluhan kesehatan, imunisasi gratis dan sebagainya.

Beberapa Jenis Jaminan Sosial

Selama ini Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial seperti; Taspen, Askes, Jamsostek, Asabri, Jasa Raharja dan bentuk asuransi lainnya. Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil masyarakat, namun sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang

memadai. Berbagai program tersebut hanya ditujukan kepada masyarakat golongan menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat lemah dan miskin belum menjadi sasaran prioritasnya (Ferry Yohannes, Ed, 2003, 2).

Kemiskinan sungguh merupakan persoalan struktural yang kompleks, dari waktu ke waktu senantiasa terus ditanggulangi, namun masalah itu tetap saja sulit ditiadakan. Dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui program jaminan sosial diarahkan agar keluarga miskin mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapinya. Beberapa jenis program jaminan sosial yang mulai dirintis bagi orang miskin antara lain:

1. Asuransi Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

Banyak masalah pelayanan kesehatan yang ditemukan saat ini salah satu diantaranya yang dinilai cukup merisaukan adalah makin meningkatnya biaya kesehatan (*health cost*). Adapun yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah total dan yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan (Azwar, 2002, 13). Tidak dipungkiri bahwa saat ini biaya perawatan kesehatan, baik yang menyangkut pemeriksaan dokter, harga obat, biaya rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, maupun biaya penggunaan peralatan rumah sakit dirasa sangat mahal. Bagi orang miskin berurusan dengan dokter atau rumah sakit, sangatlah menakutkan. Yang terbayang dibenak hanyalah uang jutaan rupiah, sementara uang di kantong hanya cukup untuk makan. Ketidakmampuan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan lebih merupakan masalah yang diciptakan (baik oleh negara atau pemilik kapital), dalam bentuk pengelolaan pelayanan kesehatan yang memang didesain diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok berpunya) dan merugikan kelompok miskin (Revrison Baswir, 2003, 82).

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin pemerintah menempuh kebijakan untuk menyantuni keluarga miskin berobat ke rumah sakit melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM), yang dimulai sejak tahun 2003. Guna mendukung pelaksanaan program tersebut, sumber dana diperoleh dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM). Dana tersebut dibayarkan langsung kepada PT Asuransi Kesehatan (ASKES), tanpa melalui badan pelaksana - badan pelaksana Departemen Kesehatan, agar penyaluran dana lebih efisien, akuntabilitas dan transparans. Dengan adanya kartu askes (kartu sehat), masyarakat miskin dapat berobat gratis di Puskesmas, Puskesmas pembantu, bidan atau posyandu. Kalau diperlukan dirujuk ke rumah sakit pemerintah, atau rumah sakit swasta yang ditunjuk. Pasien tersebut dapat dirawat inap gratis di ruangan kelas tiga, termasuk tindakan operasi, cuci darah, pemeriksaan dokter, meski dengan batasan obat yang di tanggung askes. Sedangkan yang dimaksud keluarga miskin adalah keluarga yang tidak dapat makan dua kali sehari, keluarga dengan anak *drop-out* sekolah karena alasan ekonomi, keluarga tidak mampu mengobatkan anggota keluarga yang sakit ke pelayanan kesehatan. (Kompas, 16 Maret 2005).

Setiap Keluarga miskin akan menerima bantuan untuk membayar iuran asuransi kesehatan sebesar Rp. 5000 per orang setiap bulan dan disetorkan ke

PT. ASKES sebagai badan penyelenggara JPKMM. Pemberian subsidi secara langsung seperti itu diharapkan akan dapat dinikmati oleh mereka yang berhak menerima. Pengalihan subsidi menjadi premi ASKES, penerima subsidi telah ditentukan sebelumnya. Penetapan didasarkan pada kriteria tertentu dan tidak dilakukan pada saat penerima dalam kondisi sakit. Demikian juga penerima dapat memperoleh bantuan ketika tidak mampu membayar layanan kesehatan dengan mencari “surat miskin”.

Berbeda halnya dengan program sebelumnya, pengalihan bantuan menjadi JPKMM, hak masyarakat miskin menjadi lebih terjamin karena manfaat benefitnya telah dibayar melalui iuran/premi askes, sehingga mendorong pengelolaan lebih profesional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik orang miskin di Indonesia yang akan diikuti dalam program JPKMM sebanyak 36.146.700 orang, dengan premi sebesar Rp. 5000, maka dalam satu tahun akan terkumpul dana sebanyak 2.168.441 juta (Kompas 16 Maret 2005).

Menurut Sulastomo satu hal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program asuransi kesehatan adalah aspek efisiensi, standar dan kualitas pelayanan kesehatan. Efisiensi diperlukan agar dana yang tersedia dapat memberi manfaat yang maksimal. Hal ini diperlukan agar kenaikan biaya pelayanan kesehatan dapat dikendalikan, sehingga premi tidak meningkat tahun demi tahun, yang akan memberatkan masyarakat. Standar pelayanan diperlukan untuk menjamin bahwa, setiap peserta akan memperoleh manfaat yang sama, sesuai dengan premi yang dibayar. Sedangkan kualitas pelayanan diperlukan untuk melindungi peserta dari tindakan medik yang tidak sesuai kebutuhan, mengingat peserta askes sebenarnya tidak tahu (*ignorance*) terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya (Kompas, 19 Mei 2005).

Usaha mencapai efisiensi, standar dan kualitas pelayanan yang normal, ada prakondisi yang harus dipenuhi. Prinsip asuransi mengharuskan untuk memenuhi persyaratan hukum bilangan banyak (*the law of large numbers/the law of average*). Semakin besar peserta program asuransi semakin mudah menghitung risiko yang akan dihadapi peserta. Perhitungan risiko dan manfaat akan mendekati ketepatan yang semakin sempurna sehingga kelangsungan hidup program dapat lebih terjamin. Terbukanya peluang penyelenggaraan program asuransi kesehatan yang terpecah (*fragmented*), berarti akan mempersulit koordinasi, serta kurang efisien.

PT Askes ditunjuk sebagai wadah dan penyelenggara tunggal program asuransi kesehatan, aspek standar dan kualitas pelayanan kesehatan kian terbuka peluang besar terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan oleh karena Badan Penyelenggara Asuransi Kesehatan itu akan memiliki posisi tawar yang amat tinggi terhadap Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Memberi tugas penyelenggaraan program asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin hanya kepada PT Askes Indonesia, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan lompatan besar ke depan. Mengingat jumlah keluarga miskin masih sangat banyak, mampukah PT Askes melayani seluruh pasien dengan baik sesuai dengan standar pelayanan yang optimal. Demikian pula keberlangsungan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM, sebagai donatur penyandang dana iuran asuransi kesehatan bagi orang miskin apakah dapat berjalan terus.

2. Program Raskin

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu kriteria penentuan keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu makan dua kali sehari. Kenaikan harga BBM memicu harga beras di pasar yang semakin hari kian mahal, sangat mungkin bagi keluarga-keluarga yang sangat miskin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penyelenggaraan program jaminan sosial dari pemerintah juga diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin. Namun demikian bukan berarti memberikan ikan kepada masyarakat miskin, tetapi dengan cara memberi pancing beserta memberikan pendampingan cara memancing yang benar, menunjukkan letak berkumpulnya ikan, sehingga keterlibatan masyarakat miskin sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan. Dengan demikian program jaminan sosial bagi kelompok miskin dan marjinal jangan hanya dijadikan sebagai kegiatan yang bersifat karikatif saja. Dalam hal ini Yuni Tamrin memberikan pandangan bahwa jaminan sosial sebaiknya dikombinasikan dengan program-program pemberdayaan lainnya, sehingga kelompok miskin dan marjinal dapat menjadi wadah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga setempat dan menjadi kendaraan transformasi sosial bersama menuju pada perubahan yang dicita-citakan bersama (Yuni Tamrin dalam Ferry Yohanes, 2003, 24).

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang juga termasuk jaminan sosial yang bersifat pemberdayaan masyarakat adalah pemberian bantuan berupa beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Setiap Keluarga miskin dijatah oleh pemerintah mendapatkan beras murah seharga Rp. 1000/Kg, dan tiap Kepala Keluarga dibatasi maksimal 10 Kg per bulan. Dalam hal ini pemerintah dapat saja memberikan bantuan beras tersebut secara cuma-cuma. Namun kebijakan ini ditempuh mengandung unsur edukatif untuk memberdayakan masyarakat, yaitu untuk memperoleh beras sesuai jatah tersebut, harus melakukan usaha-usaha guna memperoleh sejumlah uang sebagai syarat untuk membeli raskin. Hasil penjualan raskin tersebut digunakan untuk biaya transportasi mengangkut beras dari Bulog sampai ke desa/kelurahan.

Sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, sudah barang tentu akan mengakibatkan naiknya semua harga barang, dengan alasan biaya transport naik. Hal ini tentu akan semakin menambah berat beban yang harus ditanggung oleh keluarga miskin. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, mulai Oktober 2005 Bulog DIY akan menambah alokasi beras untuk keluarga miskin, sebesar lima kilogram per KK miskin, dari 10 kg menjadi 15 kg. (Kompas 29 September 2005).

3. Bantuan Tunai PKPS BBM

Berbagai gelombang demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun segenap elemen mahasiswa diberbagai kota menentang dan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, tidak dapat menggoyahkan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Keputusan ini diambil selain berdalih penyesuaian harga minyak dunia yang terus meningkat, yang memberatkan pemerintah untuk mensubsidi BBM tersebut, tetapi juga untuk mendukung Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS)

BBM yang akan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin. Salah satu bentuknya berupa bantuan tunai sebesar Rp. 100.000 setiap bulan per KK miskin.

Pemberian subsidi tersebut akan disalurkan melalui PT Pos dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan akan diterimakan setiap triwulan sekali. Bagi pemegang Kartu Kompensasi BBM (KKB), dapat mengambil uang langsung ke PT Pos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Di Kabupaten Sleman dana bantuan PKPS BBM selain dibagikan kepada warga miskin, tetapi juga untuk menunjang biaya pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) siswa SD/MI/SLB sebanyak 81.135 siswa, SMP/MTs/SLB sebanyak 36.991 siswa. Selain itu PKPS di Kabupaten Sleman juga diarahkan untuk pembangunan infra struktur pedesaan, baik berupa jembatan, jalan, saluran irigasi maupun air bersih. Ada 12 desa di kabupaten tersebut yang dipastikan akan memperoleh PKPS BBM sebesar Rp. 250 juta. (Kompas 27 September 2005).

Dari hasil survai Badan Pusat Statistik terdapat tiga kelompok rakyat miskin yang paling terkena dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Adapun ketiga kelompok tersebut adalah :

1. Keluarga berpenghasilan Rp. 120.000 per bulan, jumlahnya mencapai 4 juta keluarga atau 16 juta jiwa.
2. Keluarga pendapatannya Rp. 150.000 per bulan, jumlahnya 10 juta keluarga atau 40 juta jiwa
3. Keluarga berpenghasilan Rp. 175.000 per bulan, jumlahnya lebih banyak yaitu 15,5 juta keluarga atau 62 juta jiwa. (Kompas, 10 September 2005).

Penyaluran dana melalui program ini ternyata juga tidak berjalan mulus, terbukti dengan banyaknya penduduk yang mengajukan protes kepada pemerintah desa, maupun aparat kelurahan mengapa keluarganya tidak memperoleh KKB. Sementara keluarga yang kondisi sosial ekonominya lebih baik malah memperoleh KKB. Ironisnya beberapa pegawai kelurahan atau pamong desa tidak tahu menahu tentang penentuan keluarga miskin yang akan menerima KKB, sebab yang menetapkan kriteria gakin BPS, tanpa melibatkan pemerintah desa ataupun kelurahan. Pendataan dilakukan oleh BPS melalui tenaga-tenaga relawan yang hanya dilatih selama dua hari, kemudian langsung turun ke tingkat RT dan RW. Berdasarkan atas informasi dari ketua RT setempat, relawan mendata keluarga-keluarga yang dikategorisasikan sebagai keluarga miskin. Mekanisme yang sedemikian itu sangat mungkin terjadi kesalahan penunjukan, suatu keluarga mestinya memperoleh KKB, namun karena tidak ditunjuk oleh ketua RT, keluarga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tunai subsidi BBM. Sebaliknya bagi keluarga yang secara ekonomi lebih “mampu” malah terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Hal seperti inilah yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Kepedulian Setempat (*Local Initiatives*)

Bentuk-bentuk jaminan sosial sebagaimana yang dipaparkan di atas merupakan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama

masyarakat. Sebagai komponen bantuan sosial dan asuransi sosial tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Bromley dan Gery, di negara berkembang pemerintah hanya memiliki kemampuan organisasional dan ekonomi yang terbatas untuk menyediakan jaminan sosial bagi warganya. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial ini menyebabkan warga berusaha menghindari ketergantungan terhadap pemerintah dalam kesejahteraan sosialnya (Bromley dalam Franz von Benda-Beckmann, tt, 298).

Oleh sebab itu secara simultan diperlukan jaminan sosial yang didampingi dengan dukungan keterlibatan dan kepedulian masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia, maka penyelenggaraan jaminan sosial hendaknya disesuaikan dengan kenyataan faktual yang ada pada kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu kepedulian sesama warga (*civic involvement*).

Bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan dalam tradisi Indonesia antara lain berupa Arisan, Usaha Simpan Pinjam, pembuatan Lumbung Desa, bahkan jaminan sosial yang berujud tenaga kerja seperti gotong royong (kerja bakti), kerja kelompok dalam menggarap tegalan atau sawah secara bersama-sama dan bergiliran, membantu warga yang mempunyai hajatan, maupun keluarga yang sedang terkena musibah dan kematian.

Berbagai bentuk ini merupakan mekanisme pertahanan hidup secara informal dan tradisional, yang dilaksanakan oleh warga masyarakat setempat, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama warga (sering disebut jaminan sosial tradisional). Pendekatan yang menggunakan mekanisme tradisi lokal tersebut, ternyata telah diterapkan sebagai cara yang cukup handal oleh kelompok-kelompok miskin dan marginal. Hal ini membuktikan bahwa kelompok miskin memiliki kemampuan dasar untuk membangun dan mempertahankan dirinya sendiri, tanpa harus mengembangkan tradisi "*kridha lumahing asta*". Dengan demikian jaminan sosial bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia masih sangat memprihatinkan, karena belum mampu mencakup sebagian besar rakyatnya. Selama ini jaminan sosial baru mencakup kelompok masyarakat kalangan menengah ke atas saja. Program tersebut dilaksanakan oleh berbagai institusi penyelenggara, dan kepesertaannya terbatas bagi pegawai negeri, militer, kepolisian negara, pegawai BUMN/BUMD, karyawan swasta dan pensiunan. Jumlah peserta jaminan sosial melalui program tersebut, diperkirakan hanya sebesar 20 % dari jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Angka itu sungguh amat sangat kecil dibandingkan dengan negara Jerman sebagai negara yang pertama kali merintis jaminan sosial yang dipelopori oleh Bismark, yang sampai saat ini telah mampu mengikutsertakan warga negaranya sebesar 99,8 % sebagai peserta jaminan sosial. Sedangkan sisanya yang hanya 0,2 % tidak tercakup dalam jaminan sosial, karena sudah kaya sekali sehingga tidak memerlukan jaminan seperti itu.

Semenjak kenaikan harga BBM bulan Maret 2005 yang lalu, sebagian dana dialokasikan untuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM untuk membantu keluarga miskin. Dana tersebut digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang dikelola PT Askes, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang pengelolaannya dipercayakan kepada Departemen Pendidikan Nasional, Bantuan Tunai kepada KK miskin yang ditangani oleh PT Pos dan BRI, serta untuk membangun infrastruktur pedesaan yang di kelola oleh Dinas Kimpraswil kabupaten dan kota. Dengan demikian pemerintah mulai mengembangkan program jaminan sosial yang merambah sampai pada lapisan masyarakat golongan bawah, terutama masyarakat miskin. Walaupun untuk penentuan keluarga miskin saat ini terdapat berbagai kriteria, sehingga memungkinkan timbulnya kecemburuan sosial bagi warga masyarakat lain, yang tidak menerima bantuan dari PKPS BBM.

Malaysia pernah memperoleh predikat negara terbaik dalam mengelola dana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Pada tahun 2000 berdasarkan penilaian WHO, Perancis memperoleh penilaian terbaik mengenai perawatan kesehatan bagi warga negaranya. Mungkinkah Indonesia melalui program jaminan sosial dapat memberdayakan keluarga miskin, sehingga terlepas dari lilitan kemiskinan? *Semoga.*

Referensi

- Azwar, Asrul. (2002), *Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Dep Kes RI.
- Baswir, Revrison. (2003), *Pembangunan tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: ELSAM.
- Beckmann, Franz Von Benda, (Ed.), tt, *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kertonegoro, Sentanoe, 1998, *Sistem Jaminan Sosial di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Sulastomo, (2005), "Asuransi Kesehatan bagi Warga Miskin", *Kompas*, 16 Maret.
- Yohanes, Ferry (ed.), (2003), *Jaminan Sosial Bagi Warga Tidak Mampu*, Jakarta, Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri Lingkup Menko Kesra.

Kompas, tanggal 19 Mei 2005

Kompas, tanggal 27 September 2005

Kompas, tanggal 29 September 2005

Bab 11

Pemberdayaan Petani Dalam Agribisnis

Christine Sri Widiputranti

Keadaan Pertanian di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya pertanian yang melimpah. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, juga memiliki laut seluas 790 juta hektar (termasuk daerah *zone economic exclusive*) yang menyediakan sumber alam bahari yang sangat besar. Indonesia beriklim tropis, memberi kelebihan bagi daya tumbuh tanaman dan hewan. Curah hujan yang cukup dan pertumbuhan plankton-plankton sepanjang tahun sangat mendukung pertanian. Jumlah radiasi matahari sepanjang tahun, memungkinkan petani melakukan penanaman rotasi 3 – 4 kali dalam satu tahun. Suhu udara yang tidak terlalu panas dan ketinggian tanah yang ideal menjanjikan pertumbuhan maksimal bagi tanaman dan hewan. Demikian juga jumlah penduduk yang banyak, menjanjikan potensi dalam penyediaan tenaga kerja. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia seharusnya dapat dijadikan modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Strategi pembangunan yang dianut negara Indonesia cukup khas. Dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat, perhatian khusus pertama-tama harus diberikan pada sektor terbesar yang menghidupi bagian terbesar rakyat yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian harus dibangun lebih dahulu dan ditingkatkan produktivitasnya.

Pembangunan pertanian selama ini telah menunjukkan berbagai keberhasilan di samping juga kegagalan. Sejarah pembangunan pertanian di Indonesia memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pertanian telah memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan dalam perekonomian Indonesia. Pada periode 1969–1989, produksi pangan per kapita berhasil ditingkatkan sekitar 46 persen, sehingga pada tahun 1984 swasembada beras dapat dicapai. Bertahun-tahun sebelumnya Indonesia sebagai importir utama beras. Laju pertumbuhan ekonomi yang cepat selama PJP I (sekitar 7% pertahun), karena dukungan kebijakan pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pembangunan sektor pertanian. Selama PJP II kebijakan pembangunan diarahkan pada industrialisasi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Industrialisasi tersebut tidak melibatkan sumber daya domestik seperti industrialisasi pertanian tetapi banyak melibatkan teknologi tinggi yang sebagian besar diimpor dari negara maju. Investasi dibiayai oleh hutang luar negeri yang sangat tinggi, sektor pertanian terabaikan. Perekonomian ambruk ketika ada goncangan moneter (nilai rupiah jatuh terhadap nilai dolar). Kondisi ini diperparah oleh dominasi konglomerat dalam berbagai sektor ekonomi. Keadaan ini menyebabkan ketimpangan dalam pemerataan pembangunan. Perekonomian secara keseluruhan ini dapat diatasi

dengan menciptakan sistem ekonomi rakyat. Pemberdayaan rakyat kecil (petani dan nelayan) perlu ditempuh untuk mengambil peran dalam perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan positif sektor pertanian pada saat sektor lain mengalami pertumbuhan negatif pada periode krisis tahun 1997 menunjukkan bahwa sektor pertanian lebih resisten terhadap gejolak ekonomi nasional. Kondisi ini tercipta karena sektor pertanian pada umumnya berbasis pada sumber daya lokal, sedangkan sektor yang lain lebih mengandalkan input yang berasal dari impor.

Menurut Dwidjono HD (2005: 1-3), resistensi sektor pertanian terhadap gejolak ekonomi ini dapat menjadi dasar untuk memberikan peran pokok pada struktur ekonomi nasional dengan program revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh presiden RI beberapa waktu yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bertekad untuk memberikan prioritas utama pada perkembangan sektor pertanian sebagai penunjang perekonomian nasional. Namun demikian “gaung” program tersebut hingga saat ini belum sampai di daerah baik untuk kebijakan daerah maupun pelaksanaannya di tingkat daerah.

Sampai sekarang peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional masih cukup besar, apalagi kalau diperhitungkan sebagai sektor agribisnis, dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), kesempatan kerja, sumber devisa dan ketahanan pangan (Widodo, 2003: 3). Selama periode 1990 dan 1995 sektor agribisnis menyumbang 45-47 persen pada PDB, menyerap 75-77 persen tenaga kerja, menghasilkan devisa 43-49 persen dari nilai ekspor dan menghasilkan pangan dalam jumlah yang besar (Hartono, 2003: 11).

Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan besar dalam menciptakan kesempatan kerja dan memberikan jaminan pendapatan kepada masyarakat, namun ketidakseimbangan sistemik masih sering terjadi pada kelompok masyarakat tani yang sebagian besar berada di pedesaan. Kesenjangan antar sektor, antar daerah dan antar golongan masyarakat khususnya di sektor pertanian masih terjadi.

Kondisi Petani

Menurut Dirjen Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Penyuluhan tanaman Pangan (1986:19), **petani** adalah petani pemilik dan penggarap, petani penyewa dan penggarap, petani penyakap/bagi hasil, baik pria maupun wanita yang bertindak selaku pengelola dalam usaha tani berbentuk budidaya dan berbentuk usaha keluarga terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (2005: 6), Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian, mencakup usaha hulu, usaha tani, usaha hilir dan usaha jasa penunjang.

Berdasarkan data Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) meningkat 2,2 % per tahun dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi 25,4 juta pada tahun 2003. Sementara itu, petani gurem meningkat 2,6 % per tahun dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta pada tahun 2003. Persentase RTP Gurem dibanding RTP pengguna lahan naik dari 52,7 % pada tahun 1993 menjadi 56,5 % pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan kemiskinan

petani meningkat selama dekade 1993-2003. Hasil penelitian PATANAS menunjukkan bahwa 88 persen petani di Jawa menguasai kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Sejalan dengan semakin menyempitnya luas pemilikan lahan oleh petani, kelembagaan penguasaan lahan mengalami pergeseran. Sistem sewa menjadi lebih dominan dibandingkan sakah atau bentuk lainnya. Sistem sakah menjadi lebih memberatkan penggarap. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sistem *mara loro* cenderung berubah menjadi: *mara telu*, *mara papat* dan bahkan *mara lima* (Ismawoto dkk dalam Hartono, 2003 :12).

Kelemahan petani yang lain terutama dalam hal persaingan produk pertanian, hal ini terutama karena kualitas yang rendah disebabkan hasil mengandung residu pestisida, sehingga kalah bersaing dengan produk pertanian impor. Hasil uji petik Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman menunjukkan beberapa komoditas sayuran/buah-buahan terdeteksi pestisida meski dibawah nilai BMR (Batas Maks Residu) yakni: Jeruk (Jatim, Sumut), Anggur (Bali), Bawang Merah (Jatim), Tomat (Jabar). Sedangkan buah-buahan impor yang dianalisis tidak terdeteksi pestisida (14 jenis), seperti: buah Peer (Korea, Xiangi), Anggur (Amerika, Australia), Apel (RRC, Amerika), Jeruk (Amerika) (Anonim. 2004: 5).

Kondisi seperti disebut di atas mengakibatkan semua program pembangunan pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah, dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian, serta modal yang disalurkan oleh lembaga keuangan hampir dipastikan tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Oleh karena itu upaya pemberdayaan petani melalui penyuluhan pertanian harus selalu ditingkatkan terutama dalam hal agribisnis (mampu pemasaran, mampu menghasilkan produk yang berkualitas). Pemberdayaan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku guna membangun kehidupan dan penghidupan petani yang lebih baik secara berkelanjutan.

Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian

Menurut Soemodiningrat (2001: 10–11), kebijaksanaan pembangunan nasional telah dipertajam dengan arah baru pembangunan nasional. Arah baru pembangunan mengutamakan tiga hal yaitu:

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemantapan ekonomi dan desentralisasi melalui pendelegasian wewenang yang lebih luas kepada masyarakat dan aparat daerah untuk melaksanakan program pembangunan.
3. Pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui penerapan teknologi baru yang dilakukan melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi produktif yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijaksanaan pembangunan pertanian perlu sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan berkelanjutan dalam menangani berbagai masalah pembangunan khususnya krisis pangan. Program pembangunan jangka panjang terkait erat dengan masalah mendesak tersedianya pangan dalam waktu singkat dengan harga terjangkau. Program jangka pendek harus terkait

erat dengan program jangka panjang yakni kelangsungan hidup masyarakat tani secara berkelanjutan (lestari). Pembangunan pertanian yang berkelanjutan menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pertanian harus ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat tani berkemampuan dalam memantapkan proses perubahan struktur yang muncul dari kemampuan petani sendiri. Perubahan masyarakat tani diawali dari pengelolaan kegiatan sosial ekonomi produktif. Kegiatan produksi dilakukan untuk menghasilkan pendapatan yang memberikan nilai tambah sehingga menumbuhkan surplus. Surplus ini dapat dipergunakan untuk investasi pada proses perubahan teknologi yang harus berkembang. Dalam skala nasional, pembangunan pertanian yang dilaksanakan terpadu (sinergis) dengan pembangunan industri diharapkan mejadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Tap-Tap MPR 2000: 61).

Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan.

Dalam pembangunan pertanian, pemberdayaan masyarakat tani sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat tani perlu mendapat pemahaman bersama.

Menurut Departemen Pertanian (2005: 18), kebijaksanaan pembangunan pertanian adalah mewujudkan pertanian tangguh dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Kebijakan ini menghendaki perubahan pendekatan penyuluhan pertanian dari pendekatan produksi ke pendekatan agribisnis. Pendekatan baru ini mengharuskan para penyuluh pertanian melihat usaha yang dikelola oleh petani (*on farm*) sebagai bagian dari sistem agribisnis. Kondisi ini pada level tertentu akan memperluas sasaran penyuluhan pertanian menjadi tidak hanya petani dan keluarganya tetapi mencakup para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Materi penyuluhan pertanian di samping yang menyangkut teknik budidaya, harus memberi perhatian yang tinggi terhadap aspek ekonomi usaha dan pengembangan organisasi petani untuk menjadi organisasi ekonomi yang kuat.

Kebijaksanaan ini mensyaratkan dikembangkannya jaringan kerjasama di antara pelaku agribisnis, penyuluhan pertanian, penelitian, pendidikan dan pelatihan. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah

1. Penyuluh pertanian diharuskan mempunyai kompetensi yang menyangkut aspek ekonomi usaha dan mamajemen organisasi.
2. Harus ada hubungan antara sistem penyuluhan dengan sistem dan usaha agribisnis.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan pertanian telah dirumuskan, bahwa kegiatan pembangunan pertanian periode 2005–2009 dilaksanakan melalui tiga program, yaitu

1. Program peningkatan ketahanan pangan
2. Program pengembangan agribisnis
3. Program peningkatan kesejahteraan petani (Dwidjono HD, 2005: 3).

Pengertian dan Prospek Agribisnis

Agribisnis berasal dari kata agri (*agriculture*) dan bisnis sehingga prinsipnya pengertian agribisnis adalah usaha komersial (bisnis) di bidang pertanian (dalam arti luas) dan bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan pertanian tersebut. Bidang-bidang yang berkaitan itu adalah: 1). Usaha produksi dan distribusi alat-alat/mesin pertanian, sarana produksi pertanian, dan input pertanian lainnya (agroindustri hulu), 2). Pengolahan dan *manufacturing* hasil pertanian serta pemasarannya (agroindustri hilir), 3). Kegiatan penunjang seperti penyediaan kredit, asuransi pertanian, pelatihan, konsultasi, dan transportasi (Masyhuri, 2003: 2-3).

Menurut Downey dan Steven P Erikson (1992: 5–6), agribisnis dapat dibagi menjadi tiga sektor yang saling tergantung secara ekonomis yaitu sektor masukan (*input*) produksi (*farm*) dan sektor keluaran (*output*). Sektor masukan menyangkut perbekalan kepada para pengusaha tani untuk dapat memproduksi hasil tanaman dan ternak. Termasuk ke dalam masukan ini adalah bibit, makanan ternak, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, dan banyak perbekalan lainnya. Sektor usaha tani memproduksi hasil tanaman, dan hasil ternak yang diproses dan disebarkan kepada konsumen akhir oleh sektor keluaran. Dua buah definisi telah diterima secara umum. Definisi pertama hanya menyinggung sektor masukan. Jadi definisi agribisnis yang sempit atau tradisional hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Beberapa badan usaha yang dicakup di sini antara lain adalah penyaluran bahan kimia, pupuk buatan, dan mesin-mesin pertanian, pembuatan benih dan makanan ternak, serta kredit pertanian dan lembaga keuangan lain yang melayani sektor produksi. Dewasa ini pandangan tentang agribisnis yang secara umum dianggap tepat dan sudah semakin meluas. Menurut pandangan ini, agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan. Artinya agribisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan, usaha tani, terlibat dalam produksi dan pada akhirnya menangani pemrosesan, penyebaran, penjualan secara borongan, eceran produk kepada konsumen akhir.

Agribisnis adalah pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan jasa yang diminta pasar. Oleh karena itu dalam agribisnis, proses transformasi material yang diselenggarakan tidak terbatas hanya pada budidaya proses biologik dari biota (tanaman, ternak dan ikan) tetapi juga proses pra usaha tani, pasca panen, pengolahan dan niaga

secara struktural diperlukan untuk posisi adu tawar (*bargaining*) dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar.

Dalam perekonomian Indonesia, agribisnis mempunyai peranan yang sangat penting sehingga mempunyai nilai strategis. Hal ini disebabkan karena: 1) Mayoritas rumah tangga penduduk dan angkatan kerja mengusahakan agribisnis (75 %) bekerja di bidang agribisnis, 2) Agribisnis menyumbang pendapatan nasional terbesar yaitu sebesar 60 – 70 %, 3) Kandungan impor dalam agribisnis rendah, 4) Agribisnis sebagai salah satu sumber devisa, karena sebagian besar devisa non migas berasal dari agribisnis, 5) Kegiatan agribisnis bersifat lebih ramah terhadap lingkungan, 6) Agribisnis *off-farm* merupakan industri yang lebih mudah diakses oleh petani dalam rangka transformasi struktural, 7) Agribisnis merupakan kegiatan usaha penghasil makanan pokok dan kebutuhan pokok lainnya, 8) Agribisnis bersifat *labor intensive*, 9) Agribisnis mempunyai efek multiplier yang tinggi, 10) Agribisnis bertumpu pada sumber daya yang dapat diperbaharui. Di samping itu, agribisnis merupakan tumpuan utama dalam pemulihan ekonomi dari krisis ekonomi yang berkepanjangan (Masyhuri, 2003: 4).

Prospek agribisnis dapat dilihat dari kecenderungan permintaan produk agribisnis dan kemampuan menghasilkan produk tersebut. Permintaan produk agribisnis dapat dilihat dari pasar domestik dan pasar internasional. Indonesia berpenduduk lebih dari 200 juta, terbesar no 4 di dunia merupakan pasar potensial produk agribisnis. Jumlah penduduk akan semakin besar lagi karena pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi. Sebagai negara berpenghasilan rendah, sebagian besar konsumsinya adalah makanan. Di samping itu setelah mengalami krisis beberapa tahun terakhir ini, Indonesia mulai bangkit lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah positif. Dengan demikian akan terjadi kenaikan pendapatan per kapita Hal ini akan meningkatkan permintaan produk agribisnis. Namun demikian adanya liberalisasi perdagangan dunia akan semakin meningkatkan produk impor masuk Indonesia misalnya buah-buahan dan bersaing dengan produk agribisnis Indonesia. Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan baik akan mengurangi peluang di pasar domestik. Di pasar internasional, dengan semakin terbukanya perdagangan dunia akan meningkat pasar internasional produk-produk agribisnis.

Pengembangan Agribisnis

Pembangunan pertanian Repelita VI tetap diarahkan untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan efisien, dicirikan oleh kemampuannya dalam menyejahterakan para petani. Kemampuan tersebut dicapai melalui peningkatan kuantitas dan kualitas serta keanekaragaman hasil pertanian, memenuhi bahan pangan dan gizi, memenuhi bahan baku industri, mengembangkan industri dan agribisnis. Pengembangan agribisnis diharapkan mampu memanfaatkan peluang pasar dalam dan luar negeri, memperluas kesempatan kerja, dan lapangan kerja, dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sejalan dengan arah pembangunan pertanian, salah satu tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan kemampuan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan agribisnis dan agroindustri.

Pencapaian tujuan pembangunan pertanian dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: 1) Pendekatan agribisnis. 2) Pendekatan pembangunan pertanian dan pedesaan yang terpadu dan berkelanjutan 3) Pendekatan sumber daya pertanian.

Salah satu program dalam kegiatan pembangunan pertanian periode 2005-2009 adalah program pengembangan agribisnis. Sistem agribisnis meliputi semua aktivitas dalam suatu sistem yang terdiri atas: a) Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian; b). Subsistem produksi pertanian atau usaha tani; c). Subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri; d) Subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian; e). Subsistem prasarana; f) Subsistem pembinaan. Apabila salah satu subsistem tidak berfungsi atau mengalami gangguan maka akan merusak/mengganggu keseluruhan sistem. Oleh karenanya, negara dalam membangun pertanian harus memperhatikan sistem agribisnis secara keseluruhan.

Penerapan sistem agribisnis menghendaki ada keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Mengingat keterkaitan sektor pertanian yang begitu erat dengan sektor pembangunan lainnya, juga saling ketergantungan antar sektor yang begitu besar, maka keberhasilan sektor pertanian sangat ditentukan oleh dukungan yang kuat dari sektor lain. Dengan demikian kerja sama yang saling mendukung dan saling mendorong untuk maju antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lain harus ditingkatkan (Widiputranti 1996: 24).

Wawasan agribisnis adalah cara pandang terhadap pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi permintaan pasar, dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif. Dalam meraih nilai tambah tersebut, agribisnis memandang ruang gerak dan ruang hidup tidak terbatas pada budidaya saja, tetapi juga usaha pada penyediaan bahan, sarana, alat mesin, dan jasa di sektor hulu usaha tani dan pasca panen, pengolahan, penanganan hasil, pemasaran dan lain-lainnya di sektor hilirnya. Prinsipnya adalah lapangan usaha pada usaha tani maupun sektor pendukungnya dan penunjang, baik yang di hulu maupun di hilir.

Pengembangan agribisnis tidak hanya bertumpu pada pengembangan sektor pertanian saja, tetapi menyangkut keseluruhan tatanan makro pelaku agribisnis atau masyarakat agribisnis. Secara fungsional masyarakat agribisnis dipilah-pilahkan menjadi lima golongan yaitu: 1) Pemerintah, 2) Dunia usaha, 3). masyarakat tani/pedesaan, 4) Masyarakat ilmiah dan teknologi (pakar) dan 5). masyarakat profesi.

Pengembangan agribisnis menghendaki ada pergeseran pemikiran dari "orientasi produksi" ke "orientasi pasar", meliputi:

1. Dari skala subsisten ke skala komersial (perlu penerapan prinsip skala usaha, prinsip ekonomi dalam usaha tani, dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi arus globalisasi)
2. Dari pendekatan komoditas ke pendekatan sumber daya. Ada kecenderungan pergeseran komoditas utama yang diproduksi oleh suatu negara atau daerah, harus diantisipasi dengan pengembangan agribisnis

- yang berdasarkan pada: a) Prinsip keunggulan komparatif; b). Meningkatkan keterampilan masyarakat perdesaan; c) Tersedia bahan baku yang cukup dan berkesinambungan; d) Tersedia dana investasi yang cukup dan e) Tersedia prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya di perdesaan.
3. Dari komoditi primer ke produk bernilai tambah. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala harga produk primer yang cenderung berfluktuasi relatif lebih besar dari pada harga produk olahan, cakupan pasar yang relatif terbatas dan peluang untuk melakukan diversifikasi relatif terbatas.
 4. Dari substitusi impor ke promosi ekspor. Di samping mengembangkan komoditi yang semula kebanyakan diimpor seperti jeruk, kelengkeng, anggur dan sebagainya, juga dikembangkan komoditi lokal yang mempunyai prospek pasar di luar negeri seperti salak pondoh.
 5. Dari peningkatan pendapatan petani menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Tujuan pembangunan pertanian harus dipandang secara utuh dalam konteks pembangunan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian wilayah pedesaan secara bertahap akan berubah menjadi mikropolitik dengan tingkat kesejahteraan yang tidak jauh berbeda dengan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.
 6. Dari teknologi padat karya ke alat dan mesin. Pergeseran teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, di samping membuka usaha baru, meningkatkan mutu produksi, mempercepat pengolahan lahan dan menarik minat generasi muda.
 7. Dari pendekatan terpusat ke otonomi daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah atau wilayah akan lebih memudahkan perencanaan serta meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya pengelola pembangunan pertanian di daerah.
 8. Dari peran pemerintah ke peran masyarakat. Artinya peran pemerintah dalam pembangunan pertanian semakin berkurang dan keikutsertaan masyarakat akan semakin meningkat sehingga kemandirian masyarakat tani terus ditingkatkan.

Pemberdayaan Petani

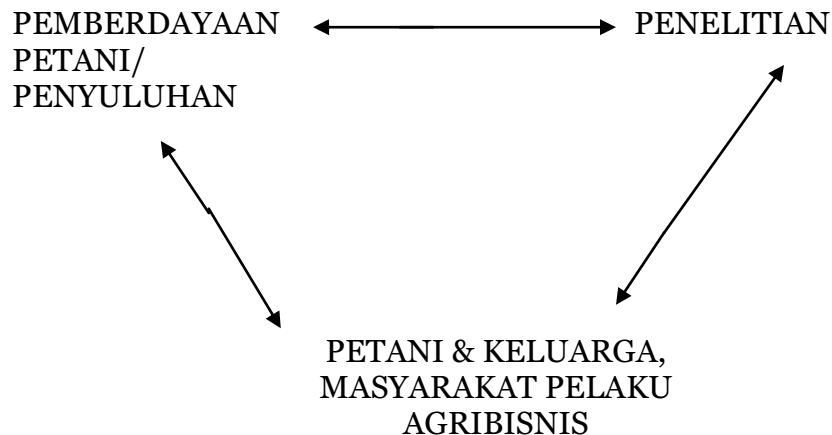
Searah dengan lemahnya kondisi petani, yakni lemah modal, penguasaan lahan, lemah inovasi/teknologi, lemah informasi, serta lemah dalam pemasaran dan persaingan, yang nampak hanya banyak produk hasil pertanian luar negeri membanjiri negeri ini, maka pemberdayaan petani dalam agribisnis merupakan upaya untuk menguatkan kelemahan yang diderita sebagian besar petani.

Pemberdayaan petani dalam agribisnis searah dengan aktivitas penyuluhan pertanian yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian. Dalam paradigma baru penyuluhan pertanian, Departemen Pertanian RI (2002) menekankan penyuluhan sebagai pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka

tercapai. Dengan demikian, dalam pemberdayaan petani di bidang agribisnis perlu dilakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Mengembangkan kelompok tani sebagai organisasi petani yang tangguh, terutama di bidang ekonomi dan sosial.
- b. Melalui kelompok tani, memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
- c. Membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan
- d. Memberikan rekomendasi dan mengusahakan akses petani ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani
- e. Menjadikan lembaga penyuluhan pertanian sebagai lembaga mediasi dan intermediasi, terutama menyangkut teknologi dan kepentingan petani dan keluarganya, serta masyarakat pelaku agribisnis.

Dalam rangka pemberdayaan petani melakukan agribisnis, maka perlu dikembangkan sistem yang menyangkut sub sistem: pemberdayaan petani/penyuluhan, penelitian, petani dan keluarganya serta pelaku agribisnis, yang bekerja saling terkait dan sinergis (Hariadi, 2005). Keterkaitan dan sinergi antar sub sistem dapat digambarkan sebagai berikut ini.



Lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi, berupaya menemukan inovasi untuk lembaga penyuluhan, namun demikian, lembaga penelitian juga dapat langsung memberikan hasil inovasi kepada petani dan pelaku agribisnis, agar petani dan pelaku agribisnis mampu bersaing dengan produk pertanian impor. Sinergi antara lembaga penyuluhan dan penelitian perlu dikembangkan, kebutuhan petani yang ditemukan oleh penyuluh ketika melakukan pemberdayaan perlu segera diinformasikan ke lembaga penelitian untuk dikaji, demikian pula inovasi temuan lembaga penelitian segera disampaikan oleh penyuluh kepada petani, meski demikian, lembaga penyuluhan juga dapat melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan teknologi tepat guna di pedesaan.

Petani dan pelaku agribisnis perlu memperoleh inovasi dan informasi terbaru, sebab persaingan produk pertanian semakin ketat, searah dengan era

globalisasi, terlebih lagi untuk melakukan ekspor hasil-hasil pertanian diperlukan persyaratan tertentu antara lain perlu bebas residu pestisida. Dengan demikian, petani dan pelaku agribisnis sangat memerlukan berbagai inovasi dari lembaga penyuluhan agar mampu bersaing, mampu dalam pemasaran hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian yang tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi untuk nasional dan bahkan internasional. Di samping itu, petani dan pelaku agribisnis dapat langsung meminta lembaga penelitian untuk mengkaji problema yang dihadapi petani.

Sejak era otonomi daerah pada tahun 1999, peran pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten sangat besar, terutama peran dalam mengelola pemberdayaan petani. Dengan demikian, agar para petani mampu bersaing dan mampu mengembangkan agribisnis, yang akhirnya meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), maka pemerintah daerah harus aktif mengembangkan dan mensinergikan kerja dari lembaga: penyuluhan pertanian, penelitian, dan petani/pelaku agribisnis.

Referensi

- Anonim. (2004), “Residu Pestisida pada Buah dan Sayuran”, *Sinar Tani*, No.3056.
- Departemen Pertanian RI (2002), *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*, Jakarta: Departemen Pertanian.
- Departemen Pertanian. (2005). *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian*.
- Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan. (1986). *Vademekum Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan*.
- Downey, W. David dan Steven P. Erickson. (1992), *Manajemen Agribisnis*, Alih bahasa Rochidayat Ganda S. dan Alfonsus Sirait, Jakarta: Erlangga.
- Dwidjono HD. (2005). *Kebijakan Revitalisasi Pertanian*. Makalah disampaikan pada seminar nasional dies natalis ke-59 Fakultas Pertanian UGM di Fakultas Pertanian UGM pada tgl 24 September 2005.
- Hariadi, Sunarru Samsi. (2005). *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada seminar ”Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah” di Pemda Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 23 Mei 2005.
- Hartono, Slamet. (2003). Pengembangan Bisnis Petani Kecil dalam *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional* Penerbit Liberty. Yogyakarta
- Masyhuri. (2003). *Pengembangan Agribisnis Dalam Era Globalisasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pertanian/Agribisnis pada Fakultas Pertanian UGM.
- Soemodiningrat, Gunawan. (2001). *Pembangunan Pertanian dalam Ekonomi Kerakyatan, Otonomi Daerah dan Persaingan Global* dalam Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Menjawab Tantangan.

- Tim Pustaka Setia. (2001). *UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000, GBHN 1999, Tap-Tap MPR pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000*. CV Pustaka Setia Bandung.
- Widiputranti, Christine Sri. (1996)., “Pembangunan Pertanian Berwawasan Agribisnis Untuk Pengentasan Kemiskinan”, *Cultivar* XII TH. IV–November. Majalah Kampus . ISSN: 1410-0606. APP, Yogyakarta.
- Widodo, Sri. (2003). *Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional, Suatu Tinjauan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

